

LAPORAN AKHIR

ALTERNATIF LAPANGAN KERJA BAGI PETANI KERAMBA JARING APUNG (KJA) DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN DANAU TOBA



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, laporan penelitian dengan judul “Alternatif Lapangan Kerja Bagi Petani Keramba Jaring Apung (KJA) Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba”, dapat selesai tepat pada waktunya.

Penelitian ini dibuat sebagai upaya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan *stakeholders* dalam memberikan alternatif lapangan kerja bagi Petani Keramba Jaring Apung (KJA) dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba. Kami menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat menerima kritik dan saran demi peningkatan hasil kajian menjadi lebih baik.

Demikian Laporan Akhir Penelitian ini kami sajikan, semoga kiranya apa yang sudah diupayakan dan dihasilkan dapat dipertimbangkan menjadi arahan kebijakan dalam program dan kegiatan dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Medan,

2021

Tim Peneliti,

SAMBUTAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, laporan penelitian dengan judul “Alternatif Lapangan Kerja Bagi Petani Keramba Jaring Apung (KJA) Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba”, dapat selesai tepat pada waktunya.

Penelitian ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan alternatif lapangan kerja bagi Petani Keramba Jaring Apung (KJA) dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba guna mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Super Prioritas Pariwisata Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Pepres No 81 tahun 2014 dan merupakan destinasi wisata kelas dunia dengan ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG) sejak 2 Juli 2020.

Seyogyanya potensi alam Kawasan Danau Toba mampu memberikan nilai tambah dan peluang bisnis bagi masyarakat lokal dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang mendukung aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya bertaraf internasional. Namun kehadiran ekonomi local oleh penduduk setempat dalam hal ini Petani Kerambah Jaring Apung (KJA) dimana bentuk kegiatannya harus bersinergi terhadap pariwisata berkelanjutan, adalah penting dilakukan pemetaan terhadap karakteristik kegiatan dan sumber daya manusia dari Petani KJA. Sebagai penduduk lokal setempat dan bagian dari kegiatan pariwisata berkelanjutan, para Petani Kerambah Jaring Apung (KJA) dipersiapkan guna mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba melalui konsep wisata berkelanjutan.

Penertiban kegiatan KJA sedikit banyak merubah tatanan perekonomian setempat bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu alternatif penyelesaian yang timbul dilakukan dengan cara pengoptimalan potensi pariwisata di Kawasan Danau Toba seperti Pengembangan sektor usaha wisata

kuliner dengan memanfaatkan konsep penataan KJA serta tempat pembenihan dan pemeliharaan ikan sebagai wisata edukasi perikanan. Selain itu dengan memaksimalkan sektor wisata lain khas Desa seperti Batu Gantung, Huta Sibatu Loting (Parherekan), Batu Lubang, Batu Gorga dan Konservasi Gajah serta pengembangan sektor usaha penginapan dengan mengeksplorasi keindahan alam, tentunya menjadi kekuatan alam tersendiri yang dimiliki Desa. Hal ini perlu dilakukan secara komprehensif dan matang serta dukungan oleh semua pihak.

Akhir kata, semoga kiranya apa yang dihasilkan dalam rekomendasi pada penelitian ini, dipertimbangkan menjadi arahan kebijakan yang dapat mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba dan kemaslahatan masyarakat sekitar Kawasan Danau Toba.

Medan, 09 November 2021

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**HARIANTO BUTAR BUTAR, SE., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680916 199503 1 005**

ABSTRAK

Perpres No. 81 Tahun 2014 menitiktekan penataan kawasan Danau Toba yang pastinya akan memberi dampak kepada para petani Kerambah Jaring Apung (KJA) di Kawasan Danau Toba. Untuk kemaksimalan konsep penataan terhadap KJA di kawasan Danau Toba, maka dilakukan penelitian untuk menemukan solusi dalam upaya pengurangan resiko sosial terhadap dampak usaha Petani KJA. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik dan kegiatan ekonomi masyarakat Petani KJA, menganalisis potensi alternative lapangan kerja baik secara umum dan khusus bagi Petani KJA yang dapat dikembangkan, serta mengidentifikasi kesiapan Petani KJA terhadap perubahan lapangan pekerjaan lain yang diarahkan. Lokasi penelitian berada di Desa Sibaganding dan Desa Tiga Ras di Kabupaten Simalungun dengan pembanding wilayah Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan alokasi waktu bulan Maret s/d Oktober 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumen dan interview personal. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan karakteristik masyarakat petani KJA dari dua desa yang diteliti memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam pengalihan alternatif usaha untuk mendukung potensi pariwisata di kawasan Danau Toba. Hal itu karena kondisi demografi di wilayah desa, untuk Sibaganding akan lebih menguntungkan kemaksimalan sektor usaha wisata kuliner dengan memanfaatkan konsep penataan KJA serta tempat pembenihan dan pemeliharaan ikan sebagai wisata edukasi perikanan. Di samping itu sektor wisata lain yakni khas Desa yaitu Batu Gantung, Huta Sibatu Loting (Parherekan) Batu Lubang, Batu Gorga dan Konservasi Gajah menjadi kekuatan alam tersendiri yang dimiliki Desa sebagai modal pendekatan Desa pada sektor wisata tambahan. Sedangkan Desa Tigaras potensial dengan keidahan alam sektor usaha penginapan dan kuliner cukup menjanjikan. Di samping wisata air dengan atraksi-atraksi danau menjadi sumber yang menjanjikan dalam mempersiapkan petani KJA beralih dari pekerjaan KJA. Rekomendasi akhir penelitian yakni 1) Penataan dan revitalisasi usaha KJA di Desa Sibaganding dengan memanfaatkan andalan desa lewat wisata kuliner olahan ikan desa, hal ini akan lebih maksimal dengan daya dukung pemanfaatan BUMDES Desa. 2). Pembentukan kebijakan daerah dengan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Sumatera Utara khusus penanganan dan penanggulangan Usaha KJA di Kawasan Danau Toba, dimana pemerintah sebagai fasilitator. Konsep Rencana Aksi Daerah ini akan memperkuat Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk konsisten dalam pengalokasian anggaran dalam mewujudkan dan memaksimalkan potensi wisata desa dalam pencapaian Desa Wisata.

Kata Kunci : Alternatif, Petani KJA, Pengembangan, Pariwisata, Danau Toba

ABSTRACT

The Presidential Decree No. 81 of 2014 emphasizes the arrangement of the Lake Toba area which will certainly have an impact on the Floating Net Cages (KJA) farmers in the Lake Toba area. To maximize the concept of structuring the KJA in the Lake Toba area, a study was conducted to find solutions in an effort to reduce social risks to the impact of KJA Farmers' businesses. The objectives of the research are; to identify the characteristics and economic activities of the KJA Farmers community, to analyze the potential alternative employment opportunities, both in general and specifically for KJA Farmers, that can be developed, and to identify the KJA Farmers prepared to change other directed jobs. The research location is in Sibaganding and Tigaras in Simalungun Regency with the comparison being the Tongging Village area, Brand District, Karo Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach, with an allocation of time from March to October 2021. Data collection techniques are carried out by distributing questionnaires, interviews, observations, document studies and personal interviews. The results of the study concluded that the characteristics of the KJA farming community from the two villages studied had different levels of readiness in diverting alternative businesses to support tourism potential in the Lake Toba area. This is because of the demographic conditions in the village area, for Sibaganding it will be more profitable to maximize the culinary tourism business sector by utilizing the concept of structuring KJA and fish hatchery and rearing sites as fisheries education tourism. In addition, other tourism sectors that are unique to the village, namely Batu Hanging, Huta Sibatu Loting (Paherekan) Batu Lubang, Batu Gorga and Elephant Conservation are natural forces that are owned by the Village as capital for the Village approach to the additional tourism sector. Meanwhile, Tigaras has potential with its natural beauty, the lodging and culinary business sector is quite promising. In addition, water tourism with lake attractions is a promising source in preparing KJA farmers to switch from KJA work. The final recommendations of the research are 1) Structuring and revitalizing the KJA business in Sibaganding Village by utilizing the village's mainstay through culinary tourism processed by village fish, this will be maximized with the carrying capacity of the use of Village BUMDES. 2). Establishment of regional policies with the Governor's Regulation on the North Sumatra Regional Action Plan specifically for handling and overcoming the KJA business in the Lake Toba area, where the government is the facilitator. This Regional Action Plan concept will strengthen the Duties and Functions of the Tourism Office and Village Community Empowerment Office to be consistent in budget allocation in realizing and maximizing the potential of village tourism in achieving Tourism Villages.

Keywords: *Alternative, KJA Farmers, Development, Tourism, Lake Toba*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
KATA SAMBUTAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Ruang Lingkup	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Penelitian yang Relevan	12
2.2. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Waktu & Lokasi Penelitian	26
3.3. Populasi dan Sampel	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data	29

3.5. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Pemetaan Karakteristik dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Petani KJA	31
4.2 Pemetaan Potensi Alternatif Lapangan Kerja Baik Secara Umum dan Khusus Petani KJA	40
4.3.Kesiapan Petani KJA Terhadap Perubahan Lapangan Pekerjaan yang Diarahkan	57
4.4.Analisis Strategi Alternatif Pengalihan Usaha Petani KJA	70
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Rekomendasi.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penyebaran KJA Kabupaten di Sumatera Utara.....	2
Tabel 1.2	Sebaran KJA Per Desa di Kabupaten Simalungun 2019	2
Tabel 1.3	Gambaran Hasil Produksi KJA Per Tahun.....	5
Tabel 1.4	Jumlah Pelaku Usaha Petani KJA di Kawasan Danau Toba.....	11
Tabel 2.1	Faktor Motivasi/Pendorong Wisatawan Berkunjung	22
Tabel 2.2	Sektor Usaha.....	23
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	27
Tabel 3.2	Jumlah Pelaku Usaha Petani KJA di Desa Sibaganding dan Tigaras	28
Tabel 3.3	Indikator Kuesioner Penelitian.....	30
Tabel 4.1	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel 4.2	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Usia	33
Tabel 4.3	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Pendidikan.....	34
Tabel 4.4	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Pendapatan Per Bulan	35
Tabel 4.5	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Lama Berusaha Sebagai Petani KJA	35
Tabel 4.6	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Pekerjaan Utama Sebagai Petani KJA	37
Tabel 4.7	Gambaran Pekerjaan Sampingan Petani KJA.....	38
Tabel 4.8	Keahlian/Keterampilan yang Dimiliki Petani KJA.....	39
Tabel 4.9	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Status Kepemilikan KJA	40
Tabel 4.10	Alternatif Pekerjaan Dalam Pengembangan Usaha di Kawasan Pariwisata Bagi Petani KJA.....	41
Tabel 4.11	Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Tanaman Padi Palawija Menurut Jenis Tanaman	43
Tabel 4.12	Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Tanaman	43
Tabel 4.13	Luas Tanaman dan Produksi Menurut Jenis Tanaman Perkebunan Rakyat	44

Tabel 4.14 Potensi Usaha Dagang di Girsang Sipangan Bolon	45
Tabel 4.15 Potensi Lokasi Wisata Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.....	45
Tabel 4.16 Produksi Rata-Rata Tanaman Palawija Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Dolok Pardamean	47
Tabel 4.17 Potensi Perkebunan Rakyat Kecamatan Dolok Pardamean	48
Tabel 4.18 Potensi Peluang Usaha Penginapan Alternatif Pengalihan KJA.....	49
Tabel 4.19 Peluan Pasar, Warung Klontong, Kedai Makanan dan Minuman Masing-Masing Nagori (Desa)/Kelurahan di Kecamatan Dolok Pardamean Sebagai Alternatif Usaha	50
Tabel 4.20 Peluang Alternatif Usaha Desa Sibaganding dalam Konsep Lapangan Kerja Wisata.....	54
Tabel 4.21 Peluang Alternatif Lapangan Usaha Bagi Petani KJA Desa Tiga Ras.....	57
Tabel 4.22 Kemauan Mengalihkan Pekerjaan dari KJA	58
Tabel 4.23 Alasan Tidak Siap untuk Beralih ke Pekerjaan Lain	58
Tabel 4.24 Alasan Kesiapan untuk Beralih ke Desa Tiga Ras.....	59
Tabel 4.25 Program Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun	65
Tabel 4.25 Anggaran Nasional ADD Tahun 2015-2017.....	74
Tabel 4.26 Anggaran Nasional Tahun 2019-2020	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administratif Kabupaten Simalungun.....	26
Gambar 4.1 Grafik Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Jenis	44
Gambar 4.2 Peta Kawasan Desa Sibaganding dan Desa Aek Nauli	46
Gambar 4.3 Kondisi KJA dari Kantor Nagori dari Ketinggian Lereng	51
Gambar 4.4 Lokasi Wisata Desa Sibaganding Alternatif Wisata Baru	52
Gambar 4.5 Taman Wisata Selfie dan Kebun Bunga Usaha Desa Sebagai Alternatif Usaha	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kawasan Danau Toba yang memiliki luas perairan kurang lebih 1.129 km² dan kedalaman 450 meter Kawasan Danau Toba dikelilingi oleh 7 kabupaten yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba Samosir, merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Berdasarkan PP 13/2017 tentang RTRW Nasional dan Perpres No. 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Kawasan Danau Toba dan sekitarnya menetapkan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Prioritas dan diturunkan melalui Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037. Selain itu pengembangan secara sektoral dokumen Riparnas Kementerian Parekraf Tahun 2020-2024 meletakkan Kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Prioritas Tujuan Wisata Skala Nasional maupun Internasional (Renstra Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024:23).

Pada tahun 2020, Kawasan Danau Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) yang sejajar dengan Geopark Batur, Gunung Sewu, Rinjani dan Ciletuh yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Potensi Kawasan Danau Toba sebagai Geopark Kaldera Toba memiliki keunikan “Supervulkano”. Kondisi ini menjelaskan nilai penting dari Kawasan Danau Toba baik dari sisi potensi dan peluang yang dimiliki terhadap pengembangan kawasan tersebut.

Perairan Kawasan Danau Toba, memiliki potensi sebagai sumber air baku, pertanian, perikanan, pariwisata, transportasi air yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada sekitarnya. Sejak tahun 1987 mulai berkembang budi daya ikan air tawar melalui budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan hingga saat ini produksinya bertambah baik dalam jumlah dan sebarannya di seluruh kawasan perairan danau dan dikelola secara tradisional oleh masyarakat maupun oleh badan usaha.

Pada tahun 2005, pengembangan budidaya KJA sebatas pada Desa Lumban Gaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir melalui kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara bekerjasama dengan Balai Informasi Pertanian yang selanjutnya meluas ke seluruh kabupaten di Kawasan Danau Toba dengan jumlah 6.366 unit KJA dan seluas total 667 Ha (A. Sinaga, n.d.). Meningkat di Tahun 2008, data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi diperoleh jumlah KJA di perairan Kawasan Danau Toba mencapai 7.012 unit/tahun yang terdiri dari kepemilikan PT. Aquafarm Nusantara sebanyak 1.780 unit dan kepemilikan masyarakat sebanyak 5.232 unit (K. E. Sinaga, 2019).

Data KJA di Sumatera Utara yang berhasil di peroleh dari berbagai sumber menunjukkan angka penyebaran sebagai berikut dalam Tabel 1.1:

Tabel 1.1. Data Penyebaran KJA Kabupaten di Sumatera Utara

No	Kabupaten	Unit KJA	Produksi (Ton)
1	Simalungun	8.880	27.900,85
2	Toba	539	628,29
3	Tapanuli Utara	220	880
4	Samosir	251	5.859,54
5	Dairi	1.967	2.358,04
6	Karo	458	349,96
7	Humbang Hasundutan	897	1.380,81
Jumlah		13.212	39.357,49
Keterangan: Data Hasil kompilasi dari Laporan Masing-masing Kabupaten (2021)			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (2021)

Tabel 1.2. Sebaran KJA Per Desa di Kabupaten Simalungun 2019

No	Desa	Kecamatan	Jumlah (Unit KJA)
1	Sibaganding	Girsang Sipangan Bolon	1.125
2	Tambun Raya	Pematang Sidamanik	313
3	Tiga Ras	Dolok Pardamean	200

4	Purba Pasir	Haranggaol Horison	11
5	Purba Horison	Haranggaol Horison	40
6	Purba	Haranggaol Horison	60
7	Sihalpe	Haranggaol Horison	30
8	Haranggaol	Haranggaol Horison	7.101
J U M L A H			8.880

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (2019)

Tabel 1.2 di atas menggambarkan penyebaran KJA di Kabupaten Simalungun memiliki jumlah yang cukup banyak jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Sebaran tiap desa dalam tawaran lokasi penelitian yakni Desa Sibaganding sebagai desa terdekat dengan pusat kegiatan kota wisata yakni Parapat dan Tiga Ras merupakan kawasan kegiatan wisata yang sangat berkembang pesat saat ini, sehingga diasumsikan mampu sementara menjangkau permasalahan di lokasi lainnya.

Kegiatan budidaya KJA banyak mendapat perhatian terkait dengan kontroversi antara kebutuhan sosial ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup, kegiatan produksi ekonomi dengan kemampuan daya dukung perairan. Dari aspek sosial ekonomi, perkembangan budidaya ikan dengan KJA di perairan Kawasan Danau Toba memberikan pengaruh positif bagi masyarakat terutama penduduk lokal. Kegiatan budidaya KJA dalam memproduksi ikan mampu meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat khususnya Petani KJA dimana hal ini selanjutnya menggerakkan kegiatan ekonomi lanjutan di sektor ekonomi lainnya seperti pariwisata, transportasi dan perdagangan.

Namun secara kontradiksi, pertumbuhan kegiatan budidaya KJA telah memberikan dampak negatif dimana pemanfaatan perairan danau yang berlebihan tanpa pengendalian terhadap kegiatan budidaya KJA menyebabkan terganggunya fungsi ekologis danau secara keseluruhan. Antonius Sinaga dkk (2011) menyimpulkan keterkaitan antara kerusakan ekologis dan penurunan kualitas air Kawasan Danau Toba dengan pemanfaatan budidaya ikan air tawar dengan konsep

KJA telah memberikan dampak pencemaran air Kawasan Danau Toba yang cukup berat di terutama pada kawasan KJA.

Selain pemanfaatan kawasan air danau sebagai produksi ikan air tawar dengan menggunakan konsep KJA, air Danau Toba juga merupakan sumber baku dan air minum dan keperluan domestik bagi masyarakat sekitar. Persentase masyarakat pengguna air danau sebagai sumber air minum higienis semakin berkurang karena penurunan kualitas air danau. Sebagian masyarakat mencari alternatif lain sumber air berupa air gunung, sedangkan masyarakat lainnya masih tetap menggunakan air danau karena tidak mempunyai sumber lain.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (2007) menjelaskan bahwa dari 147 lokasi pemukiman yang berada di pinggiran Kawasan Danau Toba, terdapat 88% menggunakan air danau sebagai sumber air minum tanpa pengolahan lanjut. Selain itu, terdapat tiga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menggunakan air danau sebagai sumber air bakunya yaitu PDAM Balige, PDAM Laguboti dan PDAM Pangururan (Germadan, 2015). Garno Yudhi Soetrisno dkk (2020) menyimpulkan bahwa analisis perairan Kawasan Danau Toba tidak/belum layak menjadi air baku air minum dan wisata air. Artinya tingkat pencemaran Air Kawasan Danau Toba sudah masuk pada level serius untuk dampak kerusakan ekologis.

Terhadap permasalahan tersebut, langkah strategis telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu upaya penataan pengelolaan usaha budi daya ikan menggunakan KJA yang sejalan dengan penerapan kebijakan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, antara lain; melaksanakan penertiban perizinan usaha KJA sesuai dengan daya dukung, tidak mengizinkan perusahaan budidaya KJA untuk memperluas usaha, serta penertiban KJA yang tidak memiliki izin usaha dan lokasi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan pengaturan tersebut. (<https://mediaindonesia.com>).

Catatan dari data sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021, diperoleh tahapan-tahapan usaha dalam mengurangi produksi budidaya KJA di tiap kabupaten sekitar Kawasan Danau Toba sebagaimana dalam tabel 1.3 berikut ini. Namun dapat dilihat bahwa usaha pemberlakuan penertiban dan pengurangan

produksi budidaya KJA dari tahun ke tahun yang dilakukan, namun produksi budidaya KJA justru semakin meningkat, dalam arti bahwa kegiatan penertiban KJA belum maksimal. Selanjutnya arahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa penertiban budidaya KJA di Kawasan Danau Toba hingga kapasitas produksi total 10.000 Ton per tahun merupakan kebijakan strategis yang harus terlaksana dalam tiga (3) tahun ke depan dengan memperhatikan nilai penting Kawasan Danau Toba dalam pembangunan pada tatanan nasional maupun internasional. Pelaksanaannya harus diantisipasi baik Pemerintah Daerah maupun pelaku budidaya KJA antara lain masyarakat yang terlibat langsung yaitu Petani KJA.

Tabel. 1.3. Gambaran Hasil Produksi KJA Per tahun

KERAGAAN KEGIATAN USAHA KJA TAHUN I				PREDIKSI USAHA KJA PENERTIBAN TAHUN II				KERAGAAN USAHA KJA TAHUN III					
NO	KABUPATEN	JUMLAH KJA	PRODUKSI (TON)	Porsi Produksi	NO	KABUPATEN	JUMLAH KJA	PRODUKSI (TON)	Porsi Produksi	NO	KABUPATEN	PRODUKSI (TON)	Porsi Produksi
1	TOBA	539	628,29	2%	1	TOBA	268	591,87	2%	1	TOBA	201,19	2%
2	DAIRI	1.967	2.358,04	6%	2	DAIRI	1.967	2.358,04	8%	2	DAIRI	801,53	8%
3	KARO	458	349,96	1%	3	KARO			0%	3	KARO	-	0%
4	SAMOSIR	251	5.859,26	15%	4	SAMOSIR	208	4.838,63	16%	4	SAMOSIR	1.644,72	16%
5	SIMALUNGUN	8.880	27.930,85	71%	5	SIMALUNGUN	7.442	20.750,55	71%	5	SIMALUNGUN	7.053,43	71%
6	HUMBANG HASUNDUTAN	897	1.380,81	4%	6	HUMBANG HASUNDUTAN			0%	6	HUMBANG HASUNDUTAN	-	0%
7	TAPANULI UTARA	220	880,00	2%	7	TAPANULI UTARA	220	880,00	3%	7	TAPANULI UTARA	299,13	3%
	TOTAL	13.212	39.387,21		TOTAL		10.105	29.419,09		TOTAL		10.000,00	

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

1. Berdasarkan total produksi sebesar 10.000 ton/tahun pada tahun III (2023)
2. Ukuran KJA bervariasi bentuk (persegi atau bulan) maupun volumenya sehingga keragaan tahun II (2022) dihitung berdasarkan volume produksi

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa usaha pemberlakuan penertiban dan pengurangan produksi KJA dari tahun ke tahun telah dilakukan, tetapi produksi hasil KJA semakin meningkat artinya penertiban KJA belum maksimal dan masih banyak petani yang tidak menaati peraturan untuk menutup KJAny.

Penertiban budidaya KJA tidak hanya akan merubah tatanan perekonomian namun juga memiliki resiko sosial bagi masyarakat pemanfaat baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Kurniasari, et. al. (2020) perlu dilakukan analisis resiko sosial yang muncul akibat penertiban budi daya KJA. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menghilangkan resiko sosial dapat dimulai dari menghilangkan sumber risiko dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat

dalam menciptakan lapangan kerja baru, sosialisasi kebijakan agar masyarakat memahami maksud dan tujuan kebijakan, menyediakan fasilitas berupa rubrik konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat serta mendiskusikan dan menawarkan alternatif-alternatif pekerjaan yang sesuai sebagai pengganti. Hal ini perlu dilakukan secara komprehensif dan matang dikarenakan adanya penataan dan penertiban akan menimbulkan gejolak dan resistensi masyarakat.

Mustalim (2015) mengungkapkan bahwa pengaruh kebijakan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya terhadap pelarangan penggunaan alat tangkap di masyarakat nelayan dapat mempengaruhi ekonomi dan psikologi dimana pendapatan hasil tangkap masyarakat nelayan menurun setelah adanya kebijakan sebelumnya. Jenita Rajagukguk (2017) menjelaskan bahwa aspek penghidupan masyarakat yang cukup berpengaruh adalah pendapatan, kesempatan kerja, konsumsi pangan, kondisi sosial, dan sumberdaya manusia mengalami perubahan sebelum dan sesudah implementasi Perpres Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya khususnya di Desa Silalahi II. Sangat perlu mengantisipasi kondisi ini melalui pendekatan yang efektif baik dalam bentuk komunikasi maupun memberikan alternatif sumber pendapatan pembudidayaan dari pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan pembudidaya di Desa Silalahi III.

Perjalanan kepariwisataan di Kawasan Danau Toba dalam catatan sejarah pernah mengalami kejayaan puncaknya pada tahun 1996 dengan kunjungan hampir empat juta wisatawan. Sejak masa itu hingga sekarang catatan tersebut tidak pernah terulang kembali. Kementerian Pariwisata mengungkapkan bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kawasan Danau Toba pernah mencapai - 30,94% pada tahun 2013 (Mahulaee, 2019). Kemungkinan penurunan geliat pariwisata yang ada tidak didukung pada konsep keberlanjutan sebagaimana konsep pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan pada saat ini dengan tidak mengabaikan kemampuan generasi mendatang (Baker, 2006). Pariwisata berkelanjutan adalah tujuan yang ingin dicapai, yang mampu mendukung aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya yang tidak bisa dipisahkan satu dengan

yang lain, karena ketiga aspek tersebut menimbulkan hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan pengaruh terhadap aspek lainnya. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).

Kawasan Danau Toba yang memiliki potensi pariwisata, belum sepenuhnya memberikan alternatif lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata. Terlihat dari puncak kedatangan (*peak season*) wisatawan ke kawasan ini hanya berkisar pada bulan Desember, Januari dan Juli. Hal ini mengakibatkan pilihan alternatif pekerjaan pada selain bulan-bulan tersebut lebih pada sektor perdagangan dan jasa (Mahulae, 2019). Akses terhadap lapangan pekerjaan selain bulan-bulan puncak kedatangan wisatawan, juga bersumber dari kegiatan perikanan tangkap dimana menyerap sekitar 4.000 orang (Kartamihardja, et.al: 2015). Sari dan Koeshendrajana (2011) mempertegas bahwa introduksi Ikan Bilih yang pernah ditebar di perairan Kawasan Danau Toba telah memberikan alternatif mata pencaharian pada masyarakat di Kawasan Danau Toba. Jika sebelumnya masyarakat hanya bekerja sebagai petani dengan mengelola kebun, dengan adanya introduksi Ikan Bilih terjadi peningkatan kegiatan menjadi nelayan dengan alat sederhana.

Keberlangsungan konsep wisata di Kawasan Danau Toba mengalami penurunan dimana kemungkinan dikarenakan terbaikannya keterlibatan masyarakat lokal terhadap kegiatan kepariwisataan di Kawasan Danau Toba (Mahulae, 2019). Keterlibatan masyarakat lokal terhadap proses rencana pengembangan wisata dalam konsep pariwisata sering digaungkan sangat minim. Partisipasi masyarakat hanya sebatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan seperti; memberi tempat tinggal, memberikan makanan dan minuman, penunjuk arah jalan, dan sebagainya. Menurut masyarakat, selama ini dalam proses pengambilan keputusan perencanaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat, setiap kebijakan hanya lahir dari pemerintah

sedangkan masyarakat hanya dilibatkan pada saat kebijakan itu sudah ada dalam berbagai diskusi dan sosialisasi.

Laporan *World Trade Organization* (WTO) secara akumulatif bahwasannya sektor pariwisata mampu mempekerjakan sekitar 230 juta lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi ratusan miliar dolar terhadap perekonomian di berbagai negara. Terlebih saat ini telah terjadi pergeseran negara tujuan wisata internasional dari negara maju ke negara-negara di Asia. (Naula Friska Meifika Lainah, *The Columnist.com*, 13 Desember 2019). Keindahan Kawasan Danau Toba merupakan destinasi wisata kelas dunia, yang lebih mengandalkan kekayaan alam lingkungan dimana Kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG). Hal ini menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang tersertifikasi.

Seyogianya potensi yang dimiliki alam Kawasan Danau Toba mampu memberikan nilai tambah dan peluang bisnis bagi masyarakat lokal setempat. Tuntun Sinaga, Doktor Bidang Kajian Budaya, menjelaskan dalam pengembangan industri pariwisata tentunya memiliki tantangan mulai dari level perencanaan, pelaksanaan, hingga upaya pelestarian budaya dan lingkungan ekologis. Lebih lanjut Tuntun Sinaga mengemukakan karena adanya pengakuan dunia yang diperoleh dari UNESCO yang menempatkan Kawasan Danau Toba sebagai salah satu warisan dunia telah memberikan nilai tambah tersendiri bagi Kawasan Danau Toba tidak saja sebagai daerah destinasi wisata yang sangat mempesona tetapi juga menjadi warisan dunia yang perlu dipelihara dan dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya (Rismawati, 2008).

Untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata yang berkelanjutan skala nasional dan bertaraf internasional, penertiban budidaya KJA menjadi suatu keharusan dan dampak resiko sosial ekonomi yang akan terjadi harus diminimalkan terutama bagi masyarakat terkena dampak langsung yaitu Petani KJA. Sangat penting untuk melakukan langkah dalam mempersiapkan kelompok ini diawali dengan melakukan pemetaan terhadap karakteristik kegiatan ekonomi budidaya KJA, karakteristik kemampuan yang dimiliki para Petani KJA, serta potensi alternative lapangan pekerjaan yang dapat dikembangkan bagi Petani KJA guna persiapan peralihan lapangan pekerjaan.

Selain dukungan infrastruktur, daya tarik kawasan wisata dapat terwujud dengan dukungan objek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, tata laksana serta kondisi masyarakat dan lingkungan sehingga kemaksimalan capaian dapat diwujudkan. Untuk itu diperlukan peranan masyarakat lokal dalam mewujudkan konsep pariwisata berbasis masyarakat setempat sebagaimana kemampuan yang dimilikinya.

Kabupaten Simalungun sebagai salah satu kabupaten sekeliling Kawasan Danau Toba memiliki berbagai jenis wisata wilayah yakni: wisata alam, wisata budaya, wisata agro dan wisata rekreasi, dimana yang terbanyak adalah wisata alam sebanyak 31 objek wisata (Profile Kab. Simalungun: 2015-2019). Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Provsu Tahun 2021, jumlah Petani KJA sebesar 7.421 orang adalah yang tertinggi berada di Kabupaten Simalungun dari Kabupaten lain di Kawasan Danau Toba. Padahal Kabupaten Simalungun sebagai bagian lokasi yang memiliki potensi dari ikon Kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Kecamatan Dolok Pardamean merupakan kecamatan yang memiliki objek wisata terbanyak namun budidaya KJA pada lokasi ini lebih banyak dibandingkan lokasi pada kecamatan lain di Kabupaten Simalungun, selain Haranggaol.

Lokasi lebih detail penelitian ini berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Desa Sibaganding dan Kecamatan Dolok Pardamean pada Desa Tigaras. Pemilihan 2 Desa ini adalah karena selain memiliki penduduk yang berprofesi sebagai Petani KJA, bahwa kedua Desa ini merupakan destinasi pariwisata di Kabupaten Simalungun.

Kondisi ini merupakan alasan pemilihan lokus penelitian yang nantinya dapat sebagai referensi bagi kebijakan alternative lapangan kerja bagi Petani KJA di kabupaten lain yang mengelilingi Kawasan Danau Toba. Hasil dalam penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan jawaban pilihan bagi masyarakat Petani KJA dalam mengalihfungsikan kegiatan ekonomi mereka kepada alternative mata pencaharian lain yang berpotensi dengan melihat peluang di sektor pariwisata. Selain itu, adanya pemetaan kemampuan dan skill masyarakat Petani KJA di luar sebagai Petani KJA diharapkan dapat mendukung kepariwisataan di Kawasan Danau Toba.

1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana karakteristik dan kegiatan ekonomi masyarakat Petani KJA?
2. Bagaimana potensi alternative lapangan kerja baik secara umum dan khusus bagi Petani KJA yang dapat dikembangkan?
3. Bagaimana kesiapan Petani KJA terhadap perubahan lapangan pekerjaan lain yang diarahkan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan karakteristik dan kegiatan ekonomi masyarakat Petani KJA di wilayah penelitian.
2. Memetakan potensi alternatif lapangan kerja baik secara umum dan khusus bagi Petani KJA yang dapat dikembangkan.
3. Menganalisis kesiapan Petani KJA atas perubahan lapangan pekerjaan yang diarahkan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Simalungun khususnya usaha Petani KJA di Kecamatan Dolok Pardamean dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, serta pelaku wisata dalam merumuskan kebijakan pengembangan wisata di Kabupaten Simalungun khususnya di Kecamatan Dolok Pardamean dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
3. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian lanjutan dalam pencarian solusi kepariwisataan terhadap Petani KJA di Kecamatan Dolok Pardamean dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon .

1.5. RUANG LINGKUP

Penelitian dilaksanakan pada lokus di Kecamatan Dolok Pardamean dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Selain itu, terdapat juga lokus pembanding yakni Desa Tongging Kecamatan Merek Tongging Kabupaten Karo.

Tabel 1.4. Jumlah Pelaku Usaha Petani KJA di Kawasan Danau Toba

No.	Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha Eks Petani KJA (orang)
1.	Dairi	926
2.	Toba	2664
3.	Humbang Hasundutan	1116
4.	Simalungun	7421
5.	Karo	2373
6.	Samosir	596
7.	Tapanuli Utara	2993

Sumber: Data Kusuka (Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Sumut) 2021

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan objek langsung para Petani KJA dengan metoda penelitian yang ditentukan, juga dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat yang langsung. Alasan lain adalah bahwa Kabupaten Simalungun memiliki jumlah pelaku usaha Petani KJA tipe perorangan terbanyak diantara 7 kabupaten di sekitar Kawasan Danau Toba, disajikan dalam bentuk matriks pada Tabel 1.4.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN YANG RELEVAN

Kajian terdahulu menjadi landasan berpikir dalam penelitian ini antara lain:

1. Garno Yudhi Soetrisno dkk, dikutip dari Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 21, No 1, Januari 2020, 118-124, yang berjudul “Kualitas Air Kawasan Danau Toba di wilayah Toba Samosir Kelayakan dan Peruntukannya”, menyimpulkan bahwa analisis perairan Kawasan Danau Toba tidak/belum layak menjadi air baku air minum dan wisata air.
2. Drs. Antonius Sinaga dkk, Tahun 2011, dengan judul “Pemetaan Kualitas Kawasan Danau Toba Akibat Dampak Budidaya Sistem KJA Sebagai Upaya Relokasi Budidaya Ikan, menyimpulkan: 1. Kualitas perairan Kawasan Danau Toba Sekitar Keramba Jaring Apung wilayah penelitian yaitu Bakkara, Muara, Balige, Sibaganding, Haranggaol, Tongging, Silalahi, Simanindo, Pangururan, dan Tomok umumnya sudah tercemar berat, 2. Kualitas perairan sekitar perairan Kawasan Danau Toba sekitar KJA Sibaganding, Haranggaol, Tongging dan Tomok umumnya sudah tercemar berat. Sedangkan Lokasi yang lainnya tercemar sedang sampai tercemar berat, 3. Pencemaran air di daerah penelitian ini adalah disebabkan adanya aktifitas budidaya ikan sistem KJA.
3. Porman Juanda Marpomari Mahulae, Tahun 2019, dengan judul “Deskripsi Permasalahan Upaya Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara”, dalam kesimpulan menjelaskan: Penyelesaian persoalan dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan, masih merupakan tugas besar bagi para stakeholder kepariwisataan di Kawasan Danau Toba. Hal ini dapat dilihat dari daftar permasalahan yang telah teridentifikasi pada penelitian ini, yang menggambarkan belum berjalannya sebuah manajemen pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di sebuah destinasi wisata. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah: 1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur) dan Pemerintah Kabupaten (Para Bupati) di sekitar Kawasan Danau Toba agar berkoordinasi sesuai fungsi secara efisien, dengan membangun badan koordinasi lintas sektor yang terlibat di dalam perencanaan,

pengembangan dan pengelolaan, termasuk keberlanjutan program pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba. 2. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten di sekitar Kawasan Danau Toba melalui badan koordinasi lintas sektor, perlu menyusun Rencana Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan tahun jamak (jangka pendek, menengah dan jangka panjang) di Kawasan Danau Toba.

4. Nendah Kurniasari, dkk, Tahun 2020, dengan judul : “Risiko Sosial Penertiban Keramba Jaring Apung Di Waduk Jatiluhur”, Jurnal Sosial Ekonomi, Vol. 15 No. 1, dalam kesimpulan menegaskan: Risiko sosial yang terjadi karena Program Penertiban KJA di Waduk Jatiluhur tidak hanya akan berdampak terhadap kondisi ekonomi, namun juga akan membawa berbagai risiko sosial. Risiko sosial yang akan terjadi berupa *culture shock* masyarakat akibat perubahan pola kehidupan, kohesifitas masyarakat menurun akibat modal *trust* yang hilang sehingga rentan terhadap konflik horizontal, hilangnya jaminan sosial, dan berbagai permasalahan demografi. Permasalahan demografi meliputi meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka putus sekolah, meningkatnya angka kriminalitas, dan mobilitas teritorial berupa migrasi masyarakat keluar daerah. Akibat dari migrasi ini menimbulkan permasalahan sosial lanjutan berupa teralienasinya masyarakat dari sumberdaya yang dimiliki yaitu sumberdaya perikanan di Waduk Jatiluhur.
5. Feronica Simanjorang, dkk, dalam jurnal Profit, Volume 13 No 4 Tahun 2019 dengan judul “Peran Stakeholder Dalam Pembangunan Pariwisata Di Pulau Samosir”, menyimpulkan dalam pembangunan pariwisata, stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda masing-masing berperan: Masyarakat lokal berperan penting dalam mempertahankan warisan budaya melalui pertunjukan seri. Mereka meyakini mampu mengelola warisan dan situs-situs budaya secara mandiri. Masyarakat menempatkan dirinya sebagai subjek yang berhak untuk mengelola sumber daya pariwisata. Hasilnya, masyarakat secara langsung menerima manfaat ekonomi dari aktivitas wisata yang terjadi di lingkungan mereka. Di sisi lain, kondisi tersebut menghambat pemerintah untuk membangun hubungan kerja sama sehingga sulit melakukan inovasi. Pemerintah daerah diketahui aktif memberikan pelatihan keterampilan

untuk meningkatkan kapasitas SDM di desa-desa wisata unggulan. Hal tersebut disambut baik oleh masyarakat lokal dengan cara berpartisipasi, namun di sisi lain peneliti belum melihat adanya pengawasan yang berkelanjutan sehingga kegiatannya masih dalam bentuk program. Dalam upaya perbaikan sarana dan prasarana aksesibilitas, Kementerian PUPR diketahui terus memberikan dukungan sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Pihak swasta diketahui belum menjalin kerja sama dengan pemerintah. Mereka berperan dalam menyediakan sarana transportasi danau dan akomodasi penginapan, namun hal tersebut belum terhubung dengan aktivitas wisata lainnya.

2.2. KAJIAN TEORI

Konteks pariwisata merujuk pada UU No. 9/1990 tentang Kepariwisata, pada Pasal 2 menegaskan bahwa Penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan kepercayaan pada diri sendiri. Memahami asas usaha bersama dan kekeluargaan, berarti bahwa kepariwisataan harus merupakan usaha bersama dan gotong royong dan bukan merupakan seseorang atau satu golongan. Sebagaimana lebih lanjut dirumuskan apabila tujuan penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia adalah: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan kesejahteraan rakyat; Menghapus kemiskinan, Mengatasi pengangguran; Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; Memajukan kebudayaan; Mengangkat citra bangsa; Memupuk rasa cinta tanah air; Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; Mempererat persahabatan antarbangsa. Mencapai tujuan penyelenggaraan pariwisata di atas membutuhkan satu konteks lapangan pekerjaan yang sesuai potensi sumber daya dalam mengisi kesempatan kerja khususnya pada lokasi pariwisata dimaksud.

Keterkaitan dengan tenaga kerja di sektoral pariwisata, yaitu orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja (Chaniago, 2010). Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sumarsono yang dikutip dari (Lestyasari, 2017), tenaga kerja adalah merupakan semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi

mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksud agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan. Dalam penempatan pekerjaan, pemahaman *Teori Fungsi Sosial* dari Bowels dan Gitins, menegaskan peluang kesempatan kerja di masyarakat akan tergantung kepada keluarga, tempat kerja dan pendidikan. Artinya pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang berperan mengisi kekosongan keterampilan atau potensi yang ada (Patinasarani, 2012).

Mengutip defenisi *interaksi sosial* yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang meliputi hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Tolak ukur berhasilnya relasi interaksi sosial itu dapat diukur pada dua faktor yakni: kontak sosial artinya merasa membutuhkan dan saling mendukung, dan komunikatif artinya adanya reaksi bersambut yang menghasilkan kerjasama (Soekanto, 2014).

Dua landasan teori di atas digunakan sebagai dasar analisa sejauh mana kemampuan sumber daya yang dapat mendukung konsep alternatif mata pencaharian yang dapat dikembangkan bagi Petani KJA.

2.2.1 Alternatif Lapangan Kerja

Dalam kaitan pengembangan pariwisata, catatan dalam Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019 menjelaskan bahwa upaya konsep promosi Kawasan Danau Toba, bertujuan untuk mendukung Visi Kementerian yakni: mengembangkan destinasi kelas dunia. Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah pengembangan konsep pariwisata, melalui pemasaran terhadap promosi 100 Wonderful *event* Indonesia dan 10 top *event*, antara lain: Festival Kawasan Danau Toba, Festival Danau Sentani, Festival Raja Ampat, Festival Keraton Ambon, Festival Kuliner Nusantara di beberapa ibukota provinsi, Tour de Singkarak

Sumatera Barat, Jakarta Maraton, Festival Bahari Tambora dan sebagainya (Kreatif, 2019).

Sebagai salah satu target prioritas yang dipromosikan tentunya membuka seluas-luasnya kesempatan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dimana sektor pariwisata akan signifikan berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara. Dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata dapat menghasilkan dampak industri hulu dan hilir, dan dapat membuka peluang kerja yang amat luas baik di sektor formal maupun informal (Warpani, S.P dan Warpani, 2007). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2013, telah memastikan bahwa salah satu solusi alternatif untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pemanfaatan potensi lokal, baik itu potensi alam maupun keanekaragaman budayanya (Risman et al., 2016).

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk memperoleh devisa selain dari penghasilan non migas. Peranan pariwisata dalam pembangunan nasional, di samping sebagai sumber perolehan devisa juga banyak memberikan sumbangan terhadap bidang-bidang lainnya. Diantaranya menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong pelestarian lingkungan hidup dan budaya bangsa, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan lain sebagainya (Karyono, 1997).

Potensi Alam Kawasan Danau Toba telah lama terkenal, tetapi diakui belum maksimal di sektor pariwisata. Dari beberapa kajian pada aspek keindahan alam diakui Kawasan Danau Toba mengalami penurunan kualitas, antara lain ditandai dengan adanya nilai parameter kualitas air yang melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan (Karyono, 1997).

Beberapa kajian menjelaskan bahwa kegiatan pariwisata Kawasan Danau Toba mengalami perkembangan stagnan. Data dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Simalungun tahun 2012, mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung terbanyak adalah tahun 1997 yaitu sebanyak 1.125.177 jiwa, hingga tahun 2016 pengunjung terus mengalami penurunan hanya mencapai 26.463 jiwa mengakibatkan fasilitas pariwisata mulai banyak yang terlantar (Karyono, 1997).

Lumbanraja (2012) mencatat bahwa masa kejayaan wisata di Danau Toba mengalami masa puncak pada tahun 1996 dengan kunjungan hampir empat juta wisatawan. Sejak masa itu hingga sekarang catatan tersebut tidak pernah terulang kembali. Bahkan Kementerian Pariwisata mengungkapkan bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Danau Toba pernah mencapai -30,94% pada tahun 2013 (Kementerian Pariwisata, 2016) yang dikutip dari Porman Juanda Marpomari Mahulae (2019).

Diperlukan penataan yang komprehensif kembali di Kawasan Danau Toba untuk melihat potensi dan peluang yang dilakukan dalam paradigma pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dan bukan hanya sebagai alat pembangunan (Hasan & Azis, 1999). Pencarian alternatif bentuk kegiatan ekonomi sebagai peralihan mata pencaharian jika dikaitkan kepada prinsip Interaksi sosial bagi Petani KJA dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta menjadi satu prioritas dalam penataan kembali kawasan ini.

2.2.2 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu instansi (B. K. Simalungun, 2021). Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Kebijaksanaan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Tingginya kesempatan kerja di suatu daerah akan berpengaruh pada pembangunan ekonominya, dengan demikian jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses

pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berupa proses produksi.

Penciptaan kesempatan kerja adalah langkah yang tepat, mengingat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dari permintaannya. Kelebihan tenaga kerja ini biasanya merupakan tenaga kerja tidak ahli, sehingga perlu kiranya perluasan investasi pada proyek-proyek padat karya, bukan pada perkembangan sektor kapitalis dengan ciri utama padat modal sebagai hasil dari pilihan strategi pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja. Kesempatan kerja didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha memberi pekerjaan atau penghidupan yang layak kepada seseorang. Kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lowongan pekerjaan yang belum diisi. Dalam hal ini kesempatan kerja bukanlah lapangan kerja yang masih terbuka, walaupun komponen terakhir ini akan menambah kesempatan kerja yang ada di waktu yang akan datang (Laitupa:2015).

Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut adanya kebutuhan kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Perluasan kesempatan kerja produktif bukan berarti hanya menciptakan lapangan usaha baru. Melainkan pula usaha peningkatan produktivitas kerja yang pada umumnya disertai dengan pemberian upah yang sepadan dengan apa yang telah dikerjakan oleh setiap pekerja.

Gray (1992) mengungkapkan bahwa tujuan penciptaan kesempatan kerja berkaitan erat dengan pertimbangan pemerataan pendapatan, mengingat bagian terbesar kelompok penduduk yang tergolong penganggur sekaligus merupakan golongan yang berpenghasilan rendah. Dan terdapat golongan penganggur terdidik yang hidup dari bantuan keluarga sambil menunggu kesempatan kerja dengan tingkat upah yang memenuhi harapannya, biasanya kesempatan kerja di sektor pemerintah (Junaidi dan Zulfanetti, 2016).

Keluarnya kebijakan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, karena dianggapnya Budidaya Perikanan Kawasan Danau Toba lewat konsep KJA mengakibatkan pencemaran lingkungan Kawasan Danau Toba sehingga

menimbulkan berkurangnya jumlah wisatawan yang ada di Kawasan Danau Toba. Penataan ruang kawasan Kawasan Danau Toba menjadi satu landasan dalam mencari solusi dalam penertiban KJA untuk mendorong penyediaan lapangan pekerjaan melalui promosi wisata. Otonomi daerah yang telah ada sebelumnya akan menjadi ujung tombak yang diyakini akan mendorong daerah Kawasan Danau Toba dan sekitarnya harus bersikap mandiri karena memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan mengontrol daerahnya sendiri.

Wisata Kawasan Danau Toba yang melekat sebagai wisata dunia dari segi potensi budaya (*culture*), potensi sosial, dan potensi alamnya, melalui alternatif pencarian solusi melalui penertiban KJA diharapkan mampu mengundang dan membuat wisatawan berkunjung kembali di Kawasan Danau Toba.

Kesiapan Pemerintah wajib berperan penting, sebagaimana yang dipahami dari prinsip interaksi sosial dari Bowels dan Gitin yang menitiktekan Peningkatan Skill dan Sumber daya Manusia akan membuka perluasan kesempatan kerja dalam mengembangkan usaha di sektor-sektor produktivitas pariwisata sehingga akan mampu mendukung perluasan kesempatan kerja itu sendiri.

2.2.3. Lapangan Kerja/Usaha Desa Sibaganding Dan Tiga Ras.

Kebijakan negara dalam lapangan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Bertitik tolak dari kebijaksanaan tersebut maka dalam rangka mengatasi masalah perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, memandang perlu untuk menyusun program yang mampu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Kebijaksanaan yang diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja harus dilihat dalam hubungan dengan kebijaksanaan yang menyangkut pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Salah satu kebijaksanaan kesempatan kerja adalah mengadakan identifikasi terperinci, tidak hanya mengenai jumlah angkatan kerja, melainkan juga lokasi dan penggolongan

menurut lingkungan hidup, persebaran antara daerah, antar sektor, antar kota/pedesaan dan sebagainya.

Pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2013).

Sektor pariwisata telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Syechalad, 2017), dimana sektor pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian baik sebagai salah satu sumber penghasil devisa maupun sebagai pencipta lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Beberapa sektor-sektor lapangan usaha yang cukup menjanjikan di kawasan Pariwisata yakni: sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran. Untuk lebih mengembangkan sektor ini memerlukan peran Pemerintah dalam melakukan penguatan dan promosi wisata yang ada guna menarik pengunjung ke lokasi wisata.

Menurut Pena-boquete dan Perez-dacal, yang dikutip dari (Unud et al., 2017), spesialisasi pariwisata daerah bisa memiliki efek positif pada kondisi tenaga kerja untuk wilayah itu sendiri. Artinya sektor usaha pariwisata yang berkualitas ketika dikelola dengan baik akan dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat dan bahkan bisa menjanjikan sampai berkelanjutan.

Masyarakat Desa Tiga Ras pada awalnya termotivasi menggunakan KJA sebagai alat budidaya ikan tawar, terlebih adanya pengalaman yang telah dimiliki dari pelaku usaha privat yang lebih dahulu melakukan pembudidayaan ikan nila dengan konsep KJA. Kebiasaan awal masyarakat sebelum mengenal konsep KJA adalah nelayan biasa bekerja sebagai nelayan tangkap dan juga bekerja sampingan sebagai petani (Edward G.P. Samosir, 2015). Dalam artian pekerjaan yang berpotensi yang dipahami masyarakat adalah Nelayan dan Bertani dan budidaya KJA menjadi mata pencaharian masyarakat setempat.

Perpres 81/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya menetapkan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Prioritas yang mana pengembangannya dipastikan akan menimbulkan lapangan pekerjaan baru. Namun Petani KJA dengan kegiatan budidaya KJA ini telah mengakibatkan

pencemaran terhadap lingkungan yang berdampak kepada kegiatan pariwisata di Kawasan Danau Toba pada masa kini dan yang akan datang nanti. Jika air danau tercemar maka kehidupan masyarakat menjadi sulit dan pariwisata akan berhenti dan diprediksi tidak ada yang berminat berwisata ke tempat yang sudah tercemar.

2.2.4. Kesempatan Kerja Yang Dapat Dilakukan Petani KJA

Karl Marx yang dikenal dengan konsep *matrealisme historis* menempatkan perubahan yang dapat mempengaruhi masyarakat berada pada perubahan struktur ekonomi sebagai awal kegiatan manusia. Struktur ekonomi sebagai penggerak sistem sosial akan menyebabkan perubahan sosial, dimana lingkungan ekonomi menjadi dasar segala perilaku manusia. Lebih lanjut Marx, mempertegas perubahan masyarakat terdapat pada infrastruktur dapat berupa struktur ekonomi, dan suprastruktur meliputi ideologi, hukum, pemerintahan, keluarga dan agama. Struktur ekonomi merupakan landasan tempat membangun semua basis kekuatan lainnya, dengan demikian perubahan cara produksi menyebabkan perubahan seluruh hubungan sosial manusia (Sztompka, 2008).

Penertiban budidaya KJA akan mendorong para Petani KJA untuk beralih kepada cara lain dan beradaptasi dari budidaya KJA kepada budidaya ikan darat jika ingin mempertahankan perikanan sebagai sektor usaha ekonomi. Peralihan bentuk mata pencaharian dari budidaya KJA ke sektor lain tentunya akan memicu berbagai respon dalam bentuk perubahan baik pola perilaku sosial maupun ekonominya.

Adanya perubahan dan peralihan mata pencaharian dari budidaya KJA ke sektor oleh Petani KJA dengan pemikiran Karl Marx dan dikaitkan terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebagai dampak penertiban KJA di Kawasan Danau Toba maka salah satu peluang Petani KJA adalah peluang sektor usaha di industri pariwisata. Tolok ukur kesempatan kerja bagi Petani KJA pada kajian ini adalah bentuk kegiatan ekonomi seperti apa yang mampu dilakukan sesuai sumber daya yang tersedia dan kemampuan Petani KJA tersebut sebagaimana Teori Interaksi Sosial oleh Bowels dan Gitins dimana ketersediaan tenaga kerja dengan sistem pendidikan dan skill kecakapan yang dimiliki akan lebih berpeluang memperoleh pekerjaan.

Dalam pengembangan pariwisata dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah itu dimana peningkatan kunjungan akan dipengaruhi terhadap kondisi kebutuhan pengunjung di lokasi, apakah tempat itu memiliki sarana yang mampu menciptakan pengunjung bersedia atau mau kembali datang ke lokasi tersebut. Beberapa gambaran faktor yang mendorong wisatawan bersedia melakukan perjalanan ke lokasi wisata itu kembali didorong karena beberapa faktor sebagaimana dikutip dari (Zuhriana et al., 2013), digambarkan pada tabel 2.1 di bawah.

Tabel. 2.1. Faktor Motivasi/Pendorong Wisatawan Berkunjung

No	Faktor	Unsur
1	Motivasi	a. Menikmati panorama alam b. Menikmati obyek pemandangan/ perkemahan c. Lokasi dekat tempat tinggal d. Menikmati satwa/tumbuhan unik
2	Perangkutan/ Assesibilitas	a. Baik b. Cukup baik
3	Informasi/ Promosi	a. Teman/saudara b. Media cetak c. Media elektronik d. Sumber Lain
4	Pelayanan pengunjung	a. Kurang Baik b. Cukup Baik c. Baik
5	Fasilitas ekowisata	a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Cukup Baik d. Baik

Sumber: Zuhriana et al., 2013.

Mengantisipasi sejauh mana kesiapan Petani KJA di Desa Sibaganding dan Desa Tiga Ras dalam beralih kegiatan ekonomi sebagai mata pencaharian yang diharapkan dapat mendukung sektor wisata akan dipengaruhi kepada faktor-faktor di atas. Erik Cohen (1984) tentang konsep pengembangan ekonomi lokal yang dikutip dari Jurnal Ekonomi (Donuisang et al., 2017) menegaskan dalam pengembangan ekonomi lokal yang dalam hal ini adalah Desa Sibaganding dan Desa Tiga Ras akan dipengaruhi dari faktor Internal dan Eksternal. Faktor Internal meliputi ada tidaknya daya dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber

Daya Alam (SDA), dan Infrastruktur. Sedangkan Faktor Eksternal meliputi kondisi alam, *stakeholder*, teknologi.

Dikaitkan kepada pengembangan konsep ekonomi lokal yang dikemukakan Erik Cohen dan keterkaitannya kepada Faktor Internal dan Eksternal yang ada sebagai daya dukung pada lokasi Desa Sibaganding dan Desa Tiga Ras, maka tawaran pencarian solusi alternatif sebagai peluang kerja dari Petani KJA pada tabel 2.2 di bawah yakni:

Tabel. 2.2. Sektor Usaha

No	Sektor Usaha	Jenis Kesempatan Kerja
1.	Pertanian	Hutan Wisata (Ecowisata)
		Eco Farming
		Budi daya Ikan Darat
		Budi daya tanaman hias
2.	Perdagangan	Warung makanan/minuman
		Restoran
		Souvenir
		Rental Sepeda
3.	Jasa	Pemandu Wisata
		Penitipan kendaraan
		Juru Parkir
		Transportasi
		Biro Perjalanan
4.	Atraksi	Atraksi outbond
		Seni
		Musik
		Atraksi air (Banan Boat)
		Jets Sky
5.	Akomodasi	Home Stay
		Pengelola obyek wisata
		Toilet umum
		Penyewaan kamar bilas
		Penyewaan peralatan renang

Sumber: Cohen, 1979.

2.2.5. Jenis-Jenis Konsep Pariwisata

Menurut Pendit (2006) yang dikutip dari (Shavinia, 2018) mengemukakan beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara lain:

- a. Wisata Budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan, untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka seperti eksposisi seni tari, seni drama, seni musik dan seni suara.
- b. Wisata Kesehatan, yaitu perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang mengandung mineral yang dapat menyembuhkan.
- c. Wisata Olahraga, yaitu perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara seperti Asian Games, Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup dan lain-lain.
- d. Wisata Komersial, yaitu perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
- e. Wisata Industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian di mana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian termasuk dalam golongan wisata industri ini.
- f. Wisata Maritim, yaitu perjalanan yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air seperti di danau, bengawan, pantai, teluk atau laut, seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetensi berselancar, balapan mendayung dan lain-lain.
- g. Wisata Bulan Madu, yaitu perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka ketempat-tempat romantis bagi sepasang pengantin baru.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penjelasan tentang alternatif lapangan kerja bagi Petani KJA dalam mendukung pariwisata di Kawasan Danau Toba. Jenis penelitian ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa (1) penelitian kualitatif meskipun hanya mencakup skala lokasi penelitian yang kecil/terbatas, mampu mengembangkan pada kerangka konseptual yang lebih luas, (2) penelitian kualitatif tidak semata-mata hanya mementingkan hasil saja, melainkan aspek proses adalah sesuatu yang lebih utama, bahkan (3) penelitian kualitatif sangat baik apabila suatu penelitian ingin menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh sehingga hasil penelitiannya merupakan deskripsi detil yang tidak kaku tetapi juga mendalam.

Menurut Taylor dan Bogdan, metode penelitian adalah cara yang dipakai peneliti untuk mencari masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya (Afrizal, 2014). Inti dari penjelasan ini adalah metode penelitian merupakan suatu cara atau metode yang digunakan seorang peneliti untuk mencari jawaban atas pertanyaan dengan menggunakan beberapa teknik-teknik tertentu yang terdiri dari proses, pelaksanaan, dan laporan hasil penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan mendekati objek yang akan diteliti agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara, data isian, dan observasi ke lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber terkait. Subjek penelitian adalah Pemerintah Daerah setempat dan pelaku/pekerja Petani KJA yang juga menjadi informan penelitian. Jumlah pelaku usaha/pekerja Petani KJA sebagai informan penelitian sesuai kebutuhan dengan menggunakan Metode Snowball dalam arti bahwa jumlah pelaku usaha, Petani KJA sebagai informan penelitian berhenti dan cukup ketika data dan informasi yang didapat telah menemui titik kejenuhan. Objek yang diteliti adalah alternatif lapangan kerja bagi Petani KJA dalam mendukung pariwisata di Kawasan Danau Toba.

3.2 WAKTU & LOKASI PENELITIAN

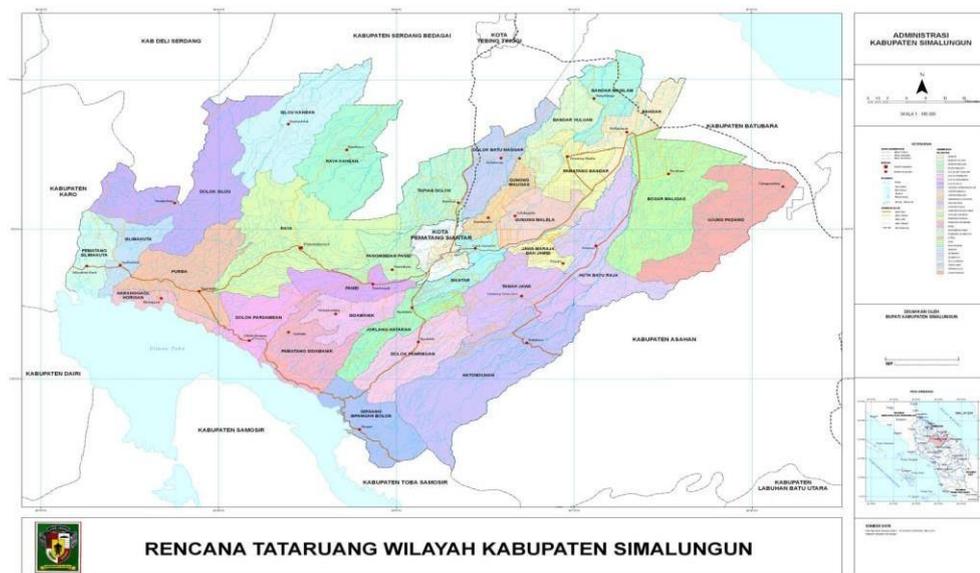
3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret s/d Oktober 2021 sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang terdapat pada Tabel 3.1 berikut.

3.2.2 Lokasi Penelitian

Lokus penelitian berada di Kabupaten Simalungun yakni Desa Sibaganding di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Desa Tiga Ras di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

Kondisi geografis Desa Sibaganding di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ini berada di dataran tinggi dan jarak antara desa dengan ibukota kecamatan yaitu Parapat sejauh tiga km. Desa ini memiliki 12 Dusun yakni Aek Nauli, Tanjung Dolok, Siuhan, Sileutu, Panahatan, Sibaganding, Sait Dolok, Hubuan, Simpang Patra Jasa, Sigaol-gaol, Repa Dolok dan Sualan.



Sumber: RTRW Kab Simalungun

Gambar 3.1. Peta Administratif Kabupaten Simalungun

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	PERENCANANAAN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
1.	Penyusunan ToR	■																																			
2.	Rapat ToR	■																																			
3.	Penyusunan Proposal dan Kuesioner		■	■	■	■	■	■	■																												
4.	Review Proposal								■																												
5.	Perbaikan Proposal								■																												
6.	Sidang TPM I								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	PELAKSANAAN								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
7.	Pengumpulan data lapangan a. Observasi b. Wawancara								■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
8.	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)													■	■																						
9.	Pengolahan / Analisa Data																	■	■	■																	
10.	Penyusunan Draft laporan akhir																				■	■	■														
11.	Sidang TPM II																				■																
12.	Revisi laporan penelitian																					■	■	■													
13.	Seminar Hasil																									■											
14.	Revisi akhir laporan penelitian																											■	■								
15.	Penjilidan laporan akhir																															■	■				

Desa Tiga Ras di Kecamatan Dolok Pardamean merupakan desa yang terletak di pesisir perairan Kawasan Danau Toba secara Geografis Desa Tigaras merupakan di daerah perbukitan serta mengarah ke daerah pinggiran Kawasan Danau Toba. Jarak Desa Tigaras ke ibukota Kecamatan 6 km dengan waktu tempuh 15 menit.

Lokus pembanding dalam penelitian terletak pada Kabupaten Karo, Kecamatan Merek Desa Tongging dengan pertimbangan Desa Tongging juga merupakan kawasan pariwisata mengingat lokus dan topografi dan sama-sama merupakan daerah wisata.

3.3. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Populasi penelitian adalah seluruh populasi Petani KJA Desa Sibaganding di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Desa Tiga Ras di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan jumlah pelaku usaha Petani KJA dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Jumlah Pelaku Usaha Petani KJA di Desa Sibaganding dan Tigaras

No.	Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha Eks Petani KJA (orang)
1.	Tigaras	29
2.	Sibaganding	77
	Total	106

Sumber: Data Kusuka (Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Sumut, 2021)

Masing-masing Petani pelaku usaha budidaya KJA di kedua desa tersebut memiliki pekerja yang membantu aktivitas KJA namun jumlahnya tidak diperoleh dan diketahui secara pasti. Jumlah sampel penelitian ditentukan berdasarkan jumlah Petani pelaku usaha budidaya KJA yaitu 106 orang. Penentuan sampel penelitian menggunakan *Purposive Sampling* yaitu para Petani pelaku usaha budidaya KJA yang berdomisili di kedua desa lokasi penelitian.

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan:

1. Studi literature yaitu menelusuri beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian, diantaranya daftar potensi Kabupaten Simalungun khususnya desa lokasi penelitian dan daftar usaha Petani KJA terbaru.
2. Penyebaran Instrumen Penelitian yang berisikan kuisisioner dan wawancara tertulis untuk mengetahui informasi karakteristik petani dan kegiatan ekonomi.
3. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke desa lokasi penelitian terhadap kondisi dan potensi desa, serta usaha Petani KJA.
4. Interview personal dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, sehingga data yang didapat lebih mendalam pada objek yang diteliti. Interview personal dilakukan melalui FGD dan *face to face*. Hal-hal yang ditanyakan adalah: 1) potensi SDA dan SDM di Kabupaten Simalungun, khususnya di desa lokasi penelitian; 2) kebijakan Pemerintah setempat dalam rangka untuk mencari alternatif pekerjaan lain bagi eks Petani KJA; serta 3) permasalahan dalam upaya penyediaan lapangan pekerjaan bagi eks Petani KJA.
5. Kuesioner, yaitu pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tertulis. Indikator yang ditanyakan pada kuesioner disajikan pada Tabel 3.3 di bawah.

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang bersumber dari hasil kuesioner, wawancara/FGD, observasi, dan dokumen dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan melalui beberapa langkah-langkah analisis:

- a. Mendeskripsikan defenisi variable karakteristik yang ditentukan berdasarkan teori dan pemahaman literature dan studi kawasan penelitian.
- b. Melakukan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dokumen, dan observasi.
- c. Melakukan tabulasi dan analisa serta telaahan dalam kompilasi data terhadap bentukan kelompok tema karateristik yang ditentukan.
- d. Menarik kesimpulan atas jawaban perumusan masalah dan merumuskan rekomendasi atas kesimpulan yang ditarik.

Tabel 3.3. Indikator Kuesioner Penelitian

No	Konsep	Indikator Kuesioner
1.	Pemetaan Karakteristik masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan Pendidikan - Pemetaan pekerjaan utama - Pemetaan sampingan - Pemetaan pendapatan - Pemetaan Jangka waktu usaha - Pemetaan Keahlian - Status Kepemilikan
2	Pemetaan kegiatan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor Perikanan - Sektor Perdagangan - Sektor Pertanian dan Perkebunan - Sektor Jasa - Sektor Wisata
3	Pemetaan potensi alternative mata pencaharian baik secara umum dan khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor Perikanan Darat/Peternakan - Sektor Perdagangan - Sektor Pertanian dan Perkebunan - Sektor Jasa - Sektor Wisata
4	Kesiapan Petani KJA terhadap perubahan lapangan pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan Kesiapan Keahlian - Pemetaan Kesiapan Keterampilan dan Pendidikan - Pemetaan Kesiapan Kepemilikan Asset atau Modal

Sumber: Data Analisis (2021)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. PEMETAAN KARAKTERISTIK DAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI KJA

Pentingnya melakukan pemetaan karakteristik serta identifikasi kegiatan ekonomi suatu masyarakat adalah merupakan salah satu upaya untuk bisa menentukan arah persiapan rencana program dalam masyarakat. Perencanaan, merupakan fungsi pertama dari empat fungsi manajemen selain fungsi-fungsi manajemen lainnya yakni pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Lebih lanjut Kuncoro (2012:50) yang dikutip dari buku Hendra Wati Hamid (Hamid, 2016), mengemukakan bahwa kenyataan menunjukkan banyaknya kegagalan akibat dari perencanaan yang salah dan tidak tepat. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri, ataupun pada saat proses berlangsung. Banyaknya perencanaan pembangunan yang gagal, karena apa yang direncanakan tidak mempunyai pijakan yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Seringkali, program yang dilaksanakan tidak dapat memberdayakan masyarakat, tetapi justru menciptakan ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Artinya, banyak program pemerintah hanya memberikan ikan, bukan kailnya.

4.1.1. Karakteristik Masyarakat Petani KJA

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Menurut International Labour Organization (ILO) menegaskan kegiatan perikanan masuk dalam kategori sektor agrikultur. Sektor perikanan memiliki kondisi pekerjaan dan tingkat kesulitan lebih dimungkinkan dilakukan oleh laki-laki.

Dari data yang diperoleh dominasi berdasarkan jenis kelamin, tenaga kerja laki-laki cukup tinggi sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Petani KJA Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Sibaganding	52	4
2.	Tigaras	23	2
Total		75	6
Persentase (%)		92,59 %	7,41 %

Sumber: Data diolah tahun 2021

Komposisi pekerjaan Petani KJA didominasi laki-laki dengan melihat posisi keberadaan KJA yang berada hampir 100 meter dari pinggir danau dan di kedalaman lebih 10 meter, pekerjaan ini lebih layak dan pantas dilakukan oleh laki-laki. Tenaga kerja perempuan dalam kegiatan budidaya KJA lebih banyak bersifat sebagai pekerja pendukung terutama dalam membantu kegiatan ekonomi keluarga.

Disimpulkan bahwa dalam budidaya KJA, yang menjadi sumber penghasil utama dalam keluarga adalah laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

2. Berdasarkan Usia

Idealnya usia angkatan tenaga kerja yang produktif menurut Yoris Sebastian dari Realise Insider, kelompok usia produktif rata-rata berusia sekitar 15-35 tahun. Pendapat ini berbeda dengan kriteria BPS di mana batasan usia produktif berada pada kelompok berusia 15 hingga 64 tahun (Warsito, n.d.).

Menurut Sukirno (2006:195) yang dikutip dari Jurnal Ekonomi Bisnis Udayana, merumuskan tentang Teori Produksi, dipengaruhi pada sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan (Wulandari, 2020). Hal mana juga dibenarkan produktivitas secara sederhana dapat diartikan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas. Menurut Utami 2015, produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, tingkat pendidikan formal, pengalaman bekerja, upah, dan curahan tenaga kerja. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja antara lain tingkat pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan jenis kelamin (Ukkas, 2017).

Hasil data yang diperoleh terhadap batasan usia Petani KJA di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2. Jumlah Petani KJA Berdasarkan Usia

No.	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Kelompok Usia (Orang)				
		Remaja (12 – 25) tahun	Dewasa (26 – 45) tahun	Lansia (46 – 65) tahun	>65 tahun	Tidak menjawab (kosong)
1.	Sibaganding	0	15	21	2	18
2.	Tigaras	0	16	7	1	1
Total		0	31	28	3	19
Persentase (%)		0 %	38,27%	34,57%	3,70%	23,46%

Sumber: Data diolah tahun 2021

Batasan usia produktif Petani KJA di Desa Sibaganding dan Tigaras berada di Usia Dewasa dan Lansia dengan batasan usia 26-45 tahun dengan sebanyak 38,37% dan batasan usia 46-65 tahun sebanyak 34,57 %. Kondisi batasan usia dari Petani KJA menggambarkan bahwa batasan usia tersebut masih produktif terhadap pekerjaan yang digeluti di budidaya KJA.

Dua lokasi ini terhadap batasan usia memiliki perbedaan jumlah yang signifikan dalam usia produktif di mana pada Desa Sibaganding terdapat Lansia (46-65 tahun) mendominasi sebagai Petani KJA dan masih menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Data di atas jika dilakukan penertiban atau bahkan penutupan KJA dengan mengalihfungsikan untuk mendorong sektor lapangan pekerjaan di wilayah pariwisata maka antara Desa Sibaganding dan Desa Tiga Ras memiliki tantangan yang berbeda karena dari segi usia pasti memerlukan waktu proses adaptasi yang berbeda untuk menghasilkan konsep produktifitas di sektor pengembangan pariwisata.

3. Jumlah Petani KJA Berdasarkan Pendidikan

Konsep angkatan kerja merumuskan tingkat pendidikan yang rendah akan berkolerasi positif kepada keterampilan serta produktivitas. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar tenaga kerja Indonesia merupakan pekerja yang memiliki keterampilan yang rendah. Tingkat pendidikan sangat dibutuhkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebab dengan pendidikan dapat menciptakan pola pikir tenaga kerja sehingga mampu untuk bersaing dalam dunia kerja. Semakin tinggi pendidikan seorang pekerja maka pengetahuan dan

wawasannya pun semakin luas, dapat berpikir lebih terarah, sehingga pada akhirnya produktivitasnya juga cenderung semakin tinggi (Ukkas, 2017).

Hasil data yang diperoleh menggambarkan tingkat pendidikan Petani KJA sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3. Jumlah Petani KJA Berdasarkan Pendidikan

No	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)					
		SD	SMP	SMA/K	Diploma	Sarjana	Tidak Menjawab
1.	Sibaganding	7	5	29	3	4	8
2.	Tigaras	3	1	15	2	4	0
Total		10	6	44	5	8	8
Persentase (%)		12,35%	7,40%	54,32%	6,17%	9,88%	9.88%

Sumber: Data diolah tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa dominan Petani KJA adalah tamatan SMA/K yakni Desa Sibaganding sebanyak 29 orang, Desa Tiga Ras sebanyak 15 orang. Sedangkan yang memiliki keahlian khusus tamatan Diploma atau S1 sebanyak 26 orang.

4. Berdasarkan Pendapatan per Bulan

Pengertian pendapatan yang dikutip dari salah satu jurnal Ilmu Manajemen (Wahbi et al., 2020) yang dikemukakan Boediono (2002: 180), menjelaskan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Hal yang sama juga diungkapkan Winardi (2002:171), bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai daripada penggunaan faktor-faktor produksi. Adapun menurut Sugiri dan Riyono (2001: 88), merupakan tiap tambahan aktiva atau pengurangan kewajiban yang timbul karena usaha perusahaan, baik berupa penyerahan jasa-jasa maupun penjualan barang.

Terhadap Petani KJA yang telah berusaha tahunan memperoleh hasil pendapatan dari budidaya KJA dalam rata-rata pendapatan sebagaimana dalam tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4. Jumlah Petani KJA Berdasarkan Pendapatan Per Bulan

No.	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Pendapatan per Bulan (Orang)					
		< 1 jt	1-3 jt	>3-5 jt	>5-7 jt	>7-9 jt	>9 jt
1.	Sibaganding	12	22	18	4	0	0
2.	Tigaras	3	9	2	2	4	5
Total		15	31	20	6	4	5
Persentase (%)		18,52 %	38,27 %	24,69 %	7,41 %	4,94 %	6,17 %

Sumber: Data diolah tahun 2021

Pendapatan Petani KJA dengan pekerjaan utama KJA masih di bawah rata-rata dilihat dari persentase 1-3jt pendapatan per bulan sebesar 38,27% menunjukkan kegiatan ekonomi KJA sudah mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder responden. Persentase sebesar 24,69% responden dengan batasan pendapatan sekitar 3-5 juta membuat responden yakin bahwasannya kegiatan ekonomi budidaya KJA dapat menjamin kehidupan keluarga dengan lebih baik.

5. Berdasarkan Lama berusaha sebagai Petani KJA

Jumlah jam kerja yang digunakan dalam bekerja mempengaruhi pendapatan yang diperoleh tenaga kerja. Semakin tinggi waktu yang dicurahkan oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan, maka semakin tinggi pula kesempatan tenaga kerja untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

Dari sumber data lapangan dari hasil kuisioner diperoleh masing-masing lama bekerja atau berusaha dari Petani KJA dapat dilihat dalam tabel 4.5 di bawah:

Tabel 4.5. Jumlah Petani KJA Berdasarkan Lama Berusaha sebagai Petani KJA

No	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Lama berusaha sebagai Petani KJA (Orang)					
		≤ 1 tahun	> 1-2 tahun	> 2- 3 tahun	> 3-4 tahun	> 4 tahun	Tidak Menjawab
1.	Sibaganding	0	3	6	7	40	0
2.	Tigaras	0	0	0	1	22	2
Total		0	3	6	8	62	2
Persentase (%)		0 %	3,70%	7,41%	9,88%	76,54%	2,47%

Sumber: Data diolah tahun 2021

Hampir seluruh Petani KJA telah bekerja selama lebih dari 4 tahun bahkan terdapat lebih dari 70% responden melakukan kegiatan ekonomi ini lebih dari 10 tahun. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi KJA ini mendatangkan banyak manfaat secara finansial bagi responden.

Keterkaitan antara pengalaman, pendidikan serta usia para Petani KJA berkaitan dalam proses adaptasi jika nantinya mereka akan beralih usaha terhadap seberapa lama dia mampu bertahan atas usaha baru dalam mencukupi kebutuhan pokok.

4.1.2. Karakteristik Kegiatan Ekonomi Masyarakat Petani KJA

Budidaya KJA telah lama digeluti masyarakat di Kawasan Danau Toba dimana sebelumnya masyarakat ini sehari-hari adalah nelayan tangkap dan pertanian palawija. Budidaya KJA awalnya cukup menjanjikan bagi masyarakat Desa Tiga Ras dan dengan perlahan usaha pertanian palawija yang awalnya menjadi usaha utama berganti seiring perkembangan waktu. Terlebih kondisi topografi wilayah Kawasan Danau Toba yang terjal dan berbukit serta berbatu akhirnya usaha pertanian pun ditinggalkan karena dianggap tidak mampu memenuhi beban kebutuhan terhadap pendidikan dan kebutuhan pokok yang berkualitas. Budidaya KJA masyarakat semakin meningkat setelah pelaku swasta perusahaan melakukan budidaya KJA secara formil dalam skala besar sehingga masyarakat Tiga Ras tertarik dan beralih karena hasil keuntungan ekonomi yang cukup menjanjikan.

Hasil penelusuran pustaka dari salah satu penelitian yang ditulis oleh (Turnip, 2013) mengurai bahwa Desa Tigaras merupakan Desa Wisata Alam dan Wisata Sejarah, dimana tahun 1970 sebelum adanya nama Desa Tigaras dikenal dengan nama Desa Tapak Kuala. Desa ini masih sangat sepi terhadap kunjungan wisata dimana awalnya pengunjung datang dari Samosir, Tapanuli Utara dan Selatan. Pertumbuhan pemukiman pada desa ini berubah nama menjadi Tigaras, yang mengandung makna sentral perdagangan Simalungun hingga akhirnya Tigaras menjadi akses menuju Samosir yang banyak dilalui kapal-kapal karena keramaiannya.

Awal pengenalan budidaya KJA, dimana saat Suku Padang di Tahun 2000, mencoba melakukan usaha pembudidayaan Ikan Keramba, terdapat penolakan

masyarakat yang merasa terganggu karena pemudidayaan Ikan Keramba ini, karena cukup dekat dengan lokasi wisata dan akhirnya keramba perlahan mulai ditutup. Beda halnya dengan Desa Sibaganding sebagai hasil diskusi dengan Kepala Desa Sibaganding, desa ini yang berbatasan dengan Desa Girsang Sipangan Bolon, yang memiliki hutan lindung berupa Taman Nasional. Selain kemampuan mengakses terhadap hasil danau, sebahagian masyarakat juga banyak melakukan akses terhadap hasil hutan berupa kayu dan tanaman hutan lainnya. Karena pelarangan dan pembatasan pemanfaatan hasil hutan lindung, masyarakat Desa Sibaganding lebih mengutamakan jadi nelayan hingga akhirnya mengenal usaha budidaya KJA.

1. Pekerjaan Utama Petani KJA

Kegiatan sebagai nelayan cukup lama sebagai mata pencaharian utama digeluti secara turun temurun di Desa Sibaganding dan Tiga Ras. Sebagai Petani di danau dari sudut aspek sosial ekonomi pembudidayaan ikan dengan KJA telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat khususnya masyarakat lokal. Kegiatan ini telah mampu meningkatkan nilai produksi ikan sehingga mampu mendongkrak pendapatan masyarakat Petani KJA, serta mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Budidaya KJA berkembang pesat mulai pada tahun 1986, disamping kegiatan ekonomi masyarakat adalah sebagai petani dan nelayan di Kawasan Danau Toba. Namun sejak berkurangnya tangkapan Ikan Bilih akhirnya masyarakat fokus terhadap mata pencaharian budidaya KJA sebagai mata pencaharian utama.

Kegiatan ekonomi yang digeluti para Petani KJA sebagaimana Tabel 4.6 di bawah menggambarkan Pekerjaan Utama yang dimiliki para Petani KJA yakni:

Tabel 4.6. Jumlah Petani Berdasarkan Pekerjaan Utama Sebagai Petani KJA

No.	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Pekerjaan Utama (Orang)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tidak Menjawab
1.	Sibaganding	1	0	1	1	0	0	48	3	0	2
2.	Tigaras	0	1	1	2	0	0	18	1	1	1
Total		1	1	2	3	0	0	66	4	1	3
Persentase (%)		1,23 %	1,23 %	2,47 %	3,70 %	0 %	0 %	81,48 %	4,94 %	1,23 %	3,70 %

Keterangan:		
1. PNS/ TNI/POLRI	5. Pelajar/Mahasiswa	9. Lainnya
2. Pegawai Swasta	6. Petani	
3. Wiraswasta/Usahawan	7. Petani KJA	
4. Buruh/Pekerja	8. Nelayan ikan tangkap	

Sumber: Data diolah tahun 2021

Data di atas menunjukkan bertani KJA adalah merupakan pekerjaan utama dari para responden di Desa Sibaganding dan Tiga Ras. Dapat dilihat bahwa 81,48 % merupakan Petani KJA yang artinya satu-satunya sumber mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarga.

2. Pekerjaan Sampingan Petani KJA.

Selain pekerjaan utama sebagai Petani KJA, terdapat pekerjaan sampingan bersifat sementara saja, yang tergantung pada keahlian yang dimiliki. Sebagaimana yang tergambar dalam hasil data dari pekerjaan sampingan yang dimiliki Petani KJA tergambar dalam tabel 4.7 di bawah.

Tabel 4.7. Gambaran Pekerjaan Sampingan Petani KJA

No	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Pekerjaan Sampingan (Orang)				
		Supir	Berdagang	Petani	Lain	Tidak Menjawab
1.	Sibaganding	1	2	19	10	24
2.	Tigaras	2	3	7	0	13
Total		3	5	26	10	37
Persentase (%)		3,70 %	6,17%	32,10%	12,35%	45,68%

Sumber: Data diolah tahun 2021

Dari data di atas, pekerjaan sampingan yang dilakukan responden adalah tidak banyak. Kegiatan ekonomi KJA adalah satu-satunya pekerjaan utama yang responden lakukan walaupun terdapat 32,10% responden yang bertani, 12,35% sebagai nelayan, dan pekerjaan serabutan lainnya.

Usaha KJA merupakan satu pekerjaan utama dan bertani merupakan pekerjaan sampingan ini dilakukan karena keterpaksaan sebagai usaha bantuan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Usaha sampingan dilakukan Petani KJA hampir 32,10% yakni bertani, tapi pekerjaan ini bukanlah menjadikan untuk

perpindahan usaha mereka ke usaha bertani. Tetapi karena jenis usaha itulah yang paling potensial yang mereka miliki dan bisa dilakukan para Petani KJA tersebut.

3.Keahlian/keterampilan yang dimiliki Petani KJA

Terhadap ketrampilan lain yang dimiliki Petani KJA selain yang dimiliki dari kegiatan budidaya KJA dari lapangan diperoleh data hal keterampilan yang dimiliki masing-masing para Petani KJA yakni:

Tabel 4.8. Keahlian/Keterampilan yang dimiliki Petani KJA

No	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Keahlian/Keterampilan (Orang)					
		Bertani	Bertukar g	Supir	Pembenihan	Nelayan	Tidak punya keahlian
1.	Sibaganding	0	0	1	0	3	52
2.	Tigaras	2	1	1	1	0	20
Total		2	1	2	1	3	72
Persentase (%)		2,47 %	1,23%	2,47%	1,23 %	3,70 %	88,89 %

Sumber: Data diolah tahun 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa 88,89% responden tidak mempunyai keahlian/keterampilan (*unskilled*). Di sini responden hanya berharap KJA sebagai sumber kebutuhan hidup mereka.

4. Status Kepemilikan KJA

Catatan penting dalam penelitian ini adalah mengukur tingkat kemampuan dan asset yang dimiliki oleh para Petani KJA terhadap status kepemilikannya. Status kepemilikan KJA ini menjadi hal yang penting sebagaimana di awal berdirinya tentunya harus memiliki kemampuan finansial untuk membangun usaha. Artinya petani harus memiliki modal untuk bisa sampai kepada usaha tersebut.

Hasil survey penyebaran kuisioner diperoleh data yang dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9. Jumlah Petani KJA Berdasarkan Status Kepemilikan KJA

No.	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Status Kepemilikan KJA (Orang)				
		Milik Sendiri	Sewa	Kerjasama	Buruh/Pekerja	Lain
1.	Sibaganding	53	1	2	0	0
2.	Tigaras	25	0	0	0	0
Total		78	1	2	0	0
Persentase (%)		96,30 %	1,23 %	2,47%	0 %	0 %

Sumber: Data diolah tahun 2021

Sebanyak 96,30% status unit KJA adalah milik responden sendiri. Hal ini diperoleh berdasarkan data lapangan yang diberikan dan membuktikan bahwasannya kegiatan KJA ini membawa manfaat finansial yang signifikan bagi mereka sendiri. Kepemilikan KJA dari para Petani KJA masih merupakan kegiatan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari saja dalam arti usaha perikanan skala kecil.

Terdapat keluhan atas skala kegiatan yang dipermasalahkan para Petani KJA, bahwa keberlangsungan para pengusaha KJA skala besar oleh perusahaan KJA dan memiliki izin beroperasi untuk pasar perdagangan ekspor ke luar negeri. Jika seandainya usaha yang dikelola para Petani KJA harus ditertibkan dan ditutup serta merta para perusahaan yang mengelola KJA juga harus sama diberlakukan hal yang sama.

4.2. PEMETAAN POTENSI ALTERNATIF LAPANGAN KERJA SECARA UMUM DAN KHUSUS PETANI KJA

4.2.1 Potensi Alternatif Lapangan Kerja Secara Umum

Topografi Kawasan Danau Toba didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, dengan kelerengan lapangan terdiri dari datar dengan kemiringan (0 – 8%), landai (8–15%), agak curam (15–25%), curam (25–45%), sangat curam sampai dengan terjal (> 45%). Daerah datar meliputi lebih kurang 27% dari total kawasan, daerah landai 31%, daerah agak curam 24%, daerah curam 16% dan daerah yang sangat curam sampai terjal lebih kurang 2% dari total DTA. Jenis tanah pada bagian Timur DTA Kawasan Danau Toba merupakan jenis kompleks litosol dan regosol yang sangat peka terhadap erosi, pada bagian Tenggara jenis podsilik coklat (peka erosi), sedangkan di Pulau Samosir jenis tanahnya sebagian besar merupakan jenis tanah *brown forest* (agak peka erosi) (Kehutanan, 2015).

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu wilayah yang mengitari Kawasan Danau Toba, sebagai wilayah yang punya sejuta potensi alam destinasi Pariwisata. Kabupaten Simalungun memiliki jumlah objek wisata mencapai 73 titik lokasi objek wisata, yang terdiri atas 39 lokasi wisata alam, 15 lokasi wisata agro, 8 lokasi wisata budaya, dan selebihnya adalah lokasi wisata rekreasi lainnya.

Gambaran beberapa alternative lapangan kerja secara umum digambarkan dalam tabel 4.10, sebagaimana dapat difungsikan di tiap-tiap wilayah penelitian sebagaimana hasil masukan dalam seminar hasil. Seminar hasil merupakan bagian tahapan dalam penyempurnaan data hingga terumuskan beberapa alteratif usaha yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba yakni:

Tabel 4.10. Alternatif Pekerjaan Dalam Pengembangan Usaha di Kawasan Pariwisata Bagi Petani KJA

Uraian	Konservasi/ Pelestarian	Pemberdayaan ekonomi lokal
Geodiversity	Batu-batuan alam bentukan letusan gunung purba Toba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemandu ke objek 2. Jasa transportasi (boat, mobil) 3. Restoran dan berjualan makanan 4. Homestay 5. Tracking ekowisata 6. Berdagang kerajinan/souvenir shop 7. Wisata bersampan, memancing di danau, bersepeda keliling kampung. 8. Wisata religi dan sejarah
Biodiversity	<p>Tanaman/hewan endemic/khas/dilindungi</p> <p>Tanaman/hewan yang dibudidayakan masyarakat setempat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemandu ke objek 2. Jasa transportasi (boat, mobil) 3. Restoran dan berjualan makanan/minuman/buah-buahan/hasil hutan 4. Homestay dan pengalaman bertani 5. Tracking ekowisata 6. Berdagang kerajinan/souvenir shop 7. Wisata bersampan, memancing di danau, bersepeda keliling kampung, wisata agro. 8. Budidaya pertanian, peternakan, perhutanan, perikanan darat, tanaman hias dan pembibitan.

Culture diversity	Tarian Nyanyian Alat music Makanan Minuman Kerajinan Adat istiadat Obat tradisional Bahasa Aksara	1. Pemandu ke objek 2. Jasa transportasi (boat, mobil, sepeda) 3. Restoran dan berjualan makanan dan minuman khas 4. Homestay dan mengenal budaya (satu per satu) 5. Tracking ekowisata 6. Berdagang kerajinan/souvenir shop 7. Wisata bersampan, memancing di danau 8. Kelas belajar budaya (satu per satu) termasuk belajar bahasa dan aksara.
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data Penelitian diolah tahun 2021

Kecamatan Girsang Sipangan Bolon merupakan kecamatan yang memiliki objek wisata terbanyak. Dua dari 39 lokasi wisata yang dikemukakan, mengambil 2 (dua) Desa yang ada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Kecamatan Dolok Pardamean yakni Desa Tiga Ras dan Desa Sibaganding. Sebagaimana hasil survey yang dilakukan tergambar kondisi dua wilayah yang dimiliki desa yakni:

a. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (Desa Sibaganding)

1. Potensi pertanian di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon secara Umum

Kecamatan Girsang Sipangan Bolon berada di pinggiran Kawasan Danau Toba, berada pada posisi 0,2°69'LU dan 98°92'BT dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara : Kecamatan Dolok Pangaribuan, Sebelah Barat : Kabupaten Samosir, Sebelah Selatan : Kabupaten Toba Samosir, Sebelah Timur : Kecamatan Hatonduhan. Luas Kecamatan Girsang Sipangan Bolon adalah 120,38 km², di mana terdapat 3 kelurahan dan 2 Nagori. Nagori Sibaganding yang berada di Kecamatan ini merupakan Nagori terluas.

Keadaan wilayah di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon adalah datar, bergelombang dan terjal dengan kemiringan tanah dataran 2,46 km² miring 0-2, bergelombang 67,65 km² miring 0-40, berbukit terjal 50,27 km² miring 40. Permukaan tanah datar dan bergelombang dijumpai di Kelurahan Tigaraja, Parapat, dan Girsang. Sedangkan bergelombang dan terjal dijumpai di Nagori Sipangan Bolon, Nagori Sibaganding dan Kelurahan Parapat (Rismawati, 2008).

Meskipun posisi dengan segala keadaan dan kondisi wilayah kecamatan ini, dari profile yang dirangkum dari survey langsung dan kajian beberapa pustaka disimpulkan beberapa potensi yang dimiliki kecamatan ini selain potensi alam wisata juga tersimpan kekayaan pertanian yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang usaha bagi masyarakat sekitar yakni:

1. Produksi alam pertanian yang dimiliki kecamatan yang telah dirangkum.
2. Produksi tanaman jenis hortikultura.
3. Produksi tanaman buah-buahan.
4. Produksi jenis tanaman perkebunan rakyat.

Sebagaimana dalam gambaran besaran dan luasan hasil produksi potensi alam digambarkan sebagaimana masing-masing dalam tabel 4.11 di bawah.

Tabel 4.11. Luas panen, produksi dan rata-rata produksi tanaman padi palawija menurut Jenis Tanaman

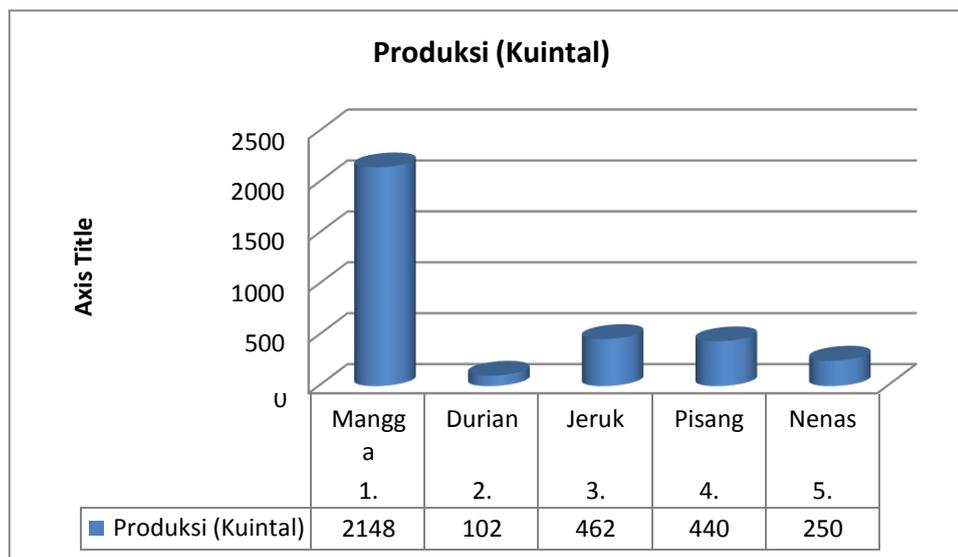
No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
1	Padi Sawah	763,4	4451	58,30
2	Padi Ladang	-	-	-
3	Jagung	199	1099	55,23
4	Ubi Kayu	6	173	-
5	Ubi Jalar	-	-	-
6	Kacang Tanah	13	14	10,77
7	Kacang Hijau	-	-	-

Sumber: Kabupaten Simalungun dalam Angka 2021

Tabel 4.12. Luas panen, produksi dan rata-rata produksi tanaman hortikultura menurut jenis tanaman

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi Ton
1	Kacang Merah	9	11
2	Kangkung	-	-
3	Kacang Panjang	4	100
4	Bawang Merah	4	600
5	Terong	2	53
6	Tomat	36	96,38
7	Cabe Besar	76	1430
8	Cabe Rawit	37	700
9	Kentang	41	1011

Sumber: Kabupaten Simalungun dalam Angka 2021



Sumber: Kabupaten Simalungun dalam Angka 2021

Gambar 4.1. Produksi Tanaman Buah-buahan Menurut Jenis

Tabel 4.13. Luas tanaman dan produksi menurut jenis tanaman perkebunan rakyat

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)
		TBM	TM	TTM	Jumlah	
1.	Kopi Robusta	-	115,25	14,57	129,82	56,85
2.	Kopi Arabika	114,3	476,11	91,93	682,32	402,5
3.	Kelapa	11	-	-	11	-
4.	Coklat	-	5,5	5	10,5	-
5.	Cengkeh	20,5	21,54	-	42,04	4,04
6.	Kulit Manis	-	15	3	18	3,65
7.	Kemiri	5,2	2	-	7,2	3,97
8.	Aren	24,47	21	-	45,47	27
9.	Pinang	8,25	-	-	8,25	2,78
10.	Vanili	18,5	7	-	25,5	-

Sumber: Kabupaten Simalungun dalam Angka 2021

Keterangan:

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM: Tanaman Menghasilkan

TTM : Tanaman Tidak Menghasilkan

Berdasarkan data di atas, maka potensi pertanian di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon meskipun dalam kondisi alam yang terjal masih cukup mampu mendatangkan sumber alam bagi kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga dimungkinkan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif lapangan kerja bagi petani eks KJA.

2. Potensi Perekonomian (Perdagangan) di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

Terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada di daerah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, terangkum dalam tabel 4.14 di bawah dimana jumlah kelompok-kelompok pertokoan, mini-market, restoran, dan toko kelontong menurut nagori/kelurahan tergambar di bawah yakni:

Tabel. 4.14. Potensi usaha dagang di Girsang Sipangan Bolon

No.	Nagori/ Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Minimarket/ Swalayan	Restoran/ Rumah Makan	Toko Kelontong
1.	Sipangan Bolon	-	-	-	13
2.	Girsang	-	-	1	16
3.	Parapat	2	4	25	115
4.	Tigaraja	1	3	2	55
5.	Sibaganding	-	-	40	30
6.	Sipangan Bolon Mekar	-	-	-	26
	Jumlah	3	7	68	255

Sumber: Kabupaten Simalungun dalam Angka 2021

3. Potensi pariwisata di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

Untuk lokasi-lokasi wisata yang cukup dikenal berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, yang dimungkinkan mampu dijadikan sebagai kekhususan wilayah banyak terdapat di Nagori Sibaganding sebagai wilayah penelitian. Desa Sibaganding merupakan desa yang memiliki KJA terbesar di wilayah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, dan juga memiliki keunikan alam wilayah sebagai ciri khas terhadap lokasi-lokasi wisata. Sebagaimana tercatat dalam potensi alam Badan Statistik yakni potensi alam wisata yang ada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yakni :

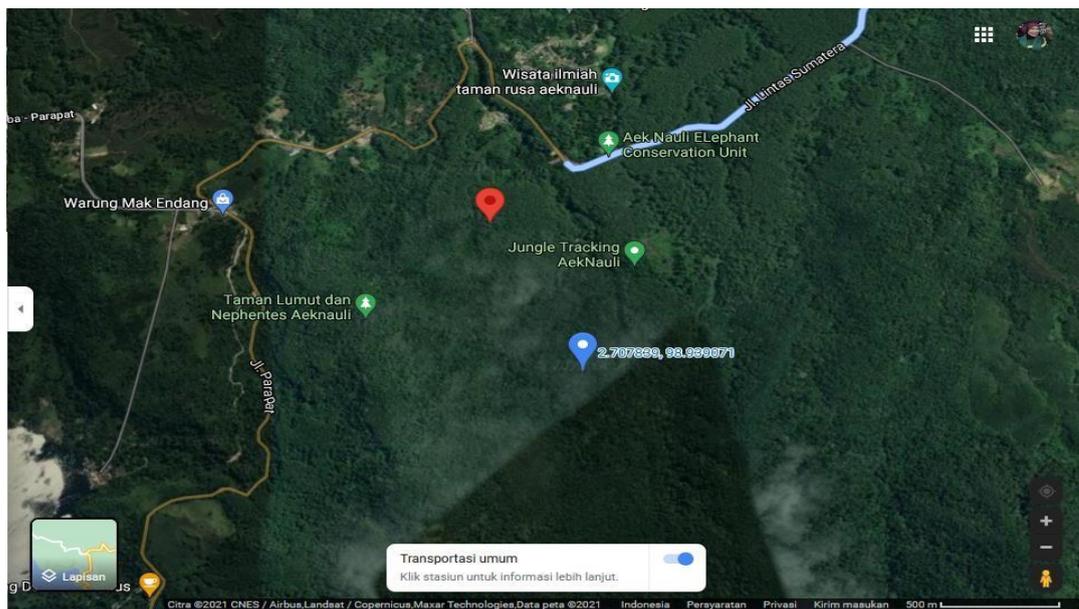
Tabel.4.15. Potensi Lokasi Wisata Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

No.	Nagori/Kelurahan	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata
1.	Sipangan Bolon	Dolok Si Sae-sae	Wisata Alam
2.	Girsang	Liang Majont k	Wisata Alam
		Liang Bolon	Wisata Alam
		Mual Bolon	Wisata Alam

		Air Terjun Halimbingan	Wisata Alam
3.	Parapat	Kawasan Danau Toba	Wisata alam
4.	Tigaraja	Kawasan Danau Toba	Wisata alam
5.	Sibaganding	Batu Gantung	Wisata alam
		Huta Sibatu Loting	Wisata alam
		Parherekan	
		Batu Lubang	Wisata alam
		Batu Gorgo	Wisata Alam
		Konservasi Gajah	Wisata Camp Ground

Sumber: Kabupaten Simalungun dalam Angka 2021

Potensi alam wisata Desa Sibaganding, jika dikaitkan dengan lokasi Peta sangat bersesuaian, tentang wilayah alam Desa Sibaganding yang berada di pinggiran Kawasan Danau Toba yang melingkupi Hutan Lindung, yang memang cukup menjadikan wilayah yang punya pengkhususan sebagai ikon wisata alam dengan pesona edukasi alam, sebagaimana tergambar dalam gambar peta 4.2 di bawah.



Sumber: <https://www.google.com/maps/search/peta+alam+sibaganding/@2.678999,98.8987758,12z/data=!3m1!4b1>

Gambar. 4.2. Peta Kawasan Desa Sibaganding dan Desa Aek Nauli

Kekhususan alam yang dimiliki Desa Sibaganding, menjadi satu ikon yang jika dikembangkan sebagai destinasi andalan untuk wilayah Kecamatan Desa Girsang Sipangan Bolon bisa menjadi alternatif sebagai konversi lahan pengalihan lahan KJA.

b. Kecamatan Dolok Pardamean (Desa Tiga Ras)

1. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Kecamatan Dolok Pardamean merupakan salah satu dari 31 kecamatan di Kabupaten Simalungun yang berada di pinggiran Kawasan Danau Toba. Kecamatan ini memiliki objek wisata yang menarik seperti Pantai Paris dan Bukit Indah Simarjarunjung.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean berprofesi sebagai petani. Adapun hasil dari ladang yang diandalkan masyarakat adalah kopi dan bawang, di Desa Tigaras juga terkenal dengan buah mangganya, yaitu mangga tigaras, mangga ini mempunyai buah yang manis dengan ukuran yang kecil. Tidak jarang orang sengaja berlibur ke Desa Tigaras hanya untuk mengambil buah mangga ini sekaligus bermain di pantai khususnya Pantai Paris.

Luas wilayah Kecamatan Dolok Pardamean adalah 103,04 km² dan terletak 1.100 di atas permukaan laut. Adapun batas wilayah dari Kecamatan Dolok Pardamean adalah Sebelah Utara Kecamatan Raya, Sebelah Selatan Kecamatan Sidamanik, Sebelah Barat Kecamatan Purba, Sebelah Timur Kecamatan Panei.

Dalam catatan data BPS beberapa sumber kekayaan alam yang mampu diandalkan dari usaha-usaha pertanian di Kecamatan Dolok Pardamean sebagaimana dalam tabel 4.16 tercatat :

Tabel 4.16. Produksi Rata-rata Tanaman Palawija Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Dolok Pardamean

No	Jenis Tanaman	Luas Panen HA	Produksi Ton	Rata-rata Produksi Kw/Ha
1	Padi	-	-	-
2	Padi Ladang	963	4.343	45.10
3	Jagung	419	2.459	58.69
4	Ubi Kayu	15	431	-
5	Ub Jalar	3	51	170.00

6	Kacang Tanah	24	29	12.08
7	Kacang Hijau	-	-	-
8	Kedelai	7	4	5.71

Sumber: Kabupaten Simalungun dalam Angka 2021

Artinya jika merujuk tabel 4.16 di atas hasil alam dari produksi yang dihasilkan bisa dijadikan sumber alternatif dalam pencarian solusi pengalihan untuk para Petani KJA di Tiga Ras. Selain hasil tanaman kebun berupa palawija, Kecamatan Dolok Pardamean juga memiliki potensi perkebunan rakyat sebagaimana tergambar dalam tabel 4.17 yakni:

Tabel 4.17. Potensi Perkebunan Rakyat Kecamatan Dolok Pardamean

No	Jenis Tanaman	Luas Areal (HA)				Produksi Ton
		TBM	TM	TTM	Jumlah	
1	Karet	-	-	-	-	-
2	Kelapa Sawit	-	1.00	1.80	2.80	1.80
3	Kopi Robusta	-	275.25	12.70	287.95	146.30
4	Kopi Arabika	126.20	876.41	125.33	-	740.90
5	Coklat	-	-	-	-	-
6	Cengkeh	29.25	50.10	27.00	106.35	9.36
7	Kulit Manis	-	11.00	10.00	21.00	2.77
8	Kemiri	2.00	14.00	-	16.00	27.80
9	Lada	-	2.00	-	2.00	1.25
10	Aren	2.50	12.00	-	14.50	15.30
11	Pinang	-	9.72	-	9.72	15.05
12	Kelapa	10.00	2.50	-	12.50	2.44
13	Vanili	5.7-	-	-	5.70	-
14	Tembakau	-	110.00	-	110.00	109.84

Sumber: Kabupaten Simalungun dalam Angka 2021

Keterangan : TBM : Tanaman Belum Menghasilkan
 TM : Tanaman Menghasilkan
 TTM : Tanaman Tidak Menghasilkan

Artinya potensi perkebunan ini juga bisa dijadikan satu bentuk alternatif usaha dalam mengalihkan usaha KJA jika ditertibkan. Sebagaimana tergambar

dalam tabel tanaman-tanaman perkebunan misal jenis kopi juga memiliki potensi yang cukup menjual di wilayah-wilayah pariwisata.

2. Potensi Penginapan Desa Tiga Ras

Di samping itu, potensi peluang usaha penginapan sebagaimana tergambar dalam data BPS Desa Tiga Ras sebagai wilayah wisata memiliki potensi yang cukup menjanjikan sebagaimana dalam tabel 4.18 di bawah tergambar peluang usaha penginapan Desa Tiga Ras memiliki usaha penginapan terbesar. Tergambar dalam tabel 4.18 di bawah.

Tabel 4.18. Potensi Peluang Usaha Penginapan Alternatif Pegalihan KJA

No	Nagori	Hostel/Losmen/Wisma	Rumah Makan
1	Tiga Ras	11	4
2	Parik Sabungan	3	1
2	Sibuntuon	-	-
4	Dolok Saribu	-	-
5	Buttu Bayu Pane Rj	-	-
6	Togu Domu Nauli	-	-
7	Silabah Jaya	-	-
8	Sirube rube	-	-
9	Nagori Bayu	-	-
10	Sihemun Baru	-	-
11	Tanjung Saribu	-	-

Sumber: data Primer (2021)

Artinya potensi peluang usaha penginapan dari data bisa menjadi usaha yang sangat potensial bagi wisatawan yang berkunjung untuk menginap. Khususnya pada waktu libur besar dan libur panjang.

3. Potensi Warung Makan dan Kuliner

Usaha kebutuhan pokok misalnya makanan dan minuman, tentunya usaha yang cukup penting menjadi peluang yang tepat di kawasan wisata. Karena tidak semua pengunjung atau bahkan orang sekitar untuk mengadakan kebutuhan sehari-hari keluar desa. Tentunya usaha ini potensi yang cukup besar dalam menyediakan peralatan kebutuhan pengunjung atau bahkan kebutuhan makan dan minum yang bisanya di penginapan akan cukup mahal.

Sebagaimana peluang usaha yang bisa dijadikan sebagai alternatif tergambar dalam tabel 4.19 di bawah.

Tabel 4.19. Peluang Pasar, Warung Kelontong, Kedai Makanan dan Minuman Masing-masing Nagori (Desa)/ Kelurahan Di Kecamatan Dolok Pardamean Sebagai Alternatif Usaha

No	Nagori	Pasar	Warung Kelontong	Kedai Makan dan Minuman
1	Tiga Ras	-	20	33
2	Parik Sabungan	-	10	39
3	Sibuntuon	1	12	14
4	Dolok Saribu	-	1	6
5	Buttu Bayu Pane Rj	-	9	10
6	Togu Domu Nauli	-	3	5
7	Silabah Jaya	-	18	8
8	Sirube rube	-	5	10
9	Nagori Bayu	-	5	5
10	Sihemun Baru	-	6	4
11	Tanjung Saribu	-	13	7

Sumber: Kabupaten Simalungun dalam Angka 2021

4.2.2 Potensi Alternatif Lapangan Kerja Secara Khusus

A. Potensi Alternatif Pengalihan KJA Hasil Pantauan Desa Sibaganding

Nagori Sibaganding terdapat di Hutan Lindung Sibatu Loting yang di dalamnya banyak dihuni oleh habitat monyet-monyet liar. Nagori Sibaganding sebagaimana yang telah dijelaskan berada pada di ketinggian lereng pinggirir Kawasan Danau Toba. Dalam diskusi bersama dan wawancara dengan Kepala Nagori Sibaganding dan masyarakat Petani KJA intinya mereka keberatan terhadap kebijakan pemerintah untuk melakukan penutupan KJA.

Budidaya KJA adalah merupakan satu sumber utama penghasilan mereka, karena untuk melakukan diversifikasi lahan dengan kondisi lereng yang terjal dan berbatuan sangat tidak memungkinkan mereka untuk beralih usaha. Di samping kendala alam yang berbatuan dan terjal, posisi Desa Sibaganding hanya sebagai tempat transit dari para pengunjung yang hendak menuju ke Parapat. Satu-satunya sumber alam yang bisa dimanfaatkan adalah Kawasan Danau Toba dengan kondisi air danau dijadikan sebagai sumber mata pencaharian melalui usaha KJA.

Kepala Nagori Sibaganding menjelaskan bahwa, konsep budidaya KJA yang dimiliki oleh masyarakat masih bisa ditolerir karena hasil tangkapan mereka selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga untuk diperjualbelikan di wilayah Desa Sibaganding. Karena untuk kebutuhan pasokan ikan di wilayah desa saja bisa dikatakan belum mampu terpenuhi, apalagi jika budidaya KJA nantinya ditutup.

Jika usaha KJA Desa Sibaganding ditutup, serta merta untuk pemenuhan ikan untuk Desa Sibaganding harus dihadirkan dari wilayah lain, sedangkan kebutuhan ikan sebagai makanan pokok sumber ketahanan pangan masyarakat harus dicukupkan sebesar 10.000 Ton/tahun. Diakui Sibaganding merupakan Desa terbanyak yang berusaha KJA dari 3 desa lainnya.



Sumber: Dokumentasi tahun 2021

Gambar 4.3. Kondisi KJA dari Kantor Nagori di ketinggian lereng

Satu pemikiran dari kepala nagori sebagai pemangku kebijakan dalam tatanan Desa Sibaganding, bahwa budidaya KJA tidak perlu ditutup tetapi dikurangi dan ditata lebih baik karena menyangkut masalah kebutuhan pokok sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Namun KJA tetap dipertahankan dengan revitalisasi peruntukan sebagai tempat wisata edukasi dan restoran kuliner sebagaimana konsep penertiban KJA di Waduk Jati Luhur, KJA yang dimaksud ditata ulang kembali dengan memfungsikan KJA sebagai wadah sarana pariwisata dengan restoran

kuliner yang menyajikan menu-menu ikan. Sambil lalu pengunjung juga disajikan wisata dengan memberikan ikan makan sebagai bagian edukasi wisata.

Di sisi lain lagi jika memang KJA menjadi target untuk ditertibkan, sebagai Kepala Nagori yang memiliki tingkat kepatuhan terhadap dampak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, Desa/Nagori Sibaganding telah berupaya mencari solusi tawaran untuk mengantisipasi dengan membuka ruang kerjasama dengan mitra lain CRS dengan membangun Taman Bunga yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif lapangan kerja bagi eks Petani KJA.

Kaum ibu yang tergabung dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nagori Sibaganding, berupaya menyulap kawasan lahan tidur dan daerah tandus jadi obyek wisata selfie dengan beragam warna tanaman bunga segar, sekaligus menjadi sayap pariwisata Kota Parapat, di kawasan Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.



Sumber: Dokumentasi tahun 2021

Gambar 4.4. Lokasi Wisata Desa Sibaganding Alternatif Usaha Baru

Ide obyek wisata selfie ini didukung penuh oleh Pangulu Nagori Sibaganding Martono Wandu Bakkara, bekerjasama dengan masyarakat dan PKK Desa, dibantu perangkatnya dan stakeholder yang ada, kendati di tempat lain sudah banyak lokasi wisata selfie, menurut Martono, pasti jauh beda dengan yang dia sajikan dari berbagai lokasi puncak Sibaganding.

Taman wisata selfie ini adalah bagian dari binaan Caritas Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) KAM. Tempat Wisata Selfie Sibaganding dengan hamparan

Kawasan Danau Toba dekat Hotel Patrajasa Parapat ini, sudah mulai dikunjungi oleh wisatawan, dan saat ini masih memikirkan tindak lanjut perluasan areal taman bunga yang dirangkai dengan tanaman jenis apotik hidup lainnya.

Pihak Nagori akan coba bekerjasama dengan berbagai pihak tentu dengan perusahaan yang ada di Daerah melalui jasa CSR/CD Perusahaan yang bisa digelontorkan guna mendukung taman wisata selfie. Direncanakan juga untuk membuat tempat istirahat dan bangku untuk tempat duduk, supaya wisatawan dapat menikmati liburannya, sambil berselfie ria dan duduk santai menikmati pemandangan Kawasan Danau Toba tembus ke Pulau Samosir, dari puncak Nagori Sibaganding.

Taman bunga ini tentunya dapat mempekerjakan/menyerap tenaga kerja, yang tentunya dapat mengurangi pengangguran bagi masyarakat eks Petani KJA bila nantinya budidaya KJA sudah dihapuskan.



Sumber: Dokumentasi tahun 2021

Gambar 4.5. Taman Wisata Selfie dan Kebun Bunga Usaha Desa Sebagai alternatif usaha

Hasil survey dan pantauan sekaligus dikaitkan dengan khas dan keunikan desa, konsep usaha wisata yang pantas dan layak di wilayah Desa Sibaganding sebagaimana keterkaitan kesempatan kerja yang telah dimiliki oleh Petani KJA dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut :

Tabel 4.20. Peluang Alternatif Usaha Desa Sibaganding Dalam Konsep Lapangan Kerja Wisata

No	Sektor Usaha	Kesempatan Kerja	Potensi Alam/Peluang Skill
1	Pertanian	Wisata Alam	Huta Sibatu Loting Parherekan
		Hutan Wisata	Batu Lubang
		Hutan Wisata	Batu Gorgo
		Hutan Wisata	Konservasi Gajah
		Lahan Tidur	Eco Farming
		Lahan Tidur	Budidaya Kopi
2	Perdagangan	Transit Wisatawan	Warung Makan/Kuliner
		Penataan KJA dan Pemukiman Masyarakat	Restoran Siap Saji konsep penataan KJA
		Penataan KJA dan Pemukiman Masyarakat	Budidaya Ikan
4	Atraksi	Alam di Lingkungan Masyarakat	Atraksi Out Bound
5	Jasa	Konsep Wisata Alam yang ada	Pemandu Wisata
			Transportasi
			Juru Parkir

Sumber: Kabupaten Simalungun dalam Angka 2021

B. Potensi Alternatif Pengalihan KJA Hasil Wawancara dan Pantauan Desa Tiga Ras

Kecamatan Dolok Pardamean, terdapat 2 Nagori yang memiliki pengelolaan KJA di masyarakat, yakni Nagori Tigaras sebanyak 30 pemilik KJA dan Nagori Togu Domu Nauli sebanyak 1 pemilik KJA. Lokasi KJA tersebut terpusat di satu lokasi, yakni di daerah sekitar Pelabuhan Ferry.

Secara geografis, lahan yang ada di Kecamatan ini memiliki topografi yang terjal dan berbatu, sehingga cukup sulit untuk mengembangkan pertanian maupun lapangan kerja lainnya yang pastinya harus memerlukan lahan yang luas dan datar. Peruntukkan lahan pertanian, lebih memungkinkan lahan non sawah dan sedikit untuk lahan non pertanian.

Produksi tanaman palawija pada umumnya terdiri dari padi ladang dan jagung, juga sedikit ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Selain itu juga terdapat perkebunan rakyat yang mem-produksi dengan urutan banyak produksi yakni: Kopi Arabica, Kopi Robusta, Tembakau, Kemiri, Aren, Pinang, Cengkeh, Kulit Manis, Kelapa, Kelapa sawit, dan Lada.

Wilayah yang memiliki potensi wisata di Tiga Ras ada di Nagori Tigaras antara lain Batu Hoda, Garoga, Pantai Paris, dan Pantai Ardana sebagai andalan adalah wisata alam yang cukup menarik dan Nagori Parik Sabungan dengan konsep Bukit Indah Simarjarunjung. Jarak tempuh Bukit Indah Simarjarunjung dengan Tiga Ras hanya 15 menit saja, sehingga cukup potensial kawasan Tiga Ras menjadi alternatif tempat menginap dan Bukti Siarjarunjung sebagai wilayah memandang dari ketinggian dan konsep selfie dengan hamparan Kawasan Danau Toba.

Menurut pemerintah setempat, potensi yang mungkin bisa dikembangkan sebagai alternatif mata pencaharian bagi Petani KJA adalah pada sektor wisata baik itu pengembangan objek wisata, juga sektor lain yang mendukung parawisata seperti UMKM. Saat ditanyakan apakah Tiga Ras memiliki pasar sebagai sarana jual beli bagi masyarakat sekitar dan pengunjung, Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan belum, padahal sejarah terbentuknya nama Desa bermula adanya pekan yang diciptakan masyarakat.

Sebagaimana Turnip (2013) menyatakan bahwa kata tigaras yakni tiga artinya pekan (tempat berbelanja) dan ras artinya banyak batu-batu kerikil. Desa Tigaras asal usul namanya terbentuk dari dua lokasi dan tiga tempat berbelanja dan ras, pertemuan masyarakat setempat yang dari daerah ras ke daerah tiga, akhirnya karena sering bertemu dan berkumpul dibuatlah kesepakatan nama desa itu menjadi Desa Tigaras. Desa Tigaras ini dulunya terbagi atas 5 bagian yaitu Tigaras, Parbalokan yang masuk ke kecamatan Sidamanik, Labuhan Tigaras, Titi perbatasan-Titi Marandor, dan Sonom Salbe, tetapi setelah mengalami pemekaran akhirnya desa Sonom Salbe tidak lagi bagian dari Desa Tigaras karena sudah mengalami pemekaran.

Diskusi yang dilakukan di kantor Nagori Tigaras, menyatakan bahwa Petani KJA di Tigaras pada dasarnya mau mengikuti aturan untuk menutup KJA dengan pertimbangan beberapa hal seperti penutupan akan dilakukan setelah panen

terakhir, adanya kompensasi ganti rugi, dan adanya pemodalan usaha baru serta pendampingan oleh pemerintah. Alternatif yang menjadi pemikiran mereka lebih kepada berdagang, dan pelibatan dalam sektor wisata. Sehingga mereka mengharapkan adanya pelatihan dan pendampingan nantinya hingga mereka bisa mandiri. Dan itu sudah disetujui, namun hingga saat ini, Pemkab Simalungun belum melakukan ganti rugi, sehingga Petani KJA resah, dan berniat untuk menebarkan bibit ikan baru lagi di KJA nya.

Penutupan KJA di Nagori ini lebih dimungkinkan untuk ditutup, apalagi melihat kondisi lapangan keberadaan budidaya KJA mengganggu arus penyebrangan kapal. Sisi kesiapan masyarakat sendiri lebih siap untuk menutup KJA di lokasi ini sehingga kebijakan pemerintah setempat cukup tepat mengedarkan penutupan KJA di Desa Tigaras ini dibanding Desa Sibaganding. Penegasan untuk menutup patut dibenarkan karena perluasan dan pembangunan pelabuhan ferry, serta tidak memungkinkannya relokasi KJA petani karena daerah pantai lain sudah diperuntukkan untuk lokasi wisata.

Kementerian Perhubungan telah mendirikan beberapa kios di lokasi Pelabuhan sebagai kompensasi bagi Petani KJA untuk bisa berdagang, namun jumlah kios tersebut belum mengakomodir bagi semua Petani KJA. Selain itu, di nagori ini belum ada produksi kerajinan, sanggar seni budaya, pusat kuliner, maupun pusat souvenir. Kearifan lokal yang ada yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi potensi wisata adalah seni budaya Tari Simalungun, kuliner dari bahan ikan seperti ikan Natinombur, Holat, dan olahan ikan lainnya. Produksi buah yang cukup dikenal dari nagori ini adalah mangga.

Kesimpulan yang dapat direkomendasikan sebagai peluang alternatif usaha bagi eks Petani KJA di Desa Tiga Ras sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara mendalam yang potensial bagi masyarakat dapat dilihat di tabel 4.21, yakni :

Tabel 4.21. Peluang Alternatif Lapangan Usaha Bagi Petani KJA Desa Tiga Ras

No	Sektor Usaha	Jenis Kesempatan Kerja	Potensi Alam/Peluang Skill
1	Perdagangan	Warung Makan/Minuman	Konsep Pinggiran Danau
		Restoran	Konsep Pinggiran Danau
		Sovenir	Pelabuhan/Kios
		Pasar Tradisional/Kuliner Sarapan dan Makan Siang	Alam Terbuka kawasan Hotel
2	Jasa	Juru Parkir	Tamu Hotel dan Pengunjung
		Transportasi	Tamu Hotel dan Pengunjung
		Biro Perjalanan	Tamu Hotel dan Pengunjung
		Pemandu Wisata	Tamu Hotel dan Pengunjung
3	Atraksi	Atraksi Air (Banan Boat)	Kawasan Danau Toba
		Jet Sky	Kawasan Danau Toba
		Musik/Seni	Pengunjung/Tamu Hotel
4	Akomodasi	Home Stay	Rumah-rumah penduduk
		Pengelola Objek Wisata	Alam kawasan Tiga Ras
		Penyewaan Peralatan Renang	Kebutuhan Pengunjung

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun Tahun 2021

4.3. KESIAPAN PETANI KJA TERHADAP PERUBAHAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DIARAHKAN

1. Kesiapan Mengalihkan Pekerjaan

Dari desa objek penelitian, Desa Tiga Ras lebih paling siap untuk melakukan penertiban terhadap usaha yang telah dibangun mereka secara turun temurun dimana hanya 8 orang yang menyatakan berkeberatan atau tidak rela beralih dari usaha KJA. Sementara di Desa Sibaganding, seluruh responden menyatakan ketidaksiapan untuk mengalihkan usaha KJA mereka mengikuti ketentuan dari Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2014 sebagaimana hasil sebaran kuisisioner tergambar hasil kemauan dari para Petani KJA sebagaimana tabel 4.22 berikut ini :

Tabel 4.22. Kemauan Mengalihkan Pekerjaan dari KJA

No.	Desa	Jumlah Petani KJA (Orang)		
		Kemauan Beralih Pekerjaan	Ketidakmauan Beralih Pekerjaan	Tidak Menjawab
1.	Sibaganding	0	56	0
2.	Tigaras	14	8	3
Total		14	64	3
Persentase (%)		17,28 %	79,02%	3,70%

Sumber: Data diolah tahun 2021

Alasan para Petani KJA tidak bersedia beralih dari Desa Sibaganding dan Tiga Ras adalah, terangkum dalam tabel 4.23 berikut :

Tabel 4.23. Alasan Tidak Siap untuk Beralih ke Pekerjaan Lain

No.	Desa	Alasan tidak siap untuk beralih ke Pekerjaan lain
1.	Sibaganding	1. tidak ada pekerjaan yang lain
		2. usaha lain tidak mendukung pendapatan
		3. merupakan penghasilan utama keluarga
		4. tidak punya keahlian selain ikan tangkap
		5. agar ada uang belanja (keluarga)
		6. Hanya KJA yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga
		7. Untuk bertahan hidup
		8. Budi daya ikan lebih menjanjikan
		9. Belum ada alternatif lain sebagai mata pencaharian
		10. Tidak ada lahan
		11. Tidak ada peluang mengingat topologi tanah tidak memungkinkan
2.	Tigaras	1. Belum ada mata pencaharian yang lain
		2. Mencari lapangan pekerjaan baru
		3. Modal dan keterampilan tidak ada
		4. Karena merubah profesi adalah hal yang sulit
		5. Karena mata pencaharian utama di keluarga

Sumber: Data diolah Tahun 2021

Sedangkan alasan kesiapan para Petani KJA di Desa Tiga Ras bersedia mengalihkan usahanya adalah digambarkan sebagaimana dalam tabel 4.24 berikut:

Tabel 4.24. Alasan Kesiapan Untuk Beralih di Desa Tiga Ras

No.	Kesiapan	Keterangan Alasan
1	Siap	Tapi Harus Sesuai Dengan Ganti Untung
2	Siap	Apabila Ada Alternatif Pekerjaan Lain Dan Modal Usaha
3	Siap	Apabila Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ada
4	Siap	Harus Ada Ganti Usaha Lain/Baru
5	Siap	Harus Sesuai Dengan Ganti Untung
6	Siap	Asal Sesuai Dengan Kebutuhan
7	Siap	Asal Sesuai Dengan Ganti Untung
8	Siap	Sesuai Ganti Rugi Dan Pengalihan Usaha
9	Siap	Sesuai Dengan Ganti Rugi Dan Pengalihan Usaha
10	Siap	Apabila Pemerintah Memberikan Alternatif Usaha/Modal Usaha
11	Siap	Asal Sesuai Ganti Rugi
12	Siap	Sesuai Ganti Untung
13	Siap	Tidak Ada Pilihan Lain
14	Siap	Kalau Sesuai Dengan Ganti Rugi

Sumber: Data diolah Tahun 2021

2. Perbandingan Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo melalui Dinas Perikanan Kabupaten Karo

Pentingnya lokus pembanding wilayah, untuk kemaksimalan dalam mengukur kesiapan pemerintah kabupaten yang terkena dampak dalam upaya penertiban budidaya KJA. Dilakukan pengambilan data di Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo karena dua wilayah Desa yang diteliti memiliki kondisi kesamaan wilayah yakni merupakan lokasi wisata dengan struktur tanah yang berbatu dan terjal.

Diperoleh informasi Petani KJA di Desa Tongging umumnya merupakan pengusaha yang berasal dari masyarakat setempat, jumlah Petani sekitar 12 orang dengan memiliki pekerja sekitar 32 orang, kapasitas lahan sekitar 354 lubang/petak KJA. Para pekerja ini, tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, namun juga pendatang yang telah menetap lama dan tinggal di desa dan telah memiliki KTP daerah Tongging.

Masyarakat lokal sendiri mulai beralih dimana yang dulunya memiliki KJA, berangsur membongkar KJAnya dan beralih ke sektor pertanian. Menurut Kepala

Desa Tongging, mata pencaharian utama masyarakat Desa Tongging adalah bertani terutama komoditi bawang dan hasil lainnya adalah peternak ikan nila dan buah mangga.

Desa Tongging yang merupakan daerah wisata, dengan modal pemandangan alam mulai memadukan usaha-usaha dengan konsep wisata kuliner. Sehingga menurut Kepala Desa, sudah selayaknya budidaya KJA di sana tidak di-zero-kan, karena bahan baku kuliner pariwisata yang endemik adalah merupakan hasil dari KJA. Pertimbangan lain, kualitas ikan yang dihasilkan di Desa Tongging setara dengan daerah lain seperti Paropo dan Silalahi yang masih memiliki perairan yang bersih, sehingga kualitas ikannya pun lebih baik dari daerah lain. Hal inilah salah satunya yang menumbuhkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata di daerah Desa Tongging. Mempertahankan KJA tetap ada adalah hal yang penting, meski dengan pengurangan produksi, untuk tetap men-stabil-kan ketahanan pangan lokal daerah Tongging serta menarik minat wisatawan ke daerah tersebut.

Informasi lebih lanjut, program pemerintah setempat mulai merencanakan pengembangan perikanan darat dengan konsep bioflog yang diyakini secara kuantitas produksi ikan akan mampu terpenuhi, meskipun dengan penggunaan metode budidaya ikan sistem yang direncanakan segi kualitas ikan yang dihasilkan tidak semaksimal pembibitan dengan metode KJA. Perbandingan lainnya dengan lokus penelitian, petani KJA di Desa Tongging memiliki pemikiran yang sama, bahwa Pemerintah jangan hanya menyoroiti keberadaan usaha-usaha petani KJA yang ada tetapi juga harus memberlakukan aturan yang sana pada usaha-usaha KJA dari perusahaan-perusahaan besar di Kawasan Danau Toba.

Peran Kepala Desa di desa Tongging sama dengan daerah lain, yaitu sebagai fasilitator dan membantu pemerintah untuk men-sosialisasikan kebijakan pemerintah terhadap penertiban KJA. Dalam diskusi bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Karo, menegaskan bahwa pariwisata tetap menjadi andalan dalam pemasukan daerah di Kabupaten Karo. Khusus penertiban KJA, Pemerintah Kabupaten Karo mencoba secara bertahap melakukan upaya penertiban tersebut dimana hal ini memerlukan sinergitas di beberapa instansi. Awalnya dimulai dengan pengurangan produksi menjadi 500 kotak KJA, berlanjut target tahun 2022 akan dikurangi setengah, dan target untuk tahun 2023 pencapaian target zero KJA.

3. Daya Dukung Konsep Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa pariwisata adalah beragam macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Memahami ketentuan kebijakan hukum tersebut diperlukan peranan pemerintah menjadi satu hal yang penting untuk menjalankan efektifitas aturan hukum yang telah dilahirkan.

Perpres 81/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, konteks ketentuan dalam hirarkhi perundangundangan, kebijakan hukum Perpres ini hampir setara dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU. Tentunya menjadi dasar ketentuan yang mengikat untuk efektifitas produk hukum yang telah dilahirkan. Pijakan berpikir terhadap larangan jika dikutip ketentuan Pasal 7 huruf e, Perpres No. 81 Tahun 2014, terhadap pelarangan budi daya perikanan danau, di wilayah perairan terbuka dari tepian hingga kedalaman 30 (tiga puluh) meter yang memiliki fungsi utama sebagai habitat hewan dasar dan wilayah pemijahan ikan. Dalam artian masih harus disepakati tolok ukur, apakah perairan pinggiran danau Desa Sibaganding merupakan ruang terbuka, yang mana kawasan perairan Kawasan Danau Toba di Desa Sibaganding bukan menjadi pusat kunjungan wisatawan.

Dalam konsep Tujuan Hukum ketika aturan kebijakan hukum telah digulirkan seyogianya dalam mejalankannya harus mampu diwujudkan. Menilik konsep tujuan hukum dari Jeremy Bentham menegaskan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang (Ali, 2009). Hukum itu diciptakan dan dihadirkan untuk memberikan kemanfaatan yang membahagiakan untuk semua orang, bahagia untuk yang diatur dan bahagia untuk pihak yang mengatur.

Konteks aturan kebijakan dalam ranah penerapan hukum, jika dikembalikan kepada kemauan dan usaha Pemerintah Daerah Dalam tata laksana pemerintah, merujuk pada aturan UU Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menyimpulkan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan (Djohan, 1990).

Otonomi Daerah sebagai wujud asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena kewenangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “*kebebasan*” kepada Daerah dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Kehadiran kebijakan Otonomi Daerah yang diterapkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 diharapkan akan memberikan wewenang yang besar kepada Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Undang-undang ini dianggap berwatak demokratis karena di dalamnya memuat aturan yang dianggap akan memberikan jalan bagi terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerah termasuk masyarakat Desa. Karena Undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas (Nadir, 2013). Kewenangan Otonomi Daerah, sebagaimana kemandirian dalam mengelola daerah lebih lanjut diberikan keleluasaan kepada desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari kebijakan Rencana Tata Ruang Kawasan Kawasan Danau Toba, jika di riview ada dua point utama terhadap masalah konteks penelitian dalam pengembangan alternatif usaha yakni point 4 tentang : Perairan Danau untuk pengembangan daya tarik wisata berbasis potensi perairan danau (olahraga dan rekreasi air, restoran terapung, toba cruise, toba mice), point 6 khusus wilayah Tiga Ras Pengembangan Pelabuhan Wisata Berbasis Ekologi Budaya Pedesaan dan Perairan Danau (KemenPUPR, 2019).

Dari sumber rujukan mandat kebijakan sebagai mana telah dijelaskan di atas, perlu mencari solusi dari program daerah terhadap upaya penanganan dan pencarian solusi terbaik dalam penertiban usaha KJA, khususnya di daerah lokasi penelitian.

Untuk kefokusannya maka dilakukan pemetaan terhadap rencana program organisasi perangkat daerah dalam memajukan usaha pariwisata di Kabupaten Simalungun.

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun adalah merupakan satu perangkat kerja satuan daerah dengan Visi dari tahun 2016-2021 mencoba merumuskan capaian sebagaimana tergambar dalam simpulan di bawah ini melalui Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020: ‘Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai budaya asli dan lingkungan yang asri dan nyaman’ melalui :

1. Meningkatkan citra, produk dan pelayanan pariwisata Kabupaten Simalungun
2. Mengoptimalkan sumberdaya pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta pemanfaatan peluang ekonomi yang timbul dari pengembangan pariwisata;
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah pada umumnya dan kepariwisataan pada khususnya;
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Simalungun;
5. Peningkatan aktifitas pemasaran dalam negeri dan luar negeri khususnya Negara-negara tertentu yang merupakan pasar utama dan pasar tradisional Kabupaten Simalungun.

Dari Visi tersebut maka hasil penelusuran dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun Tahun 2020, sebagai pedoman dan rujukan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun tahun 2020 telah menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Hasil wawancara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, ditemukan bahwa: Program kerja dan

kegiatan dinas saat ini terkendala oleh anggaran sehingga tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk bisa fokus pada Petani KJA di lokus penelitian.

Sesuai tupoksinya, Dinas Pariwisata & Kebudayaan berharap, para Petani KJA yang berada di lokasi wisata dan juga terkena dampak penertiban KJA, bisa beralih mata pencaharian pada bidang kepariwisataan selain alternatif lain dari menjadi peternak ayam.

Pengembangan pariwisata daerah mencoba menyikapi program percepatan pengembangan Super Prioritas Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dalam hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil bagian dalam peningkatan ekonomi sebagai pelaku pariwisata atau kegiatan ekonomi lain yang mendukung pariwisata.

Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun, kegiatan yang dapat menjadi peluang bagi Petani KJA adalah ikut ambil bagian dalam program pembinaan pembentukan Desa Wisata dan Pokdarwis, pembinaan pembuatan Homestay, serta penumbuhan kios-kios kuliner dan souvenir yang dapat mendukung kepariwisataan. Tujuan kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk membentuk masyarakat yang mandiri dalam mendukung pariwisata. Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan di atas tidak membutuhkan latar belakang pendidikan dan keahlian/skill yang spesifik, siapapun mampu melakukan kegiatan itu namun dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari pemerintah, hingga mereka bisa mandiri.

Dari hasil survey lapangan dan lebih lanjut dilakukan review program kerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terangkum kerangka program yang langsung masuk pada peningkatan kinerja usaha pariwisata yang tergambar pada tabel 4.25 di bawah yang jika tepat sararan bisa diintegrasikan kepada penertiban usaha KJA sebagai peluang alternatif yakni :

Tabel 4.25. Program Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun

No	Program Kegiatan	Target
1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2	Sosialisasi Penataan Kios Pusat Jajanan/ Kuliner di pinggir jalan Panatapan	Adanya sosialisasi penataan kios pusat jajanan/ kuliner yang baik di Kec. Girsip. Bolon
3	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Hutang 2017)	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga lainnya	
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona	

Sumber: Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun

b. Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun

Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun di Pelabuhan Desa Tigaras, dimana lokasi KJA berada, tidak memiliki wewenang penuh atas Pelabuhan ASDP Tigaras. Pelabuhan tersebut adalah wewenang dari Dinas Perhubungan pusat dan provinsi, yang menindaklanjuti larangan penerusan KJA, dengan membangun beberapa kios di sekitar pelabuhan Tiga Ras. Sehingga berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten tidak bisa memastikan peruntukkan dari kios dan tempat usaha yang telah dibangun tersebut.

Tupoksi dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun ini hanya melakukan pengawasan terhadap angkutan perairan di Danau Toba, karena mereka tidak memiliki armada maupun Pelabuhan. Armada dan Pelabuhan yang ada di Danau Toba saat ini adalah kepunyaan provinsi dan pusat. Karenanya mereka menyatakan bahwa dari sisi mereka, Dinas perhubungan Kabupaten Simalungun tidak dapat menyediakan peluang kerja bagi masyarakat, terutama Petani KJA, untuk memiliki mata pencaharian di bidang perhubungan ini.

c. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun

Keterkaitan dengan adanya Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun adalah untuk mengakomodir perkembangan perubahan sasaran kegiatan guna peningkatan pelayanan publik dan percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini sejalan dengan program nasional yang dijalankan oleh Pemerintah bahwa perlunya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik pada penerapan berupa program dan kegiatan yang dilakukan sampai kepada tingkat SKPD. Program dan kegiatan yang direncanakan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun bertujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan yang sesuai dengan sasaran daerah yang telah diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun, terdapat beberapa program yang bisa dikaitkan dengan peluang usaha dalam mensiasati pengalihan alternatif usaha terhadap dampak penertiban Petani KJA, seperti :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang mencakup kepada kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan kewirausahaan
 - b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
 - c. Akreditasi dan sertifikasi Lembaga Pelatihan Kerja swasta
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, yang mencakup program kegiatan:
 - a. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
 - b. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Mengacu kepada rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020 dalam program kegiatan dan anggaran pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana sebagaimana dalam urusan Pilihan yakni sektor Pariwisata mencoba mengakomodir tentang :

- a. Usulan Stakeholder bidang kepariwisataan untuk mempromosikan pariwisata Sumut diakomodir melalui Program Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan pengadaan bahan promosi, promosi pariwisata ke dalam dan keluar negeri,

promosi pariwisata melalui table top dalam dan luar negeri, publikasi pariwisata melalui media cetak, media elektronik dan media sosial serta pelaksanaan event-event bertaraf Nasional dan Internasional.

- b. Usulan Stakeholder untuk diadakannya pelatihan bagi komunitas-komunitas sebagai pemandu wisata terakomodir dalam Program Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Fasilitasi sertifikasi SDM Usaha Pariwisata Hotel dan Travel/Biro Perjalanan serta SDM HPI di Sumut, pembinaan pengelola dan pelaku usaha pariwisata di kabupaten kota.

Dalam ajang peningkatan wisatawan, Dinas Pariwisata tahun 2018 melakukan beberapa rencana kegiatan yang terangkum dalam kegiatan :

1. *Program Pemasaran Pariwisata* dengan kegiatan :
 - Pengadaan Bahan Promosi Kepariwisataaan
 - Pengadaan Souvenir untuk Tamu-tamu Wisatawan
 - North Sumatera International Coffee Convention 2018Jika program kegiatan ini tepat sasaran tentunya akan mampu memperkenalkan ruang-ruang usaha dari masyarakat Desa Tiga Ras khusus yang terimbas penertiban KJA.
2. *Program Destinasi Pariwisata* dengan kegiatan yakni :
 - Pelatihan Pemandu Wisata pada kab/kota
 - Pembinaan Pengelola/Pelaku Usaha Pariwisata pada kab/kota
 - Pemberian Penghargaan Toilet Bersih di Objek Wisata Unggulan di Sumut
 - Pelatihan Kepariwisataaan di kalangan Pramuka Sumut
 - Penyuluhan Sadar Wisata
3. *Program Pengembangan Kelembagaan* dengan kegiatan yakni :
 - Pelaksanaan Festival Kawasan Danau Toba
 - The Great Culture Of North Sumatera
 - Sosialisasi Geopark Kaldera Toba (Geowisata)
 - Pagelaran Hiburan Rakyat dalam rangka HUT Pemprov
4. *Program Pengembangan Industri Pariwisata* dengan kegiatan berupa :
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana kepada kabupaten/kota yang melaksanakan event pariwisata

5. *Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan yakni :*

- Pameran dan Pagelaran Seni Se Sumatera Utara
- Gelar Seni Budaya Daerah
- Pelatihan dan Pengembangan Seni

Tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumut ditargetkan sebanyak 300.599 orang, Berdasarkan data tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumut adalah sebanyak 221.841 orang. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 26.2% dari target yang telah ditetapkan:

- Daerah, Wisata, Pengelolaan Kawasan, Hotel, Jasa Perjalanan Wisata, Hiburan/Pertunjukan perlu digeliatkan
- SPA: menggunakan rempah2 tradisional/berdasarkan kearifan lokal (Alternatif lain)
- Petani harus diimbangi dengan *service excellent*/pelayanan/Attitude dan unsur-unsur kepribadian dalam mendukung pengembangan pariwisata
- Dinas Pariwisata telah membangun kios kuliner dan toilet bersih dari tahun 2019
- Ada 7 pelatihan untuk 7 kawasan pariwisata di Kawasan Danau Toba
- Sudah melakukan sertifikasi terhadap *tour guide* di Kawasan Danau Toba.

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara

Dalam Peningkatan kinerja Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan, Bidang Kelembagaan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa memiliki visi dan misi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke dalam program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara” (Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu, 2019).

Tujuan Rancangan Awal dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu Tahun 2019-2023, tergambar:

1. Menjabarkan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran

daerah di Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, Bidang Kelembagaan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, Bidang Kelembagaan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara;

Jika dikaitkan pada konsep pemajuan wisata, di mana desa yang diyakini sebagai ujung tombak dalam menumbuhkan geliat ekonomi sangat berhubungan dengan konsep fungsi dan kedudukan dinas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara harus dapat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi eksternal dan internal;
6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peluang peningkatan dalam pencapaian kemandirian desa melalui revitalisasi BUMDES desa untuk peningkatan perekonomian desa dengan kegiatan adanya program kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa lintas kabupaten dan kota melalui

peningkatan Bimtek pengembangan/pengelolaan Bumdes ditambah dengan bantuan Sarpras di kawasan Desa produktif. Kemudian Kegiatan BIMTEK Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan, dan Pembinaan dan Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Pameran Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) yang bertujuan Kelompok Usaha Produk Unggulan Desa.

Dalam peningkatan skill aparatur Desa secara langsung Dinas Pemberdayaan masyarakat desa memiliki kegiatan unggulan yakni Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa, Bimtek penyusunan Perbub dan Perdes, Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Sarana dan Prasana Desa.

4.4. ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF PENGALIHAN USAHA PETANI KJA

Menyikapi upaya pencarian fokus alternatif pengalihan lapangan kerja dari para Petani KJA, maka perlu dilihat kesiapan Pemerintahan Daerah melalui institusi atau organisasi perangkat dalam kewajiban bertanggungjawab untuk mencari jalan keluar dan bukan sebaliknya, masyarakat yang terdampak langsung untuk berpikir melakukan alternatif dalam pencarian solusi. Untuk memberikan kemudahan dalam proses pencarian solusi, maka hasil tabulasi aturan kebijakan yang dapat dijadikan usaha pencarian jalan keluar sebagai rujukan antara lain :

4.4.1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 14 Tahun 2016 tentang Desa.

Pelaksanaan otonomi daerah terhadap mandat pemerintahan daerah berupaya untuk mencapai perwujudan desentralisasi yang bertujuan untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat didukung oleh keberhasilan pelaksanaan otonomi desa. Desa merupakan unit wilayah kabupaten dan merupakan bagian integral dari wilayah kabupaten dan negara.

Dari sisi kesejahteraan, konsep UU No. 23/2014 telah membawa visi kesejahteraan melalui desain kelembagaan otonomi daerah. Semua pihak mengetahui bahwa tujuan besar desentralisasi dan otonomi daerah adalah membangun kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab besar meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kewenangan besar dan keuangan yang dimilikinya.

Mengutip pemahaman Rondinelli dan Nellis (1986:5) mendefenisikan desentralisasi dari perspektif administrasi merupakan pengalihan tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur dan meningkatkan serta pengalokasian sumberdaya dari pemerintah pusat kepada lembaga unit bidang instansi pemerintah, unit bawahan atau setingkat dengan pemerintah, otoritas publik atau perusahaan yang bersifat semi-otonom, daerah yang lebih luas, fungsional otoritas atau regional, atau organisasi sukarela non-pemerintah.

Otonomi Daerah sebagai wujud dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah untuk kemandirian. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat dan lebih mengetahui konteks potensi wilayahnya, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat (Nadir, 2013).

4.4.2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pembangunan kepariwisataan akan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya serta alam daerah, guna mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu ruang lingkup yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pariwisata dalam mengacu pengelolaan destinasi wisata adalah pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan pelestarian lingkungan.

Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan wisata berkelanjutan produk ketentuan dalam Permen Pariwisata Nomor 14 tahun 2016 menjadi satu acuan.

Terkait dalam upaya pengalihan dan penertiban KJA sebagaimana arah kebijakan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba, kebijakan ini memberikan pemahaman atas peran dan tanggung jawab daerah secara langsung untuk mengurangi resiko dalam pencarian solusi. Jika ditilik mandatoris tugas dan perannya, Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten, menjadi institusi yang penting untuk menjawab permasalahan atas pengalihan usaha KJA. Kedua Dinas ini yang langsung memiliki kelonggaran dalam merancang program langsung untuk melakukan eksplorasi kebutuhan yang diharapkan dalam menjalankan dan mengantisipasi aturan kebijakan tersebut. Pemerintahan Desa sendiri sudah memiliki modal awal dalam menatakelola desanya dengan modal Alokasi Dana Desa yang diperuntukan setiap tahun. Jika Pemerintah Desa memiliki kemauan dan perangkat Bumdes tentunya akan lebih memudahkan membangun pengelolaan wilayahnya masing-masing.

Integrasi tujuan antara hadirnya konsep kepariwisataan dan otonomi dalam pengelolaan kemandirian daerah, sama-sama hadir dalam upaya pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah. Otonomi suatu desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Posisi desa dengan struktur wilayah yang lebih tinggi hanya sebagai supervisi yakni dengan kecamatan, kabupaten, propinsi

maupun dengan pemerintah pusat. Di mana supervisi dalam hal ini menjadi landasan konsultasi untuk lebih memaksimalkan tata kelola pemerintahan dan dalam membuat peraturan desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (H.A.W. Widjaja, 2003).

Situasi dalam membangun daerah, Kepala Daerah melalui perangkat organisasi sebagai perpanjangan tangan, menjadi ujung tombak dalam memotivasi dan menginisiasi Pemerintah Desa, apalagi terhadap desa-desa yang memiliki potensi wisata. Desa Sibaganding dan Tiga Ras misalnya, tidak akan sulit mencari aspek potensi yang ada apalagi dengan keindahan alam yang dimiliki desa.

Mengutip dari salah satu jurnal tentang kelahiran desa wisata di Desa Adat Panglipuran Bali, Desa Wisata dianggap sebagai salah satu jalan keluar dan percontohan berkembangnya pariwisata. Akibatnya, berbagai kebijakan pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat di Bali memiliki keinginan untuk mengembangkan pariwisata budaya. Keberhasilan Desa Adat Panglipuran Bali, lebih terbuka lagi dengan menggandeng pihak ke-3 yakni perguruan tinggi, hingga berhasil merancang Desa Wisata dan Destinasi Pariwisata (Imron, 2015).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Nagori Tiga Ras, mengakui belum maksimalnya dilakukan potensi organ Bumdes Nagori, dikarenakan sumberdaya yang mereka miliki tidak mampu mengelola kegunaan dan kemanfaatan Bumdes. Meskipun struktur sudah ada, hanya sebatas pelengkap bagi pemerintahan desa guna melengkapi pencapaian tatanan perangkat desa.

Undang-Undang No 14 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Dilihat dari alokasi anggaran Dana Desa ditahun 2017 misalnya yang berhasil diperoleh dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>, diperoleh besaran ruang alokasi anggaran desa sebagaimana dalam tabel 4.26 di bawah :

Tabel 4.26. Anggaran Nasional ADD Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah ADD	Jumlah/Desa
1	2015	Rp 20,7 triliun	Rp 280 juta
2	2016	Rp 46,98 triliun	Rp 628 juta
3	2017	Rp 60 Triliun	Rp 800 juta

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>

Hampir dari tahun ke tahun alokasi anggaran dana desa meningkat, tujuannya hanya satu bagaimana melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi desa. Hasil rangkuman alokasi dana desa misalnya untuk tahun 2019 yang berhasil dihimpun dari <https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>, besaran alokasi anggaran dana desa terangkum dalam tabel 4.27 di bawah. Kenaikan alokasi anggaran desa ini juga didorong salah satunya adalah sebagai upaya tambahan Dana Desa untuk pengembangan lokasi wisata di desa. Untuk memotivasi "BUMDes dan desa wisata mampu menciptakan Desa pariwisata guna penciptaan lapangan kerja".

Tabel 4.27. Anggaran Nasional Tahun 2019-2020

No	Tahun	Jumlah ADD
1	2019	<i>Rp 70 triliun</i>
2	2020	<i>Rp 72 triliun</i>

Sumber : <https://www.kemenkopmk.go.id/>

Keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan sosial. Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa (Anggraeni, 2016). Untuk kemaksimalan penggunaan dana desa hal-hal apa yang bisa dilakukan dan juga ketentuan apa saja yang bisa dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, telah mengatur secara jelas pemanfaatan Dana Desa.

Hasil survey lokasi dan wawancara dan juga penyebaran kuisioner terhadap para responden di dua desa penelitian, memiliki potensi wilayah yang berbeda.

Sebagaimana potensi hasil bumi yang dimiliki dengan wilayah kecamatan memiliki andalan yang berbeda meskipun dalam topografi kondisi kemiringan wilayah yang cenderung berbatu. Tetapi secara alam keanekaragaman sumber daya dan budaya yang dimiliki desa sangat mendukung sebagaimana proyeksi pengembangan yang berfokus pada pengembangan produk wisata kategori, wisata alam, budaya, dan buatan

Untuk wilayah Desa Sibaganding, dengan keunikan dan khas yang dimiliki Desa yakni Batu Gantung, Huta Sibatu Loting-Parherekan, Batu Lubang, Baru Gorgo, Konservasi Gajah serta dalam konsep kekayaan pertanian kecamatan, menjadi sumber modal awal untuk dijadikan wisata alam dan wisata buatan. Tentunya jika fungsi kolaborasi kekuatan sisi pencapaian dalam konsep Bumdes dan Desa wisata sebagaimana yang diidam-idamkan akan mampu menjadi andalan.

Begitu juga harapan Desa Tiga Ras, dengan potensi objek wisata Sidamanik-Simarjarunjung-Tiga Ras terhadap tiga lokasi wisata yang berdekatan menjadi kekuatan dan andalan Kecamatan Dolok Pardamean. Apalagi jika memperoleh dukungan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Provinsi. Dengan modal awal alokasi Dana Desa yang ada aparatur desa potensial untuk dimotivasi dan disuervisi mewujudkan desa wisata sebagaimana wujud KJA dijadikan sebagai pilot wisata kuliner yang siap menyajikan sumber ikan sebagai unggulan.

Hasil pemetaan sebagaimana perbandingan dari Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang mencoba memaksimalkan budidaya perikanan dengan konsep kuliner restoran terapung, tentunya menjadi satu tawaran yang bisa membuka kemampuan dari dua desa khususnya Desa Sibaganding. Untuk pemenuhan kecukupan ketahanan pasokan ikan, tentunya penutupan usaha KJA bukan menjadi satu pilihan tetapi penataan dan peruntukan KJA itu yang dimaksimalkan yang mampu sebagai wisata edukasi dan wisata kuliner.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

1. Pemetaan karakteristik masyarakat Petani KJA pada Desa Sibaganding dan Tigaras sebenarnya masih pada tingkat menengah dengan usia produktif yang mendominasi dengan konsistensi ber-KJA hampir 100% sebagai sumber pendapatan dan sudah dijadikan sebagai mata pencaharian utama serta sumber penghidupan keluarga
2. Pemetaan Potensi Alternatif Baik Secara Umum dan Khusus Petani KJA pada sektor pertanian Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yang memiliki produksi tanaman hortikultura berupa padi dan palawija dan juga sumber pemasok cabai dan tomat serta buah mangga (musiman), untuk produksi pertanian jenis tanaman perkebunan rakyat kecamatan juga memiliki keunggulan berupa Kopi Arabika, Vanila dan Cengkeh, yang dimungkinkan menjadi satu alternatif usaha bagi para Petani KJA apabila dilakukan penertiban. Potensi secara spesifik/khusus yang dimiliki Desa Sibaganding adalah sebagai tempat pembenihan dan pemeliharaan ikan dalam bidang wisata kuliner. Untuk potensi alam lainnya yakni wisata alam yang dimiliki Desa yaitu Batu Gantung, Huta Sibatu Loting (Parjerekan) Batu Lubang, Batu Gorga dan Konservasi Gajah, kekuatan alam yang dimiliki Desa menjadi modal Desa untuk bisa dieskplor terhadap pencarian alternatif usaha Petani KJA.

Sedangkan untuk Desa Tigaras sebagaimana sumber di Kecamatan Dolok Pardamean secara Umum memiliki potensi pertanian Tanaman Palawija (padi ladang, jagung, ubi kayu, kacang tanah) dan Perkebunan Rakyat (Kopi arabika, kelapa, vanili dan aren), sebagai andalan sekaligus sebagai alternatif usaha dari para Petani KJA. Untuk kekhususan sebagai alternatif usaha para Petani KJA yakni kopi yang menjadi pemikat wisata kuliner Desa Tigaras, ditambah lagi Desa Tigaras yang memiliki Pelabuhan penyeberangan langsung ke Samosir menjadi satu alasan tersendiri para pengunjung akan singgah ke Desa. Selain itu potensi alam yang potensial

adalah panorama alam Tigaras. Sektor Usaha penginapan dan kuliner sangat menjanjikan di Desa ini. Kemudian wisata air dengan atraksi-atraksi di danau misalnya Banan Boat, Jets Sky, sektor jasa misalnya penyewaan peralatan-peralatan renang, juru parkir serta sektor transportasi.

3. Kesiapan Petani KJA Terhadap Perubahan Lapangan Pekerjaan dua wilayah penelitian disimpulkan bahwa Petani KJA Desa Sibaganding tidak siap beralih pekerjaan dikarenakan faktor alam Sibaganding yang tidak memungkinkan untuk perikanan darat dan bertani dikarenakan alamnya yang curam dan tebing. Sementara untuk Desa Tigaras masyarakat Petani KJA siap beralih pekerjaan dengan syarat adanya kompensasi dari pemerintah.

B. REKOMENDASI

Berangkat dari kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa rekomendasi bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan yaitu:

1. Penataan dan revitalisasi usaha KJA di Desa Sibaganding dengan memanfaatkan konsep andalan desa lewat wisata kuliner olahan ikan desa. Hal ini diyakni karena Sumatera Utara melekat dengan julukan wisata kuliner sebagaimana khas daerah dengan masakan naniura dan holat, sehingga mampu menjadi menu utama tradisional dalam memajukan pariwisata di desa. Disamping itu perlu mempertahankan dimana Desa Sibaganding menjadi salah satu sumber penyediaan produk ikan yang harus dipasok 10.000 ton/tahun, fungsi dan pemanfaatan usaha KJA selain untuk konsep pariwisata juga menjadi lapangan pekerjaan baru bagi Petani KJA.
2. Pembentukan kebijakan daerah dengan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Sumatera Utara khusus penanganan dan penanggulangan Usaha KJA di kawasan Danau Toba, sebagaimana ketentuan konsep teori kemanfaatan dari aliran utilitas, yang bertujuan perundang-undangan dibuat harus mampu membahagiakan semua pihak dalam hal ini terhadap Petani KJA yang mengalami dampak langsung atas kebutuhan kebijakan juga pemerintah sebagai fasilitator. Konsep Rencana Aksi Daerah ini akan memperkuat Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa untuk konsisten dalam mengalokasikan anggaran dalam mewujudkan dan memaksimalkan potensi wisata desa dalam pencapaian Desa Wisata.

a. Dinas Pariwisata Provinsi

Hasil Rencana Aksi ini secara langsung memastikan *leading sector* masing-masing yakni Konsep Program Dinas Pariwisata dan Dinas Pemerintahan Desa dapat terintegrasi untuk *Program Destinasi Pariwisata* dengan kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata dengan melibatkan Petani Eks KJA di tiap-tiap Kabupaten, Pembinaan Pengelola/Pelaku Usaha Pariwisata khususnya yang berdampak penertiban bagi Petani KJA, Daerah, Wisata, Pengelolaan Kawasan Wisata terhadap peningkatan layanan Hotel, Jasa Perjalanan Wisata, Hiburan/Pertunjukan, pelatihan pengelolaan SPA dengan bahan rempah-rempah tradisional/berdasarkan kearifan lokal (Alternatif lain), penataan kios-kios kuliner dan toilet bersih, Pelatihan peningkatan Skill dalam pelayanan tamu bagi pramu saji hotel, *tour guide* di Kawasan Danau Toba serta pelatihan peningkatan penataan khas kuliner daerah.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi yakni Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa khususnya BUMDES dengan penguatan peraturan daerah dan desa sehingga memaksimalkan pengelola Bumdes mampu mewujudkan pencapaian kesejahteraan masyarakat Desa dalam penataan pencapaian ekonomi, dan di samping itu juga melaksanakan pelatihan bagi pengurus BUMDES sebagaimana konsep Kementerian Pariwisata dalam menata pariwisata dari Desa sehingga terwujud konsep Desa Wisata di kawasan wisata Danau Toba.

c. Revitalisasi BUMDES khususnya kawasan daerah wisata dalam mencapai Desa Wisata Yang Mandiri, sebagaimana konsep Pasal 90 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pencapaian untuk pemberian hibah dan/atau akses permodalan masyarakat desa, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar bagi masyarakat desa, memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa, sebagai bagian

strategi rancana aksi Daerah, untuk mendorong terciptanya produk-produk unggulan Desa termasuk juga alam pengembangan Desa Wisata sebagaimana acuan kebijakan Permen Pariwisata dan Permen Desa Tertinggal.

3. Penelitian lanjutan terhadap desa-desa yang memiliki usaha KJA, guna memaksimalkan dan justifikasi terhadap rumusan penyusunan kebijakan dalam Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah dalam penanganan dan penanggulangan Usaha KJA.
4. Perlu melibatkan pihak ke-3 yakni korporasi yang bertujuan untuk pemulihan dan memaksimalkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Sibaganding dalam menata wisata kuliner berbasis edukasi wisata budidaya ikan Kawasan Danau Toba.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, M. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Vol. 5, Issue 6).

Ali, A. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)* (3rd ed.). Kencana Prenada Media Group.
http://elibrary.uinbanten.ac.id//index.php?p=show_detail&id=679.

Anggraeni, M. R. R. S. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>.

Arifini, N. K., & Mustika, M. D. S. 2013. Analisis Pendapatan Pengrajin Perak Di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(6), 294–305.

Baker, S. 2006. *Sustainable Development*.

Chaniago, Y. 2010. Pengertian, Azas dan Tujuan Pariwisata. *Artikel Pariwisata*. <http://www.yasmenchaniago.com/2010/08/pengertian-azas-dan-tujuan-pariwisata.html>

Cohen, E. 1979. A Phenomenology of Tourist Experiences. *Sociology*, 13(2), 179–201. <https://doi.org/10.1177/003803857901300203>.

Djohan, D. 1990. *Problematik Pemerintahan dan politik lokal: Sebuah kasus dari daerah sumatra*. http://ucs.sulselib.net//index.php?p=show_detail&id=24218.

Donuisang, M. R., Donuisang, M. R., Soewarni, I., & Gai, A. M. 2017. *Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Petik Mawar Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu*.

Edward G.P. Samosir. 2015. *Impact Of The Business Establishment Of Pt. Suri Tani Pemuka To The Social Economic Of Fishermen Communities In Dolok Pardamean Subdistrict Simalungun Regency North Sumatera Province*.

Fenri A. S. et. al. 2021. *Jurnal maneksi vol 10, no. 1, bulan juni tahun 2021*. 10(1), 76–84.

H.A.W. Widjaja. 2003. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh* (first). RajaGrafindoPersada. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20334367>.

Hamid, H. W. 2016. Evaluasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *J+Plus Unesa* (Vol. 5, Issue 1).

Hasan, M., & Azis, M. 1999. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*.

Imron, M. 2015. Meretas Jalan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Desa Wisata Panglipuran Bali. *Jurnal Bina Praja*, 07(04), 279–288. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.279-288>.

Junaidi dan Zulfanetti. 2016. Analisis Kondisi dan Proyeksi Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi Junaidi. *Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 141–150. <https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/3516>.

Karyono, A. H. 1997. *Kepariwisataan*. 1997.

Kehutanan, K. L. H. dan. 2015. *Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN)* (p. 101).

KemenPUPR. 2019. *INTEGRATED TOBA MASTER PLAN*. Retrieved September 3, 2021, from <https://laketoba.travel/toba-masterplan/>

Kreatif, K. P. dan E. 2019. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019. In *Angewandte Chemie International Edition* (Vol. 6, Issue 11).

Lestyasari, D. 2017. Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3), 1–20.

Mahulaee, P. J. M. 2019. *Problem Description of Sustainable Tourism*. 1–10.

Nadir, S. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>.

Patinasarani, I. R. I. 2012. *Mobiitas sosial..., Indera Ratna Irawati Pattinasarany, FISIP UI, 2012*.

Provsu, D. P. (n.d.). *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*. <http://dinaspmmd.sumutprov.go.id/>

Risman, A., Wibhawa, B., & Fedryansyah, M. 2016. Kontribusi Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13622>

Rismawati, H. 2008. *Nilai “Anak Ni Raja Boru Ni Raja” Dalam Pengembangan Pariwisata*. Universitas Sumater Utara.

Shavinia, F. 2018. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Kesempatan Kerja Di Sektor Pariwisata Di Provinsi Bali* (Vol. 2015, pp. 1–26).

Simalungun, B. K. 2021. *Kabupaten Simalungun Dalam Angka* (p. 504).

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020.

Sinaga, A. (n.d.). *Pemetaan Kualitas Perairan Kawasan Danau Toba (Unimed).pdf*.

Sinaga, K. E. 2019. *kanatri Elhar Sinaga*. <https://library.usu.ac.id>

Soekanto, S. 2014. *sosiologi suatu pengantar*. 1(1), 2014–2016.

Syechalad. 2017. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sabang*. 1–12.

Sztompka, P. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. In *Paradigma* (Vol. 02, Issue 01).

Todaro, M. P. 2013. *Pembangunan Ekonomi*.

Turnip, C. 2013. *Pola Pemanfaatan Lokasi Wisata Alam untuk Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun*.

Ukkas, I. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil Kota Palopo. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2). <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.440>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13, 50 2003.

Unud, E. E. P., Tenaga, P., Pada, K., Pariwisata, S., Ayu, P., & Purwanti, P. 2017. *Di Kabupaten Badung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang*

meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam k. 843–872.

Wahbi, A. A., Syahrudi, S., & Ariwibowo, P. 2020. Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Pada Industri Konveksi Di Kampung Bulak Timur Depok Jawa Barat. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 52. <https://doi.org/10.33366/ref.v8i1.1562>

Warpani, S.P dan Warpani, I. . 2007. *Warpani, S.P.pdf*.

Warsito, A. (n.d.). *Usia Produktif dan Pengaruhnya Pada Perekonomian*. Glints.Com. Retrieved September 5, 2021, from <https://glints.com/id/lowongan/pengaruh-usia-produktif-pada-ekonomi/#.YTTXXo4zbIU>

Wulandari, I. G. A. A. 2020. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Industri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia. December*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19219.91680>

Zuhriana, D., Alikodra, H. S., Adiwibowo, S., Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, D., & Pascasarjana IPB, S. 2013. Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat Lokal Melalui Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Gunung Ciremai (Employment Opportunities Enhanced For Local Community Based on Ecotourism at Gunung Ciremai National Park). *Media Konservasi*, 18(1), 28–39. <https://media.neliti.com/media/publications/231301-peningkatan-peluang-kerja-bagi-masyaraka-1deb295b.pdf>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Sumber : Gambar lapangan, Penelitian Tahun 2021

Gambar 1. Pantai Paris salah satu lokasi wisata dan penginapan di Tiga Ras dan Panorama Alam Tiga Ras



Sumber : Gambar lapangan, Penelitian Tahun 2021

Gambar 2. Posisi KJA didekat pelabuhan Penyeberangan



Sumber : Gambar lapangan, Penelitian Tahun 2021

Gambar 3. Kios yang dibangun di sekitar Pelabuhan Simanindo



Sumber : Gambar lapangan, Penelitian Tahun 2021

Gambar. 4. Salah satu usaha restoran Terapung yang tetap mempertahankan usaha KJA

SEMINAR HASIL

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA





**ALTERNATIF LAPANGAN KERJA BAGI PETANI KERAMBA JARING APUNG (KJA)
DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN DANAU
TOBA
(FOKUS PADA KABUPATEN SIMALUNGUN)**

Ringkasan



Danau Toba salah satu kawasan andalan dengan potensi pariwisata terbesar di Sumatera Utara, dipadang belum sepenuhnya memberikan alternatif lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan kerusakan air danau karena banyaknya usaha keramba jaring apung sehingga merusak keindahan Danau Toba. Untuk mendukung tata kelola kawasan Danau Toba sebagai konsep pariwisata yang berkelas, maka penting untuk dilakukan pemetaan terhadap kemampuan yang dimiliki para Eks-petani KJA dalam pencarian solusi alternatif peralihan usaha. Pemetaan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat Eks-petani KJA dalam mengalih fungsikan kegiatan mereka terhadap mata pencahariannya guna mendukung potensi pariwisata di kawasan

LATAR BELAKANG



Kawasan Danau Toba yang memiliki luas perairan kurang lebih 1.129 km² dan kedalaman 450 meter Kawasan Danau Toba dikelilingi oleh 7 kabupaten yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba Samosir merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Berdasarkan PP 13/2017 tentang RTRW Nasional dan Perpres No. 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Kawasan Danau Toba dan sekitarnya menetapkan Kawasan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Prioritas dan diturunkan melalui Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 Selain itu pengembangan secara sektoral dokumen Riparnas Kementerian Parekraf Tahun 2020-2024 meletakkan Kawasan Kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Prioritas Tujuan Wisata Skala Nasional maupun Internasional (Renstra Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024:23). Pada tahun 2020, Kawasan Kawasan Danau Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) yang sejajar dengan Geopark Batur, Gunung Sewu, Rinjani dan Ciletuh yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Potensi Kawasan Kawasan Danau Toba sebagai Geopark Kaldera Toba memiliki keunikan “Supervulkano”. Kondisi ini menjelaskan nilai penting dari Kawasan Kawasan Danau Toba dari baik sisi potensi dan peluang yang dimiliki terhadap pengembangan kawasan tersebut Penyempurnaan tersebut penambahan

LATAR BELAKANG (Cont'd)

Pada tahun 2005, pengembangan budidaya KJA sebatas pada Desa Lumban Gaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir melalui kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara bekerjasama dengan Balai Informasi Pertanian yang selanjutnya meluas ke seluruh kabupaten di kawasan Kawasan Danau Toba dengan jumlah 6.366 unit KJA dan seluas total 667 Ha (A. Sinaga, n.d.). Meningkat di Tahun 2008, data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi diperoleh jumlah KJA di perairan Kawasan Danau Toba mencapai 7.012 unit/tahun yang terdiri dari kepemilikan PT. Aquafarm Nusantara sebanyak 1.780 unit dan kepemilikan masyarakat sebanyak 5.232 unit (K. E. Sinaga, 2019) Kabupaten Toba Samosir

Tabel. 1..1 Data Penyebaran KJA Kabupaten dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten	Unit KJA	Produksi (Ton)
1	Simalungun	8.880	27.900,85
2	Toba	539	628,29
3	Tapanuli Utara	220	880
4	Samosir	251	5.859,54
5	Dairi	1.967	2.358,04
6	Karo	458	349,96
7	Humbang Hasundutan	897	1.380,81
Jumlah		13.212	39.357,49
Keterangan: Data Hasil kompilasi dari Laporan Masing-masing Kabupaten (2021)			

LATAR BELAKANG (Cont'd)

Tabel 1.2. Sebaran KJA Per Desa di Kabupaten Simalungun 2019



NOMOR	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT KJA)
1	Sibaganding	Girsang Sipangan Bolon	1.125
2	Tambun Raya	Pematang Sidamanik	313
3	Tiga Ras	Dolok Pardamean	200
4	Purba Pasir	Haranggaol Horison	11
5	Purba Horison	Haranggaol Horison	40
6	Purba	Haranggaol Horison	60
7	Sihalpe	Haranggaol Horison	30
8	Haranggaol	Haranggaol Horison	7.101
J U M L A H			8.880

Tabel diatas menggambarkan penyebaran KJA di Kabupaten Simalungun memiliki jumlah yang cukup banyak jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Sebaran tiap desa dalam tawaran lokasi penelitian yakni Desa Sibaganding sebagai desa terdekat dengan kota wisata yakni Parapat dan Tiga Ras merupakan wilayah wisata yang sangat berkembang pesat saat ini. Sehingga disaumsikan mampu sementara menjangkau permasalahan di lokasi lainnya

LATAR BELAKANG (Cont'd)

Catatan dari data sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021, diperoleh tahapan-tahapan usaha dalam mengurangi produksi budidaya KJA di tiap kabupaten sekitar Kawasan Danau Toba sebagaimana dalam tabel berikut ini. Namun dapat dilihat bahwa usaha pemberlakuan penertiban dan pengurangan produksi budidaya KJA dari tahun ke tahun yang dilakukan, namun produksi budidaya KJA justru semakin meningkat, dalam arti bahwa kegiatan penertiban KJA belum maksimal.



Selanjutnya arahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa penertiban budidaya KJA di Kawasan Danau Toba hingga kapasitas produksi total 10.000 Ton pertahun merupakan kebijakan strategis yang harus terlaksana dalam tiga (3) tahun ke depan dengan memperhatikan nilai penting Kawasan Danau Toba dalam pembangunan pada tatanan nasional maupun internasional. Pelaksanaanya harus diantisipasi baik Pemerintah Daerah maupun pelaku budidaya KJA antara lain masyarakat yang terlibat langsung yaitu Petani KJA.

LATAR BELAKANG (Cont'd)

Tabel. 1.3 Gambaran Hasil Produksi KJA Pertahu

KERAGAAN KEGIATAN USAHA KJA TAHUN I					PREDIKSI USAHA KJA PENERTIBAN TAHUN II					KERAGAAN USAHA KJA TAHUN III			
NO	KABUPATEN	JUMLAH KJA	PRODUKSI (TON)	Porsi Produksi	NO	KABUPATEN	JUMLAH KJA	PRODUKSI (TON)	Porsi Produksi	NO	KABUPATEN	PRODUKSI (TON)	Porsi Produksi
1	TOBA	539	628,29	2%	1	TOBA	268	591,87	2%	1	TOBA	201,19	2%
2	DAIRI	1.967	2.358,04	6%	2	DAIRI	1.967	2.358,04	8%	2	DAIRI	801,53	8%
3	KARO	458	349,96	1%	3	KARO			0%	3	KARO	-	0%
4	SAMOSIR	251	5.859,26	15%	4	SAMOSIR	208	4.838,63	16%	4	SAMOSIR	1.644,72	16%
5	SIMALUNGUN	8.880	27.930,85	71%	5	SIMALUNGUN	7.442	20.750,55	71%	5	SIMALUNGUN	7.053,43	71%
6	HUMBANG HASUNDUTAN	897	1.380,81	4%	6	HUMBANG HASUNDUTAN			0%	6	HUMBANG HASUNDUTAN	-	0%
7	TAPANULI UTARA	220	880,00	2%	7	TAPANULI UTARA	220	880,00	3%	7	TAPANULI UTARA	299,13	3%
	TOTAL	13.212	39.387,21			TOTAL	10.105	29.419,09			TOTAL	10.000,00	

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Dari tabel disamping dapat dilihat bahwa usaha pemberlakuan penertiban dan pengurangan produksi KJA dari tahun ketahun telah dilakukan, tetapi produksi hasil KJA semakin meningkat artinya penertiban KJA belum maksimal dan masih banyak petani yang tidak menaati peraturan untuk menutup KJAny

Penertiban budidaya KJA tidak hanya akan merubah tatanan perekonomian namun juga memiliki resiko sosial bagi masyarakat pemanfaat baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Kurniasari, et. al. (2020) perlu dilakukan analisis resiko sosial yang muncul akibat penertiban budi daya KJA. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menghilangkan resiko sosial dapat dimulai dari menghilangkan sumber risiko dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja baru, sosialisasi kebijakan agar masyarakat memahami maksud dan tujuan kebijakan,

Latar Belakang (Cont'd)



Untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata yang berkelanjutan skala nasional dan bertaraf internasional, penertiban budidaya KJA menjadi suatu keharusan dan dampak resiko sosial ekonomi yang akan terjadi harus diminimalkan terutama bagi masyarakat terkena dampak langsung yaitu Petani KJA. Sangat penting untuk melakukan langkah dalam mempersiapkan kelompok ini diawali dengan melakukan pemetaan terhadap karakteristik kegiatan ekonomi budidaya KJA, karakteristik kemampuan yang dimiliki para Petani KJA, potensi alternative lapangan pekerjaan yang dapat dikembangkan bagi Petani KJA guna persiapan peralihan lapangan pekerjaan.

Selain dukungan infrastruktur daya tarik kawasan wisata dapat terwujud dengan dukungan objek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, tata laksana serta kondisi masyarakat dan lingkungan sehingga kemaksimalan capaian dapat diwujudkan sehingga diperlukan peranan masyarakat lokal dalam mewujudkan konsep pariwisata berbasis masyarakat setempat sebagaimana kemampuan yang dimilikinya

RUMUSAN MASALAH (*Research Question*) ?

1. Bagaimana karakteristik dan kegiatan ekonomi masyarakat Petani KJA?
2. Bagaimana potensi alternative lapangan kerja baik secara umum dan khusus bagi Petani KJA yang dapat dikembangkan?
3. Bagaimana kesiapan Petani KJA terhadap perubahan lapangan pekerjaan lain yang diarahkan?



TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan karakteristik dan kegiatan ekonomi masyarakat Petani KJA di wilayah penelitian.
2. Memetakan potensi alternatif lapangan kerja baik secara umum dan khusus bagi Petani KJA yang dapat dikembangkan.
3. Menganalisis kesiapan Petani KJA atas perubahan lapangan pekerjaan yang diarahkan

MANFAAT PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Simalungun khususnya usaha Petani KJA di Kecamatan Dolok Pardamean dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan pelaku wisata dalam merumuskan kebijakan pengembangan wisata di Kabupaten Simalungun khususnya di Kecamatan Dolok Pardamean dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
3. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian lanjutan dalam pencarian solusi kepariwisataan terhadap Petani KJA di Kecamatan Dolok Pardamean dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.



RUANG LINGKUP

Penelitian dilaksanakan pada lokus di Kecamatan Dolok Pardamean dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun Selain itu terdapat pada lokus pembanding yakni Desa Tongging Kecamatan Merek Tongging Kabupaten Karo

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan objek langsung para Petani KJA dengan metoda penelitian yang ditentukan, juga dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat yang langsung. Alasan lain adalah bahwa Kabupaten Simalungun memiliki jumlah pelaku usaha Petani KJA tipe perorangan terbanyak diantara 7 kabupaten di sekitar Kawasan Kawasan Danau Toba.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Yang Relevan

- ❑ Garno Yudhi Soetrisno dkk, di kutip dari Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 21, No 1, Januari 2020, 118-124, yang berjudul “Kualitas Air Kawasan Danau Toba di wilayah Toba Samosir Kelayakan dan Peruntukannya”, menyimpulkan “Analisis perairan Kawasan Danau Toba tidak/belum layak menjadi air baku air minum dan wisata air”.
- ❑ Drs. Antonius Sinaga dkk, Tahun 2011, dengan judul “Pemetaan Kualitas Kawasan Danau Toba Akibat Dampak Budidaya Sistem KJA Sebagai Upaya Relokasi Budidaya Ikan, menyimpulkan : 1. Kualitas perairan Kawasan Danau Toba Sekitar Keramba Jaring Apung wilayah penelitian yaitu Bakkara, Muara, Balige, Sibaganding, Haranggaol, Tongging, Silalahi, Simanindo, Pangururan, dan Tomok umumnya sudah tercemar berat, 2. Kualitas perairan sekitar perairan Kawasan Danau Toba sekitar KJA Sibaganding, Haranggaol, Tongging dan Tomok umumnya sudah tercemar berat. Sedangkan Lokasi yang lainnya tercemar sedang sampai tercemar berat, 3. Pencemaran air di daerah penelitian ini adalah disebabkan adanya aktifitasbudidaya ikan sistem KJA.
- ❑ Porman Juanda Marpomari Mahulae, Tahun 2019, dengan judul “Deskripsi Permasalahan Upaya Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara”, dalam kesimpulan menjelaskan : Penyelesaian persoalan dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan, masih merupakan tugas besar bagi para stakeholder kepariwisataan di kawasan Kawasan Danau Toba. Hal ini dapat dilihat dari daftar permasalahan yang telah teridentifikasi pada penelitian ini, yang menggambarkan belum berjalannya sebuah manajemen pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di sebuah destinasi wisata.

PENELITIAN YANG RELEVAN (CONT'D)

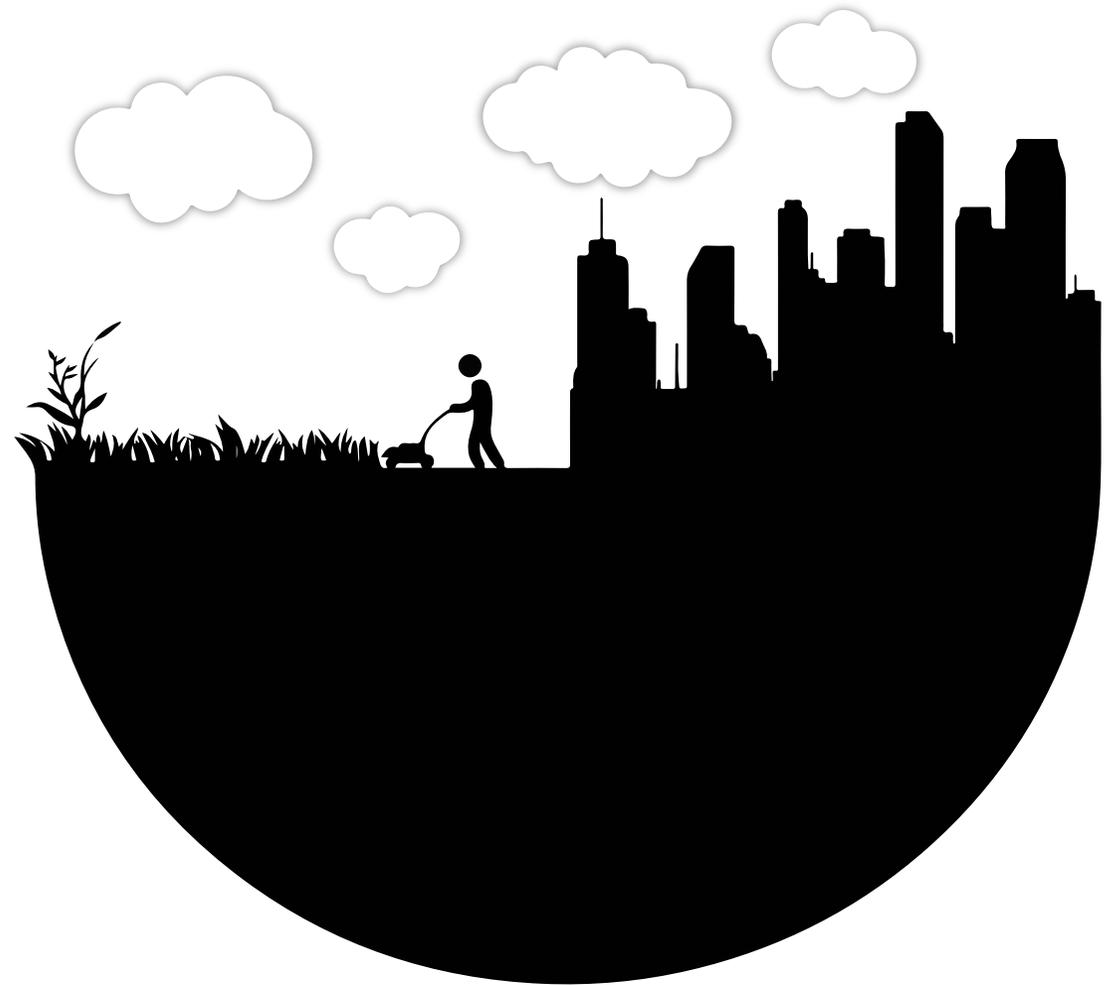
- ❑ Nendah Kurniasari, dkk, Tahun 2020, dengan judul : “Risiko Sosial Penertiban Keramba Jaring Apung Di Waduk Jatiluhur”, Jurnal Sosial Ekonomi, Vol. 15 No. 1, dalam kesimpulan menegaskan : Risiko sosial yang terjadi karena Program Penertiban KJA di Waduk Jatiluhur tidak hanya akan berdampak terhadap kondisi ekonomi, namun juga akan membawa berbagai risiko sosial. Risiko sosial yang akan terjadi berupa *culture shock* masyarakat akibat perubahan pola kehidupan, kohesifitas masyarakat menurun akibat modal *trust* yang hilang sehingga rentan terhadap konflik horizontal, hilangnya jaminan sosial, dan berbagai permasalahan demografi. Permasalahan demografi meliputi meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka putus sekolah, meningkatnya angka kriminalitas, dan mobilitas teritorial berupa migrasi masyarakat keluar daerah. Akibat dari migrasi ini menimbulkan permasalahan sosial lanjutan berupa teralienasinya masyarakat dari sumberdaya yang dimiliki yaitu sumberdaya perikanan di Waduk Jatiluhur.

Penelitian Yang Relevan (Cont'd)

- ❑ Feronica Simanjorang, dkk, dalam jurnal Profit, Volume 13 No 4 Tahun 2019 dengan judul “Peran Stakeholder Dalam Pembangunan Pariwisata Di Pulau Samosir”, menyimpulkan, dalam pembangunan pariwisata, stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda masing-masing berperan : Masyarakat lokal berperan penting dalam mempertahankan warisan budaya melalui pertunjukan seri. Mereka meyakini mampu mengelola warisan dan situs-situs budaya secara mandiri. Masyarakat menempatkan dirinya sebagai subjek yang berhak untuk mengelola sumber daya pariwisata. Hasilnya, masyarakat secara langsung menerima manfaat ekonomi dari aktivitas wisata yang terjadi di lingkungan mereka. Di sisi lain, kondisi tersebut menghambat pemerintah untuk membangun hubungan kerja sama sehingga sulit melakukan inovasi. Pemerintah daerah diketahui aktif memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas SDM di desa-desa wisata unggulan. Hal tersebut disambut baik oleh masyarakat lokal dengan cara berpartisipasi, namun di sisi lain peneliti belum melihat adanya pengawasan yang berkelanjutan sehingga kegiatannya masih dalam bentuk program. Dalam upaya perbaikan sarana dan prasarana aksesibilitas, Kementerian PUPR diketahui terus memberikan dukungan sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Pihak swasta diketahui belum menjalin kerja sama dengan pemerintah. Mereka berperan dalam menyediakan sarana transportasi danau dan akomodasi penginapan, namun hal tersebut belum berhubungan dengan aktivitas wisata lainnya.

KAJIAN TEORI

Konteks pariwisata merujuk pada UU No. 9/ 1990 tentang Kepariwisataan, pada Pasal 2 menegaskan bahwa Penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan kepercayaan pada diri sendiri. Memahami asas usaha bersama dan kekeluargaan, berarti bahwa kepariwisataan harus merupakan usaha bersama dan gotong royong dan bukan merupakan seseorang atau satu golongan. Sebagaimana lebih lanjut dirumuskan apabila tujuan penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia adalah: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan kesejahteraan rakyat; Menghapus kemiskinan, Mengatasi pengangguran; Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; Memajukan kebudayaan; Mengangkat citra bangsa; Memupuk rasa cinta tanah air; Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; Mempererat persahabatan antarbangsa. Mencapai tujuan penyelenggaraan pariwisata di atas membutuhkan satu konteks lapangan pekerjaan yang sesuai potensi sumber daya dalam mengisi kesempatan kerja khususnya pada lokasi pariwisata dimaksud.



Kajian Teori (Cont'd)



Keterkaitan dengan tenaga kerja disektoral pariwisata, yaitu orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja (Chaniago, 2010). Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sumarsono yang dikutip dari (Lestyasari, 2017) tenaga kerja adalah merupakan semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksud agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan. Dalam penempatan pekerjaan, pemahaman *Teori Fungsi Sosial* dari Bowels dan Gitins, menegaskan peluang kesempatan kerja di masyarakat akan tergantung kepada keluarga, tempat kerja dan pendidikan. Artinya pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang berperan mengisi kekosongan keterampilan atau potensi yang ada (Patinasarani, 2012).

ALTERNATIF LAPANGAN KERJA

- ❑ Dalam kaitan pengembangan pariwisata, catatan dalam Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019 menjelaskan bahwa upaya konsep promosi Kawasan Danau Toba, bertujuan untuk mendukung Visi Kementerian yakni : mengembangkan destinasi kelas dunia. Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah pengembangan konsep pariwisata, melalui pemasaran terhadap promosi 100 *Wonderful event* Indonesia dan 10 *top event*, antara lain: Festival Kawasan Danau Toba, Festival Danau Sentani, Festival Raja Ampat, Festival Keraton Ambon, Festival Kuliner Nusantara di beberapa ibukota provinsi, Tour de Singkarak Sumatera Barat, Jakarta Maraton, Festival Bahari Tambora dan sebagainya (Kreatif, 2019).
- ❑ Sebagai salah satu target prioritas yang dipromosikan tentunya membuka seluas-luasnya kesempatan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dimana sektor pariwisata akan signifikan berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara. Dalam mendorong pengembangan sector pariwisata dapat menghasilkan dampak industri hulu dan hilir, dan dapat membuka peluang kerja yang amat luas baik di sektor formal maupun informal (Warpani, S.P dan Warpani, 2007). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2013, telah memastikan bahwa salah satu solusi alternatif untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pemanfaatan potensi lokal, baik itu potensi alam maupun keanekaragaman budayanya (Risman et al., 2016)



ALTERNATIF LAPANGAN KERJA



- ❑ Lumbanraja (2012) mencatat bahwa masa kejayaan wisata di Danau Toba mengalami masa puncak pada tahun 1996 dengan kunjungan hampir empat juta wisatawan. Sejak masa itu hingga sekarang catatan tersebut tidak pernah terulang kembali. Bahkan Kementerian Pariwisata mengungkapkan bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Danau Toba pernah mencapai -30,94% pada tahun 2013 (Kementerian Pariwisata, 2016) yang di kutip dari (Porman Juanda Marpomari Mahulae :2019) Jurnal Balitbang:2019
- ❑ Diperlukan penataan yang komprehensif kembali Kawasan Kawasan Danau Toba melihat potensi dan peluang yang dilakukan dalam paradigma pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dan bukan hanya sebagai alat pembangunan (Hasan & Azis, 1999). Pencarian alternatif bentuk kegiatan ekonomi sebagai peralihan mata pencaharian jika dikaitkan kepada prinsip Interaksi sosial akan bagi Petani KJA dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta menjadi satu prioritas dalam penataan kembali kawasan ini.

KESEMPATAN KERJA

- ❑ Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja. Kesempatan kerja didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha memberi pekerjaan atau penghidupan yang layak kepada seseorang. Kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lowongan pekerjaan yang belum diisi. Dalam hal ini kesempatan kerja bukanlah lapangan kerja yang masih terbuka, walaupun komponen terakhir ini akan menambah kesempatan kerja yang ada di waktu yang akan datang (Laitupa:2015).
- ❑ Kesiapan Pemerintah wajib berperan penting, sebagaimana yang dipahami dari prinsip interaksi sosial dari Bowels dan Gitin yang menitik tekankan Peningkatan Skill dan Sumber daya Manusia akan membuka perluasan kesempatan kerja dalam mengembangkan usaha di sektor-sektor produktivitas pariwisata sehingga akan mampu mendukung perluasan kesempatan kerja itu sendiri.

LAPANGAN KERJA/USAHA DESA SIBAGANDING DAN TIGARAS

- ❑ Masyarakat Desa Tiga Ras pada awalnya termotivasi menggunakan KJA sebagai alat budidaya ikan tawar, terlebih adanya pengalaman yang telah dimiliki dari pelaku usaha privat yang lebih dahulu melakukan pembudidayaan ikan nila dengan konsep KJA. Kebiasaan awal masyarakat sebelum mengenal konsep KJA adalah nelayan biasa bekerja sebagai nelayan tangkap dan juga bekerja sampingan sebagai petani.(Edward G.P. Samosir, 2015) dalam artian pekerjaan yang berpotensi yang dipahami masyarakat adalah Nelayan dan Bertani dan budidaya KJA menjadi mata pencaharian masyarakat setempat.
- ❑ Perpres 81/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya menetapkan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Prioritas yang mana pengembangannya dipastikan akan menimbulkan lapangan pekerjaan baru. Namun Petani KJA dengan kegiatan budidaya KJA ini telah mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan yang berdampak kepada kegiatan pariwisata di Kawasan Danau Toba pada masa kini dan yang akan datang nanti. Jika air danau tercemar maka kehidupan masyarakat menjadi sulit dan pariwisata akan berhenti dan diprediksi tidak ada yang berminat berwisata ke tempat yang sudah tercemar

Kesempatan Kerja Yang Dapat Dilakukan Petani KJA

Dalam pengembangan pariwisata dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah itu dimana peningkatan kunjungan akan dipengaruhi terhadap kondisi kebutuhan pengunjung di lokasi, apakah tempat itu memiliki sarana yang mampu menciptakan pengunjung bersedia atau mau kembali datang ke lokasi tersebut. Beberapa gambaran faktor yang mendorong wisatawan bersedia melakukan perjalanan ke lokasi wisata itu kembali didorong karena beberapa faktor sebagaimana dikutip dari (Zuhriana et al., 2013), digambarkan pada tabel dibawah.

NO	FAKTOR	UNSUR
1	Motivasi	a. Menikmati panorama alam b. Menikmati obyek pemandangan/ perkemahan c. Lokasi dekat tempat tinggal d. Menikmati satwa/tumbuhan unik
2	Perangkutan/ Assesibilitas	a. Baik b. Cukup baik
3	Informasi/ Promosi	a. Teman/saudara b. Media cetak c. Media elektronik d. Sumber Lain
4	Pelayanan pengunjung	a. Kurang Baik b. Cukup Baik c. Baik
5	Fasilitas ekowisata	a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Cukup Baik d. Baik

KESEMPATAN KERJA YANG DAPAT DILAKUKAN PETANI KJA (CONT'D)

Dikaitkan kepada pengembangan konsep ekonomi lokal yang dikemukakan Erik Cohen dan keterkaitannya kepada Faktor Internal dan Eksternal yang ada sebagai daya dukung pada lokasi Desa Sibaganding dan Desa Tiga Ras, maka tawaran pencarian solusi alternatif sebagai peluang kerja dari Petani KJA pada tabel di Samping yakni :

No	SEKTOR USAHA	JENIS KESEMPATAN KERJA
1.	Pertanian	Hutan Wisata (Ecowisata)
		Eco Farming
		Budi daya Ikan Darat
		Budi daya tanaman hias
2.	Perdagangan	Warung makanan/minuman
		Restoran
		Souvenir
		Rental Sepeda
3.	Jasa	Pemandu Wisata
		Penitipan kendaraan
		Juru Parkir
		Transportasi
		Biro Perjalanan
4.	Atraksi	Atraksi outbond
		Seni
		Musik
		Atraksi air (Banan Boat)
		Jets Sky
5.	Akomodasi	Home Stay
		Pengelola obyek wisata
		Toilet umum

JENIS-JENIS KONSEP PARIWISATA

- ❑ Wisata Budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan, untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka seperti eksposisi seni tari, seni drama, seni musik dan seni suara.
- ❑ Wisata Olahraga, yaitu perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat atau negara seperti Asian Games, Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup dan lain-lain.

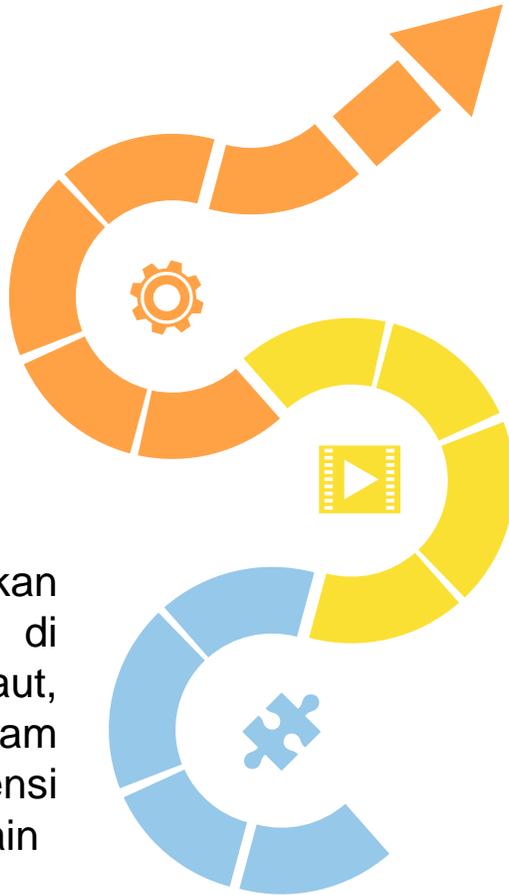


- ❑ Wisata Komersial, yaitu perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya
- ❑ Wisata Kesehatan, yaitu perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan tersebut untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang mengandung mineral yang dapat menyembuhkan.

JENIS-JENIS KONSEP PARIWISATA

❑ Wisata Industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam kesuatu kompleks atau daerah perindustrian di mana terdapat pabrik-pabrik atau bengkelbengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian termasuk dalam golongan wisata industri ini.

❑ Wisata Maritim, yaitu perjalanan yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air seperti di danau, bengawan, pantai, teluk atau laut, seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetensi berselancar, balapan mendayung dan lain-lain



❑ Wisata Bulan Madu, yaitu perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka ketempat-tempat romantis bagi sepasang pengantin baru.

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penjelasan tentang alternatif lapangan kerja bagi Petani KJA dalam mendukung pariwisata di Kawasan Kawas Danau Toba. Jenis penelitian ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa (1) penelitian kualitatif meskipun hanya mencakup skala lokasi penelitian yang kecil/terbatas, mampu mengembangkan pada kerangka konseptual yang lebih luas, (2) penelitian kualitatif tidak semata-mata hanya mementingkan hasil saja, melainkan aspek proses adalah sesuatu yang lebih utama, bahkan (3) penelitian kualitatif sangat baik apabila suatu penelitian ingin menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh sehingga hasil penelitiannya merupakan deskripsi detil yang tidak kaku tetapi juga mendalam.



WAKTU & LOKASI PENELITIAN

WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret s/d Agustus 2021 sesuai dengan jadwal pelaksanaan

LOKASI PENELITIAN

Lokus penelitian berada di Kabupaten Simalungun yakni Desa Sibaganding di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Desa Tiga Ras di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Kondisi geografis Desa Sibaganding di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ini berada di dataran tinggi dan jarak antara desa dengan ibukota kecamatan yaitu Parapat sejauh tiga km. Desa ini memiliki 12 Dusun yakni Aek Nauli, Tanjung Dolok, Siuhan, Sileutu, Panahatan, Sibaganding, Sait Dolok, Hubuan, Simpang Patra Jasa, Sigaoi-gaol, Repa Dolok dan Sualan.

METODE PENELITIAN

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Populasi penelitian adalah seluruh populasi Petani KJA Desa Sibaganding di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Desa Tiga Ras di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dengan jumlah pelaku usaha Petani KJA dapat dilihat pada Tabel 3.2.

No.	Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha Eks Petani KJA (orang)
1.	Tigaras	29
2.	Sibaganding	77
	Total	106



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Studi literature yaitu menelusuri beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian, diantaranya daftar potensi Kabupaten Simalungun khususnya desa lokasi penelitian dan daftar usaha Petani KJA terbaru.
2. Penyebaran Instrument Penelitian yang berisikan kuisiner dan wawancara tertulis untuk mengetahui informasi karakteristik petani dan kegiatan ekonomi.
3. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke desa lokasi penelitian terhadap kondisi dan potensi desa, serta usaha Petani KJA.
4. Interview personal dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, sehingga data yang didapat lebih mendalam pada objek yang diteliti. Interview personal dilakukan melalui FGD dan *face to face*. Hal-hal yang ditanyakan adalah: 1) potensi SDA dan SDM di Kabupaten Simalungan, khususnya di desa lokasi penelitian; 2) kebijakan Pemerintah setempat dalam rangka untuk mencari alternatif pekerjaan lain bagi eks Petani KJA; serta 3) permasalahan dalam upaya penyediaan lapangan pekerjaan bagi eks Petani KJA.
5. Kuesioner, yaitu pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tertulis

METODE PENELITIAN

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang bersumber dari hasil kuesioner, wawancara/FGD, observasi, dan dokumen dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan melalui beberapa langkah-langkah analisis:

- a) Mendeskripsikan definisi variable karakteristik yang ditentukan berdasarkan teori dan pemahaman literature dan studi kawasan penelitian.
- b) Melakukan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dokumen, dan observasi.



- c) Melakukan tabulasi dan analisa serta telaahan dalam kompilasi data terhadap bentukan kelompok tema karakteristik yang ditentukan.
- d) Menarik kesimpulan atas jawaban perumusan masalah dan merumuskan rekomendasi atas kesimpulan yang ditarik

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

PEMETAAN KARAKTERISTIK DAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI KJA



Pentingnya melakukan pemetaan karakteristik serta identifikasi kegiatan ekonomi suatu masyarakat adalah merupakan salah satu upaya untuk bisa menentukan arah persiapan rencana program dalam masyarakat. Perencanaan, merupakan fungsi pertama dari empat fungsi manajemen selain fungsi-fungsi manajemen lainnya yakni pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Lebih lanjut Kuncoro (2012:50) yang dikutip dari buku Hendra Wati Hamid (Hamid, 2016) mengemukakan bahwa, kenyataan menunjukkan banyaknya kegagalan akibat dari perencanaan yang salah dan tidak tepat. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri, ataupun pada saat proses berlangsung. Banyaknya perencanaan pembangunan yang gagal, karena apa yang direncanakan tidak mempunyai pijakan yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Seringkali, program yang dilaksanakan tidak dapat memberdayakan masyarakat, tetapi justru menciptakan ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Artinya, banyak program pemerintah hanya memberikan ikan, bukan kailnya

Karakteristik Masyarakat Petani KJA

1. BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Komposisi pekerjaan Petani KJA didominasi laki-laki dengan melihat posisi keberadaan KJA yang berada hampir 100 meter dari pinggir danau dan di kedalaman lebih 10 meter, pekerjaan ini lebih layak dan pantas dilakukan oleh laki-laki. Tenaga kerja perempuan dalam kegiatan budidaya KJA lebih banyak bersifat sebagai pekerja pendukung terutama dalam membantu kegiatan ekonomi keluarga.

Disimpulkan bahwa dalam budidaya KJA, yang menjadi sumber penghasil utama dalam keluarga adalah laki-laki sebagai kepala rumah tangga



2. BERDASARKAN USIA

Batasan usia produktif Petani KJA di Desa Sibaganding dan Tigaras berada di Usia Dewasa dan Lansia dengan batasan usia 26-45 tahun dengan sebanyak 38,37 % dan batasan usia 46-65 tahun sebanyak 34,57 %. Kondisi batasan usia dari Petani KJA menggambarkan bahwa batasan usia tersebut masih produktif terhadap pekerjaan yang digeluti di budidaya KJA.

Dua lokasi ini terhadap batasan usia memiliki perbedaan jumlah yang signifikan dalam usia produktif di mana pada Desa Sibaganding terdapat Lansia (46-65 tahun) mendominasi sebagai Petani KJA dan masih menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga

Karakteristik Masyarakat Petani KJA

3. BERDASARKAN PENDIDIKAN

Berdasarkan data, dominan Petani KJA adalah tamatan SMA/K yakni Desa Sibaganding sebanyak 29 orang, Desa Tiga Ras sebanyak 15 orang. Sedangkan yang memiliki keahlian khusus tamatan Diploma atau S1 26 orang.

4. BERDASARKAN PENDAPATAN PER BULAN

Pendapatan Petani KJA dengan pekerjaan utama KJA masih di bawah rata-rata dilihat dari persentase 1-3jt pendapatan perbulan sebesar 38,27% menunjukkan kegiatan ekonomi KJA sudah mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder responden. Persentase sebesar 24,69 % responden dengan batasan pendapatan sekitar 3-5 juta membuat responden yakin bahwasannya kegiatan ekonomi budidaya KJA dapat menjamin kehidupan keluarga dengan lebih baik.



5. BERDASARKAN LAMA BERUSAHA SEBAGAI PETANI KJA

Hampir seluruh Petani KJA telah bekerja selama lebih dari 4 tahun bahkan terdapat lebih dari 70% responden melakukan kegiatan ekonomi ini lebih dari 10 tahun. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi KJA ini mendatangkan banyak manfaat secara finansial bagi responden.

Keterkaitan antara pengalaman, pendidikan serta usia para Petani KJA berkaitan dalam proses adaptasi jika nantinya mereka akan beralih usaha terhadap seberapa lama dia mampu bertahan atas usaha baru dalam mencukupi kebutuhan pokok.

KARAKTERISTIK KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI KJA



Desa Tigaras merupakan Desa Wisata Alam dan Wisata Sejarah, dimana tahun 1970 sebelum adanya nama Desa Tigaras dikenal dengan nama Desa Tapak Kuala. Desa ini masih sangat sepi terhadap kunjungan wisata dimana awalnya pengunjung datang dari Samosir, Tapanuli Utara dan Selatan. Pertumbuhan pemukiman pada desa ini berubah nama menjadi Tigaras, yang mengandung makna sentral perdagangan Simalungun hingga akhirnya Tigaras menjadi akses menuju Samosir yang banyak dilalui kapal-kapal karena keramaiannya.

Awal pengenalan budidaya KJA, di mana saat Suku Padang di Tahun 2000, mencoba melakukan usaha pembudidayaan Ikan Keramba terdapat penolakan masyarakat yang merasa terganggu karena pemudidayaan Ikan Keramba ini karena cukup dekan dengan lokasi wisatadan akhirnya keramba perlahan mulai ditutup.

Beda halnya dengan Desa Sibaganding sebagai hasil diskusi dengan Kepala Desa Sibaganding, desa ini yang berbatasan dengan Desa Girsang Sipangan Bolon, yang memiliki hutan lindung berupa Taman Nasional. Selain kemampuan mengakses terhadap hasil danau, sebahagian masyarakat juga banyak melakukan akses terhadap hasil hutan berupa kayu dan tanaman hutan lainnya. Karena pelarangan dan pembatasan pemanfaatan hasil hutan lindung, masyarakat Desa Sibaganding lebih mengutamakan jadi nelayan hingga akhirnya mengenal usaha budidaya KJA.

PEKERJAAN UTAMA PETANI KJA



No.	DESA	JUMLAH PETANI KJA BERDASARKAN PEKERJAAN UTAMA (ORANG)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tidak Menjawab
1.	Sibaganding	1	0	1	1	0	0	48	3	0	2
2.	Tigaras	0	1	1	2	0	0	18	1	1	1
Total		1	1	2	3	0	0	66	4	1	3
Persentase (%)		1,23 %	1,23 %	2,47 %	3,7 0%	0 %	0 %	81, 48 %	4,9 4%	1,23%	3,70 %

Data diatas menunjukkan bertani KJA adalah merupakan pekerjaan utama dari para responden di Desa Sibaganding dan Tiga Ras. Dapat dilihat bahwa 81,48 % merupakan Petani KJA yang artinya satu-satunya sumber mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarga

KETERANGAN:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. PNS/ TNI/POLRI | 5. Pelajar/Mahasiswa |
| 2. Pegawai Swasta | 6. Petani |
| 3. Wiraswasta/Usahawan | 7. Petani KJA |
| 4. Buruh/Pekerja | 8. Nelayan ikan tangkap |
| | 9. Lainnya |

PEKERJAAN SAMPINGAN PETANI KJA

No	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Pekerjaan Sampingan (Orang)				
		Supir	Berdagang	Petani	Lain	Tidak Menjawab
1.	Sibaganding	1	2	19	10	24
2.	Tigaras	2	3	7	0	13
Total		3	5	26	10	37
Persentase (%)		3,70 %	6,17%	32,10%	12,35%	45,68%

Dari data diatas, pekerjaan sampingan yang dilakukan responden adalah tidak ada. Kegiatan ekonomi KJA adalah satu-satunya pekerjaan utama yang responden lakukan walaupun terdapat 32,10% responden yang bertani, 12,35% sebagai nelayan, dan pekerjaan serabutan lainnya.

Usaha KJA merupakan satu pekerjaan utama dan bertani merupakan pekerjaan sampingan ini dilakukan karena keterpaksaan sebagai usaha bantuan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Usaha sampingan dilakukan Petani KJA hampir 32,10% yakni bertani, tapi pekerjaan ini bukanlah menjadikan untuk perpindahan usaha mereka ke usaha bertani. Tetapi karena jenis usaha itulah yang paling potensial yang mereka miliki dan bisa dilakukan para Petani KJA tersebut.



Keahlian/keterampilan yang dimiliki Petani KJA

No	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Keahlian/Keterampilan (Orang)					
		Bertani	Bertukang	Supir	Pembenihan	Nelayan	Tidak punya keahlian
1.	Sibaganding	0	0	1	0	3	52
2.	Tigaras	2	1	1	1	0	20
Total		2	1	2	1	3	72
Persentase (%)		2,47 %	1,23%	2,47%	1,23 %	3,70 %	88,89 %

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 88,89 % responden tidak mempunyai keahlian/keterampilan (*unskilled*). Di sini responden hanya berharap KJA sebagai sumber kebutuhan hidup mereka.

Status Kepemilikan KJA

No.	Desa	Jumlah Petani KJA Berdasarkan Status Kepemilikan KJA (Orang)				
		Milik Sendiri	Sewa	Kerjasama	Buruh/Pekerja	Lain
1.	Sibaganding	53	1	2	0	0
2.	Tigaras	25	0	0	0	0
Total		78	1	2	0	0
Persentase (%)		96,30 %	1,23 %	2,47%	0 %	0 %

Sebanyak 96,300% status unit KJA adalah milik responden sendiri. Hal ini diperoleh berdasarkan data lapangan yang diberikan dan membuktikan bahwasannya kegiatan KJA ini membawa manfaat finansial yang signifikan bagi mereka sendiri. Kepemilikan KJA dari para Petani KJA masih merupakan kegiatan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari saja dalam arti usaha perikanan skala kecil.



PEMETAAN POTENSI ALTERNATIF LAPANGAN KERJA SECARA UMUM DAN KHUSUS BAGI PETANI KJA

POTENSI ALTERNATIF LAPANGAN KERJA SECARA UMUM

URAIAN	KONSERVASI/ PELESTARIAN	PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL
GEODIVERSITY	<input type="checkbox"/> Batu-batuan alam bentukan letusan gunung purba Toba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemandu ke objek 2. Jasa transportasi (boat, mobil) 3. Restoran dan berjualan makanan 4. Homestay 5. Tracking ekowisata 6. Berdagang kerajinan/souvenir shop 7. Wisata bersampan, memancing di danau, bersepeda keliling kampung. 8. Wisata religi dan sejarah
BIODIVERSITY	<input type="checkbox"/> Tanaman/ hewan endemic/ khas/ dilindungi <input type="checkbox"/> Tanaman/hewan yang dibudidayakan masyarakat setempat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemandu ke objek 2. Jasa transportasi (boat, mobil) 3. Restoran dan berjualan makanan/ minuman/buah-buahan/hasil hutan 4. Homestay dan pengalaman bertani 5. Tracking ekowisata 6. Berdagang kerajinan/souvenir shop 7. Wisata bersampan, memancing di danau, bersepeda keliling kampung, wisata agro. 8. Budidaya pertanian, peternakan, perhutanan, perikanan darat, tanaman hias dan pembibitan.
CULTURE DIVERSITY	<input type="checkbox"/> Tarian <input type="checkbox"/> Nyanyian <input type="checkbox"/> Alat music <input type="checkbox"/> Makanan <input type="checkbox"/> Minuman <input type="checkbox"/> Kerajinan <input type="checkbox"/> Adat istiadat <input type="checkbox"/> Obat tradisional <input type="checkbox"/> Bahasa <input type="checkbox"/> Aksara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemandu ke objek 2. Jasa transportasi (boat, mobil, sepeda) 3. Restoran dan berjualan makanan dan minuman khas 4. Homestay dan mengenal budaya (satu per satu) 5. Tracking ekowisata 6. Berdagang kerajinan/souvenir shop 7. Wisata bersampan, memancing di danau 8. Kelas belajar budaya (satu per satu) termasuk belajar bahasa dan aksara.



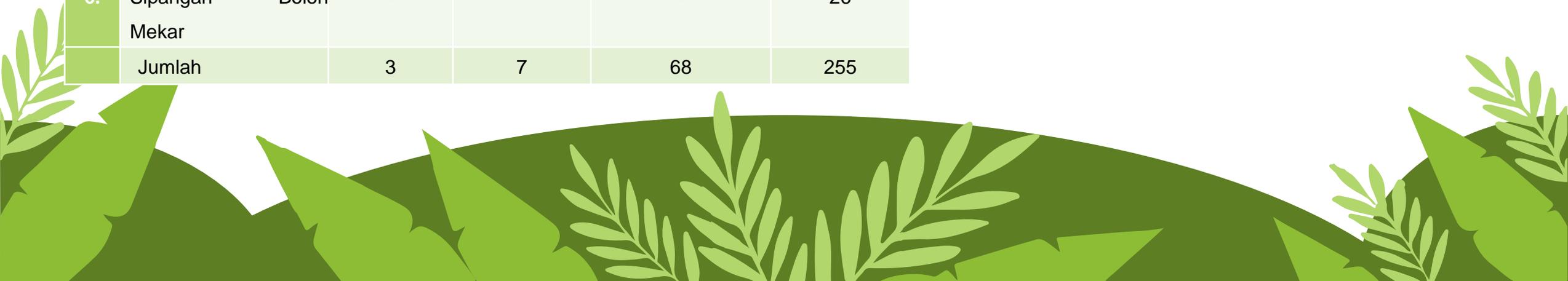
a. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (Desa Sibaganding)

1. Potensi pertanian di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon secara Umum

1. Produksi alam pertanian yang dimiliki kecamatan yang telah dirangkum.
2. Produksi tanaman jenis hortikultura.
3. Produksi tanaman buah-buahan.
4. Produksi jenis tanaman perkebunan rakyat.

2. Potensi Perekonomian (Perdagangan) di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

No.	Nagori/ Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Minimarket/ Swalayan	Restoran/ Rumah Makan	Toko Kelontong
1.	Sipangan Bolon	-	-	-	13
2.	Girsang	-	-	1	16
3.	Parapat	2	4	25	115
4.	Tigaraja	1	3	2	55
5.	Sibaganding	-	-	40	30
6.	Sipangan Mekar	-	-	-	26
	Jumlah	3	7	68	255



3. Potensi pariwisata di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

No.	NAGORI/KELURAHAN	NAMA OBJEK WISATA	JENIS OBJEK WISATA
1.	Sipangan Bolon	Dolok Si Sae-sae	Wisata Alam
2.	Girsang	Liang Majont k	Wisata Alam
		Liang Bolon	Wisata Alam
		Mual Bolon	Wisata Alam
		Air Terjun Halimbingan	Wisata Alam
3.	Parapat	Kawasan Danau Toba	Wisata alam
4.	Tigaraja	Kawasan Danau Toba	Wisata alam
5.	Sibaganding	Batu Gantung	Wisata alam
		Huta Sibatu Loting	Wisata alam
		Parherekan	
		Batu Lubang	Wisata alam
		Batu Gorgo	Wisata Alam
		Konservasi Gajah	Wisata <i>Camp Ground</i>

Potensi alam wisata Desa Sibaganding, jika dikaitkan dengan lokasi Peta sangat bersesuaian, tentang wilayah alam Desa Sibaganding yang berada dipinggiran Kawasan Danau Toba yang melingkupi Hutan Lindung, yang memang cukup menjadikan wilayah yang punya pengkhususan sebagai ikon wisata alam dengan pesona edukasi alam.

Kekhususan alam yang dimiliki Desa Sibaganding, menjadi satu ikon yang jika dikembangkan sebagai destinasi andalan untuk wilayah Kecamatan Desa Girsang Sipangan Bolon bisa menjadi alternatif sebagai konversi lahan pengalihan lahan KJA.



b. Kecamatan Dolok Pardamean (Desa Tigaras)

1. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Mayoritas masyarakat Kecamatan Dolok Pardamean berprofesi sebagai petani. Adapun hasil dari ladang yang diandalkan masyarakat adalah kopi dan bawang, di Desa Tigaras juga terkenal dengan buah mangganya, yaitu mangga tigaras, mangga ini mempunyai buah yang manis dengan ukuran yang kecil. Tidak jarang orang sengaja berlibur ke Desa Tigaras hanya untuk mengambil buah mangga ini sekaligus bermain di pantai khususnya Pantai Paris.

2. Potensi Penginapan Desa Tiga Ras

No	Nagori	Hostel/Losmen /Wisma	Rumah Makan
1	Tiga Ras	11	4
2	Parik Sabungan	3	1
3	Sibuntuon	-	-
4	Dolok Saribu	-	-
5	Buttu Bayu Pane Rj	-	-
6	Togu Domu Nauli	-	-
7	Silabah Jaya	-	-
8	Sirube rube	-	-
9	Nagori Bayu	-	-
10	Sihemun Baru	-	-
11	Tanjung Saribu	-	-

3. Potensi Warung Makan dan Kuliner

No	Nagori	Pasar	Warung Kelontong	Kedai Makan dan Minuman
1	Tiga Ras	-	20	33
2	Parik Sabungan	-	10	39
3	Sibuntuon	1	12	14
4	Dolok Saribu	-	1	6
5	Buttu Bayu Pane Rj	-	9	10
6	Togu Domu Nauli	-	3	5
7	Silabah Jaya	-	18	8
8	Sirube rube	-	5	10
9	Nagori Bayu	-	5	5
10	Sihemun Baru	-	6	4
11	Tanjung Saribu	-	13	7

POTENSI ALTERNATIF LAPANGAN KERJA SECARA KHUSUS

A. Potensi Alternatif Pengalihan KJA Hasil Pantauan Desa Sibaganding

NO	SEKTOR USAHA	KESEMPATAN KERJA	POTENSI ALAM/PELUANG SKILL
1	Pertanian	Wisata Alam	Huta Sibatu Loting (Parherekan)
		Hutan Wisata	Batu Lubang
		Hutan Wisata	Batu Gorgo
		Hutan Wisata	Konservasi Gajah
		Lahan Tidur	Eco Farming
		Lahan Tidur	Budidaya Kopi
2	Perdagangan	Transit Wisatawan	Warung Makan/Kuliner
		Penataan KJA dan Pemukiman Masyarakat	Restoran Siap Saji konsep penataan KJA
		Penataan KJA dan Pemukiman Masyarakat	Budidaya Ikan
3	Atraksi	Alam di Lingkungan Masyarakat	Atraksi Out Bound
4	Jasa	Konsep Wisata Alam yang ada	Pemandu Wisata
			Transportasi
			Juru Parkir

B. Potensi Alternatif Pengalihan KJA Hasil Wawancara dan Pantauan Desa Tigaras

NO	SEKTOR USAHA	JENIS KESEMPATAN KERJA	POTENSI ALAM/PELUANG SKILL
1	Perdagangan	Warung Makan/Minuman	Konsep Pinggiran Danau
		Restoran	Konsep Pinggiran Danau
		Sovenir	Pelabuhan/Kios
2	Jasa	Pasar Tradisonal/Kuliner Sarapan dan Makan Siang	Alam Terbuka kawasan Hotel
		Juru Parkir	Tamu Hotel dan Pengunjung
		Transportasi	Tamu Hotel dan Pengunjung
		Biro Perjalanan	Tamu Hotel dan Pengunjung
3	Atraksi	Pemandu Wisata	Tamu Hotel dan Pengunjung
		Atraksi Air (Banan Boat)	Kawasan Danau Toba
		Jet Sky	Kawasan Danau Toba
4	Akomodasi	Musik/Seni	Pengunjung/Tamu Hotel
		Home Stay	Rumah-rumah penduduk
		Pengelola Objek Wisata	Alam kawasan Tiga Ras
		Penyewaan Peralatan Renang	Kebutuhan Pengunjung

KESIAPAN PETANI KJA TERHADAP PERUBAHAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG DIARAHKAN

1. Kesiapan Mengalihkan Pekerjaan

No.	Desa	Alasan tidak siap untuk beralih ke Pekerjaan lain
1.	Sibaganding	1. tidak ada pekerjaan yang lain
		2. usaha lain tidak mendukung pendapatan
		3. merupakan penghasilan utama keluarga
		4. tidak punya keahlian selain ikan tangkap
		5. agar ada uang belanja (keluarga)
		6. Hanya KJA yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga
		7. Untuk bertahan hidup
		8. Budi daya ikan lebih menjanjikan
		9. Belum ada alternatif lain sebagai mata pencaharian
		10. Tidak ada lahan
		11. Tidak ada peluang mengingat topologi tanah tidak memungkinkan
2.	Tigaras	1. Belum ada mata pencaharian yang lain
		2. Mencari lapangan pekerjaan baru
		3. Modal dan keterampilan tidak ada
		4. Karena merubah profesi adalah hal yang sulit
		5. Karena mata pencaharian utama di keluarga

No.	Desa	Jumlah Petani KJA (Orang)		
		Kemauan Beralih Pekerjaan	Ketidak Mauan Beralih Pekerjaan	Tidak Menjawab
1.	Sibaganding	0	56	0
2.	Tigaras	14	8	3
Total		14	64	3
Persentase (%)		17,28 %	79,02%	3,70%



NO.	SIAP	ALASAN
1	SIAP	Tapi Harus Sesuai Dengan Ganti Untung
2	SIAP	Kalau Ada Alternatif Pekerjaan Lain Dan Modal Usaha
3	SIAP	Jika Memang Ketentuan Dan Sesuai
4	SIAP	Tapi Harus Ada Ganti Usaha Lain/Baru
5	SIAP	Harus Sesuai Dengan Ganti Untung
6	SIAP	Asal Sesuai Dengan Kebutuhan
7	SIAP	Asal Sesuai Dengan Ganti Untung
8	SIAP	Sesuai Ganti Rugi Dan Pengalihan Usaha
9	SIAP	Sesuai Dengan Ganti Rugi Dan Pengalihan Usaha
10	SIAP	Apabila Pemerintah Memberikan Alternatif Usaha/Modal Usaha
11	SIAP	Asal Sesuai Ganti Rugi
12	SIAP	Sesuai Ganti Untung
13	SIAP	Tidak Ada Pilihan Lain
14	SIAP	Kalau Sesuai Dengan Ganti Rugi

Perbandingan Desa Tongging Kecamatan Mereka Kabupaten Karo melalui Dinas Perikanan Kabupaten Karo



Desa Tongging yang merupakan daerah wisata, dengan modal pemandangan alam mulai memadukan usaha-usaha dengan konsep wisata kuliner. Sehingga menurut Kepala Desa, sudah selayaknya budidaya KJA di sana tidak di-zero-kan, karena bahan baku kuliner pariwisata yang endemic adalah merupakan hasil dari KJA. Pertimbangan lain, kualitas ikan yang dihasilkan di Desa Tongging setara dengan daerah lain seperti Paropo dan Silalahi yang masih memiliki perairan yang bersih, sehingga kualitas ikannya pun lebih baik dari daerah lain. Hal inilah salah satunya yang menumbuhkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata di daerah Desa Tongging. Mempertahankan KJA tetap ada adalah hal yang penting, meski dengan pengurangan produksi, untuk tetap men-stabil-kan ketahanan pangan local daerah Tongging serta menarik minat wisatawan ke daerah tersebut.

Informasi lebih lanjut, program pemerintah setempat mulai merencanakan pengembangan perikanan darat dengan konsep bioflog yang diyakini secara kuantitas produksi ikan akan mampu terpenuhi, meskipun dengan penggunaan metode budidaya ikan sistem yang direncanakan segi kualitas ikan yang dihasilkan tidak semaksimal pembibitan dengan metode KJA.

Perbandingan lainnya dengan lokus penelitian, petani KJA di Desa Tongging memiliki pemikiran yang sama, bahwa Pemerintah jangan hanya menyoroti keberadaan usaha-usaha petani KJA yang ada tetapi juga harus memberlakukan aturan yang sama pada usaha-usaha KJA dari perusahaan-perusahaan besar di Kawasan Danau Toba.

Peran Kepala Desa di desa Tongging sama dengan daerah lain, yaitu sebagai fasilitator dan membantu pemerintah untuk men-sosialisasikan kebijakan pemerintah terhadap penertiban KJA.

Dalam diskusi bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Karo, menegaskan bahwa pariwisata tetap menjadi andalan dalam pemasukan daerah di Kabupaten Karo. Khusus penertiban KJA, Pemerintah Kabupaten Karo mencoba secara bertahap melakukan upaya penertiban tersebut dimana hal ini memerlukan sinergitas di beberapa instansi. Awalnya dimulai dengan pengurangan produksi menjadi 500 kotak KJA, berlanjut target tahun 2022 akan dikurangi setengah, dan target untuk tahun 2023 pencapaian target zero KJA.

DAYA DUKUNG KONSEP PEMERINTAH

Dalam konsep Tujuan Hukum ketika aturan kebijakan hukum telah digulirkan seyogianya dalam mejalankannya harus mampu diwujudkan. Menilik konsep tujuan hukum dari Jeremy Bentham menegaskan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang (Ali, 2009). Hukum itu diciptakan dan dihadirkan untuk memberikan kemanfaatan yang membahagiakan untuk semua orang, bahagia untuk yang diatur dan bahagia untuk pihak yang mengatur.

Konteks aturan kebijakan dalam ranah penerapan hukum, jika dikembalikan kepada kemauan dan usaha Pemerintah Daerah Dalam tata laksana pemerintah, merujuk pada aturan UU Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menyimpulkan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. (Djohan, 1990)

Otonomi Daerah sebagai wujud asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena kewenangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Kehadiran kebijakan Otonomi Daerah yang diterapkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 diharapkan akan memberikan wewenang yang besar kepada Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Undang-undang ini dianggap berwatak demokratis karena didalamnya memuat aturan yang dianggap akan memberikan jalan bagi terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerah termasuk masyarakat Desa. Karena Undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas (Nadir, 2013). Kewenangan Otonomi Daerah, sebagaimana kemandirian dalam mengelola daerah lebih lanjut diberikan keleluasaan kepada desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari kebijakan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba, jika di riview ada dua point utama terhadap masalah konteks penelitian dalam pengembangan alternatif usaha yakni point 4 tentang : Perairan Danau untuk pengembangan daya tarik wisata berbasis potensi perairan danau (olahraga dan rekreasi air, restoran terapung, toba cruise, toba mice), ponit 6 khusus wilayah Tiga Ras Pengembangan Pelabuhan Wisata Berbasis Ekologi Budaya Pedesaan dan Perairan Danau (KemenPUPR, 2019.)

Dari sumber rujukan mandat kebijakan sebagai mana telah dijelaskan diatas, perlu mencari solusi dari program daerah terhadap upaya penanganan dan pencarian solusi terbaik dalam penertiban usaha KJA, khususnya di daerah lokasi penelitian. Untuk kefokusannya maka dilakukan pemetaan terhadap rencana program organisasi perangkat daerah dalam memajukan usaha pariwisata di Kabupaten Simalungun.



**A. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**



NO	PROGRAM KEGIATAN	TARGET
1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2	Sosialisasi penataan kios pusat jajanan/ kuliner di pinggir jalan panatapan	Adanya sosialisasi penataan kios pusat jajanan/ kuliner yang baik di kec. Girsip. Bolon
3	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (hutang 2017)	
4	Program pengembangan kemitraan Pengembangan sdm di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	
5	Program pemasaran pariwisata Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona	

B. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- ❑ Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, telah membangun beberapa kios di sekitar Pelabuhan ASDP Tiga Ras. Untuk memastikan peruntukan alokasi bagi pihak yang tepat untuk mendapatkan peluang melakukan usaha pada tempat-tempat usaha yang telah diadakan, Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun mencoba memperjelas alokasi peruntukannya.
- ❑ Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa tupoksi dan kegiatan dinas ini, menegaskan tidak ada peluang bagi masyarakat, terutama Petani KJA, untuk memiliki mata pencaharian di bidang ini. Dinas Perhubungan hanya melakukan pengawasan terhadap angkutan perairan di Kawasan Danau Toba, mereka tidak memiliki armada maupun Pelabuhan. Armada dan Pelabuhan yang ada di Kawasan Danau Toba saat ini adalah kepunyaan provinsi dan pusat. Untuk peruncanaan kios-kios sebagai usaha, secara tegas Dinas ini tidak mampu memastikan bisa diserahkan pengelolaannya kepada para Petani KJA.

C. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIMALUNGUN

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dicoba dilihat keterkaitan dalam peluang usaha dalam mensiasati pengalihan alternatif usaha terhadap dampak penertiban Petani KJA adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang mencakup kepada kegiatan :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan keterampilan kewirausahaan
 - b) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
 - c) Akreditasi dan sertifikasi Lembaga Pelatihan Kerja swasta
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, yang mencakup program kegiatan :
 - a) Penyiapan tenaga kerja siap pakai
 - b) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

D. DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

Tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumut ditargetkan sebanyak 300.599 orang, Berdasarkan data tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumut adalah sebanyak 221.841 orang. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 26.2% dari target yang telah ditetapkan :

- a) Daerah, Wisata, Pengelolaan Kawasan, Hotel, Jasa Perjalanan Wisata, Hiburan/Pertunjukan perlu digeliatkan
- b) SPA: menggunakan rempah2 tradisional / berdasarkan kearifan lokal (Alternati lain)
- c) Petani harus diimbangi dengan service excellent / pelayanan / Attitude dan unsur-unsur kepribadian dalam mendukung pengembangan pariwisata
- d) Dinas Pariwisata telah membangun kios kuliner dan toilet bersih dari tahun 2019
- e) Ada 7 pelatihan untuk 7 kawasan pariwisata di Kawasan Danau Toba
- f) Sudah melakukan sertifikasi terhadap tour guide di Kawasan Danau Toba.

E. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara harus dapat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi eksternal dan internal;
6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peluang peningkatan dalam pencapaian kemandirian desa melalui revitalisasi BUMDES desa untuk peningkatan perekonomian desa dengan kegiatan adanya program kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa lintas kabupaten dan kota melalui peningkatan Bimtek pengembangan/pengelolaan Bumdes ditambah dengan bantuan Sampras di kawasan Desa produktif. Kemudian Kegiatan BIMTEK Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan, dan Pembinaan dan Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Pameran Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) yang bertujuan Kelompok Usaha Produk Unggulan Desa.

Dalam peningkatan skill aparatur Desa secara langsung Dinas Pemberdayaan masyarakat desa memiliki kegiatan unggulan yakni Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota yang mengatur Desa, Bimtek penyusunan Perbud dan Perdes, Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Sarana dan Prasana Desa.

ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF PENGALIHAN USAHA PETANI KJA

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 14 Tahun 2016 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

- ❑ Hasil survey lokasi dan wawancara dan juga penyebaran kuisisioner terhadap para responden di dua desa penelitian, memiliki potensi wilayah yang berbeda. Sebagaimana potensi hasil bumi yang dimiliki dengan wilayah kecamatan memiliki andalan yang berbeda meskipun dalam topografi kondisi kemiringan wilayah yang cenderung berbatu. Tetapi secara alam keanekaragaman sumber daya dan budaya yang dimiliki desa sangat mendukung sebagaimana proyeksi pengembangan yang berfokus pada pengembangan produk wisata kategori, wisata alam, budaya, dan buatan
- ❑ Untuk wilayah Desa Sibaganding, dengan keunikan dan khas yang dimiliki Desa yakni Batu Gantung, Huta Sibatu Loting-Parherekan, Batu Lubang,, Baru Gorgo, Konservasi Gajah serta dalam konsep kekayaan pertanian kecamatan, menjadi sumber modal awal untuk dijadikan wisata alam dan wisata buatan. Tentunya jika fungsi kolaborasi kekuatan sisi pencapaian dalam konsep Bumdes dan Desa wisata sebagaimana yang diidam-idamkan akan mampu menjadi andalan.
- ❑ Begitu juga harapan Desa Tiga Ras, dengan potensi objek wisata Sidamanik-Simarjarunjung-Tiga Ras terhadap tiga lokasi wisata yang berdekatan menjadi kekuatan dan andalan Kecamatan Dolok Pardamean. Apalagi jika memperoleh dukungan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Provinsi. Dengan modal awal alokasi Dana Desa yang ada aparat desa potensial untuk dimotivasi dan disuervisi mewujudkan desa wisata sebagaimana wujud KJA dijadikan sebagai pilot wisata kuliner yang siap menyajikan sumber ikan sebagai unggulan.
- ❑ Hasil pemetaan sebagaimana perbandingan dari Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang mencoba memaksimalkan budidaya perikanan dengan konsep kuliner restoran terapung, tentunya menjadi satu tawaran yang bisa membuka kemampuan dari dua desa khususnya Desa Sibaganding. Untuk pemenuhan kecukupan ketahanan pasokan ikan, tentunya penutupan usaha KJA bukan menjadi satu pilihan tetapi penataan dan peruntukan KJA itu yang dimaksimalkan yang mampu sebagai wisata edukasi dan wisata kuliner.

KESIMPULAN

1. Pemetaan karakteristik masyarakat Petani KJA pada Desa Sibaganding dan Tigaras sebenarnya masih pada tingkat menengah dengan usia produktif yang mendominasi dengan konsistensi ber-KJA hampir 100% sebagai sumber pendapatan dan sudah dijadikan sebagai mata pencaharian utama serta sumber penghidupan keluarga.
2. Pemetaan Potensi Alternatif Baik Secara Umum dan Khusus Petani KJA pada sektor pertanian Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yang memiliki produksi tanaman hortikultura berupa padi dan palawija dan juga sumber pemasok cabai dan tomat serta buah mangga (musiman), untuk produksi pertanian jenis tanaman perkebunan rakyat kecamatan juga memiliki keunggulan berupa Kopi Arabika, Vanila dan Cengkeh, yang dimungkinkan menjadi satu alternatif usaha bagi para Petani KJA apabila dilakukan penertiban. Potensi secara spesifik/khusus yang dimiliki Desa Sibaganding adalah sebagai tempat pembenihan dan pemeliharaan ikan dalam bidang wisata kuliner. Untuk potensi alam lainnya yakni wisata alam yang dimiliki Desa yaitu Batu Gantung, Huta Sibatu Loting (Parjerekan) Batu Lubang, Batu Gorga dan Konservasi Gajah kekautan alam yang dimiliki Desa menjadi modal Desa untuk bisa diesplor terhadap pencarian alternatif usaha Petani KJA. Sedangkan untuk Desa Tigaras sebagaimana sumber di Kecamatan Dolok Pardamean secara Umum memiliki potensi pertanian Tanaman Palawija (padi ladang, jagung, ubi kayu, kacang tanah) dan Perkebunan Rakyat (Kopi arabika, kelapa, vanili dan aren), sebagai andalan sekaligus sebagai alternatif usaha dari para Petani KJA. Untuk kekhususan sebagai alternatif usaha para Petani KJA yakni kopi yang menjadi pemikat wisata kuliner Desa Tigaras, ditambah lagi Desa Tigaras yang memiliki Pelabuhan penyeberangan langsung ke Samosir menjadi satu alasan tersendiri para pengunjung akan singgah ke Desa. Selain itu potensi alam yang potensial adalah panorama alam Tigaras. Sektor Usaha penginapan dan kuliner sangat menjanjikan di Desa ini. Kemudian wisata air dengan atraksi-atraksi di danau misalnya Banan Boat, Jets Sky, sektor jasa misalnya penyewaan peralatan-peralatan renang, juru parkir serta sektor transportasi.
3. Kesiapan Petani KJA Terhadap Perubahan Lapangan Pekerjaan dua wilayah penelitian disimpulkan bahwa Petani KJA Desa Sibaganding tidak siap beralih pekerjaan dikarenakan faktor alam Sibaganding yang tidak memungkinkan untuk perikanan darat dan bertani dikarenakan alamnya yang curam dan tebing. Sementara untuk Desa Tigaras masyarakat Petani KJA siap beralih pekerjaan dengan syarat adanya kompensasi dari pemerintah.

REKOMENDASI

Berangkat dari kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa rekomendasi bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan yaitu:

1. Penataan dan revitalisasi usaha KJA di Desa Sibaganding dengan memanfaatkan sebagai konsep andalan desa lewat wisata kuliner olahan ikan desa. Hal ini diyakni karena Sumatera Utara melekat dengan julukan wisata kuliner sebagaimana khas daerah dengan masakan nadiura dan holat, sehingga mampu menjadi menu utama tradisional dalam memajukan pariwisata di desa. Disamping itu perlu mempertahankan dimana Desa Sibaganding menjadi salah satu sumber penyediaan produk ikan yang harus dipasok 10.000 ton/tahun, fungsi dan pemanfaatan usaha KJA selain untuk konsep pariwisata juga menjadi lapangan pekerjaan baru bagi Petani KJA.
2. Pembentukan kebijakan daerah dengan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Sumatera Utara khusus penanganan dan penanggulangan Usaha KJA dikawasan Kawasan Danau Toba, sebagaimana ketentuan konsep teori kemafaatan dari aliran utilitas, yang bertujuan perundang-undangan dibuat harus mampu membahagiakan semua pihak dalam hal ini terhadap Petani KJA yang mengalami dampak langsung atas kebutuhan kebijakan juga pemerintah sebagai fasilitator. Konsep Rencana Aksi Daerah ini akan memperkuat Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk konsisten dalam pengalokasikan anggaran dalam mewujudkan dan memaksimalkan potensi wisata desa dalam pencapaian Desa Wisata.

a. Dinas Pariwisata Provinsi

Hasil Rencana Aksi ini secara langsung memastikan leading sektor masing-masing yakni Konsep Program Dinas Pariwisata dan Dinas Pemerintahan Desa dapat terintegrasi untuk *Program Destinasi Pariwisata* dengan kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata dengan melibatkan Petani Eks KJA ditiap-tiap Kab, Pembinaan Pengelola/Pelaku Usaha Pariwisata khususnya yang berdampak penertiban bagi Petani KJA, Daerah, Wisata, Pengelolaan Kawasan Wisata terhadap peningkatan layanan Hotel, Jasa Perjalanan Wisata, Hiburan/Pertunjukan, pelatihan pengelolaan SPA dengan bahan rempah-rempah tradisional/berdasarkan kearifan lokal (Alternati lain), penataan kios-kios kuliner dan toilet bersih, Pelatihan peningkatan Skill dalam peelayanan tamu bagi pramu saji hotel, tour guide di Kawasan Danau Toba serta pelatihan peningkatan penataan khas kuliner daerah.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi

yakni Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa khususnya BUMDES dengan penguatan peraturan daerah dan desa sehingga memaksimalkan pengelola Bumdes mampu mewujudkan pencapaian kesejahteraan masyaraat Desa dalam penataan pencapaian ekonomi, dan disamping itu juga melaksanakan pelatihan bagi pengurus BUMDES sebagaimana konsep Kemetrian Pariwisata dalam menata pariwisata dari Desa sehingga terwujud konsep Desa Wisata dikawasan wisata Kawasan Danau Toba.

c. Revitalisasi BUMDES

khususnya kawasan daerah wisata dalam mencapai Desa Wisata Yang Mandiri, sebagaimana konsep Pasal 90 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pencapaian untuk pemberian hibah dan/atau akses permodalan masyarakat desa, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar bagi masyarkat desa, memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa, sebagai bagian strategi rancana aksi Daerah, untuk mendorong terciptanya produk-produk unggulan Desa termasuk juga alam pengembangan Desa Wisata sebagaimana acuan kebijakan Permen Pariwisata dan Permen Desa Tertinggal.

3. Penelitian lanjutan terhadap desa-desa yang memiliki usaha KJA, guna memaksimalkan dan justifikasi terhadap rumusan penyusunan kebijakan dalam Peraturan Gubernur tentang Recana Aksi Daerah dalam penanganan dan penanggulangan Usaha KJA.
4. Perlu melibatkan pihak ke-3 yakni korporasi yang bertujuan untuk pemulihan dan memaksimalkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Sibaganding dalam menata wisata kuliner berbasis edukasi wisata budidaya ikan Kawasan Danau Toba.



**MAULIATE
TERIMA KASIH
THANK YOU**